



iNOVASI untuk NEGERi
nfo indonesia

EDISI # 06 MARET 2021

<https://infoindonesia.id>

**Sumsel
Bersiap
Jadi Lumbung
Energi Nasional**

**Keroyokan
Memulihkan
Pariwisata**

**Askolani SE, MA
Mengoptimalkan
Pendapatan Negara**

**Yakinlah
Jokowi
3 Periode**



9 310779 300000

Rp. 50.000,- Jumbo Rp. 75.000,- Luar Pulau

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN 1 HALAMAN

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL

RP 50.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562

*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

PENDIRI

Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin

DIREKTUR

Usman Rizal

PEMIMPIN UMUM

Aldi Gultom

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

REDAKTUR PELAKSANA

Rio Taufiq Adam, Andika Salahudin

REDAKTUR

Andyanto, Aprilia Rahapit, Hesti Dimalia, Rusdiyono, Benni Martha Daya, Yuliani

REPORTER

Dian Taressa, Desi Wulandari, Anugrah Dany, Abu Bakar Usman, Rifky Ilmi, Pras Budi Presetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Khoirur Rozi, Rahmad KR, Iwan Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Dian Taressa (Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri (Kalimantan Utara), Rizky Ananda (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar Usman (Kepulauan Bangka Belitung)

EDITOR & GRAFIS

Al Amin

TATA LETAK

Sujatmiko

MEDIA SOSIAL

Hesti Dimalia

KEUANGAN

Dra Nurhamida

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Sri Astuti

PENGEMBANGAN BISNIS

Kiki Ibrahim

DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT

A/N : PT. Wahana Multimedia
BCA : No Rek : 553-041-4321
KCP Otista Jakarta Timur

RAMAI

Rangkaian perubahan sedang ramai berlangsung. Namun, perubahan dapat terjadi dari wilayah tak kasat mata berupa nilai --sesuatu yang dianggap baik atau buruk, berlanjut ke wilayah nyata berupa pelaksanaannya oleh lingkungan sosial tempat penerapannya. Juga lingkungan fisiknya.

Begitulah kita melihat wilayah abstrak sumber perubahan itu adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jelas UU Cipta Kerja adalah penciptaan sebuah nilai tentang apa yang baik dan yang buruk bagi bangsa ini. Yang baik antara lain menciptakan banyak lapangan kerja sehingga segenap bangsa Indonesia lebih sejahtera. Sedangkan yang buruk adalah jika banyak warga kesulitan memperoleh pekerjaan dan kesejahteraannya menurun, yang pada titik kritisnya akan menjadi ancaman bagi eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lepas dari perdebatan tentang karakter omnibus law (satu paket aturan atau yang mencakup banyak aspek) penerapan UU Cipta Kerja kini mulai menyentuh hingga ke tingkat pribadi warga negara. Serangkaian aturan turunan yang merinci UU Cipta Kerja terutama di bidang investasi, misalnya, terkait izin investasi minuman keras. Aturan turunan lainnya menyentuh soal investasi pengangkatan barang muatan kapal tenggelam yang lebih ditujukan untuk kapal-kapal kuno dan muatannya --sering mendapat sebutan harta karun di kalangan masyarakat awam.

Yang lebih baru misalnya, aturan turunan UU Cipta Kerja berupa Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Tujuan pembentukan Keppres ini antara lain meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, dan meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Dari tujuan Keppres ini terlihat jelas karakter omnibus law yang mencakup banyak tingkatan, mulai dari wilayah publik: pemerintahan dan komunitas bisnis di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota, hingga domestik di tingkat keluarga dan perorangan warga.

Namun, perlu pula mengingat bahwa sedigital apapun perekonomian yang berada dalam jaringan internet, dasar eksistensinya adalah kegiatan nyata di lingkungan sosial dan fisik. Jadi, jangan melupakan peningkatan tata kelola dan kinerja sektor riil seperti industri berbasis sumber daya alam dan manusia. Untuk soal ini, negara-negara maju menunjukkan pemeran utama bukanlah pemerintahan, melainkan sektor industri dan jasa swasta di keramaian hingga pelosok sepi sana. ●

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter : @1Infoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id



DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
MARET
2021



06 INFO UTAMA

Wacana Presiden tiga periode bukan barang baru sebenarnya. Ini kerap dikaitkan dengan amendemen konstitusi. Seiring dengan timbul tenggelamnya wacana itu, Presiden Joko Widodo menjawab tak berminat.



18 INFO SUMSEL

Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru berkunjung ke proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim. Kunjungan itu merupakan dukungan untuk mewujudkan Sumsel sebagai lumbung energi.



48 INFO PROFIL

Lebih dari tujuh tahun menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013-2021), Askolani SE, MA kini beralih tugas menjadi Dirjen Bea dan Cukai. Jabatan barunya ini lebih mengejar pendapatan.

86 INFO SELEBRITI

Sejumlah pesohor ternyata memiliki destinasi wisata baik hotel maupun villa yang dapat disewa para pelancong. Mudah-mudahan bisnis mereka juga bertahan dan maju dengan upaya membuka Bali untuk wisatawan secara bertahap.





52 INFO EKONOMI

Salah satu turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka pintu investasi pengangkatan harta karun muatan kapal tenggelam. Investasi asing lebih berpeluang.



68 INFO ISTANA

Bali adalah etalase negeri karena menjadi gerbang utama pelancong asing yang datang ke Indonesia. Pembenahan sektor pariwisata domestik yang terdampak pandemi global Covid-19 bermula dari sana.



88 INFO KHUSUS

Secara umum perhatian dan kebijakan tentang harta karun di dalam negeri timbul-tenggelam, terutama yang berada di dasar lautan. Mengapa timbul-tenggelam? Banyak penjelasannya.

- 3 DARI REDAKSI
- 24 INFO JATIM
- 30 INFO PILKADA
- 32 INFO SUMBAR
- 72 INFO TEKNOLOGI
- 76 INFO SPORT
- 80 INFO WISATA
- 98 KAJI



Presiden 3 Periode

ASAP LAMA MENGEPUK KEMBALI

Wacana Presiden tiga periode bukan barang baru sebenarnya. Ini kerap dikaitkan dengan amendemen konstitusi. Seiring dengan timbul tenggelamnya wacana itu, Presiden Joko Widodo menjawab tak berminat.

Bagaikan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wacana Presiden tiga periode muncul berulang. Pada pertengahan Maret 2021, wacana itu pun menghangat lagi, kali ini kebetulan memang beriringan dengan kemunculan titik api karhutla setidaknya di 10 provinsi.

Nah, untuk wacana Presiden tiga periode kali ini, tak kurang politisi senior, Amien Rais, ikut mewanti-wanti masyarakat tentang skenario politik ke arah tiga periode itu. Lewat rekaman video yang disiarkan akun Youtube

Amien Rais Official, Ketua MPR RI periode 1999-2004 itu mengungkapkan ada upaya yang betul-betul luar biasa, dengan menggunakan semua sumber daya politik dan keuangan, yang bertujuan "mencengkeram" semua lembaga tinggi negara terutama MPR, DPR dan DPD RI.

"Yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah bahwa ada usaha yang betul-betul luar biasa skenario dan backup politik serta keuangannya itu, supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara terutama DPR,



MPR dan DPD, tapi juga lembaga tinggi negara yang lain,” ujar Amien Rais.

Amien, yang dalam video tersebut mengenakan peci dan kemeja hitam, juga menyebut skenario politik terkait berusaha melibatkan TNI dan Polri untuk bermain politik sesuai selera rezim. Menurut dia, upaya politik itu sangat berbahaya. “Sekarang sudah ada semacam opini publik yang mula-mula samar tapi makin lama makin jelas ke arah mana rezim Jokowi melihat masa depannya,” ungkap pendiri Partai Amanat Nasional ini.

Ia menjelaskan, kelompok yang mendorong Jokowi tiga periode akan mengambil langkah pertamanya yaitu meminta Sidang Istimewa MPR untuk melakukan amendemen ke-5 UUD 1945. “Mungkin satu-dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Kemudian akan ditawarkan pasal baru yang kemudian akan memberikan hak presiden itu bisa dipilih tiga kali. Kalau ini betul-betul keinginan mereka maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan Innalillahi

wainna ilaihi rojiun,” ucapnya.

Menurut Amien, saat ini bangsa Indonesia ada pada tahapan *“It’s now or never, tomorrow will be too late”*. Jika rakyat membiarkan rezim berkuasa tanpa menoleransi kritik dan membasmi

“
Amien Rais, ikut
mewanti-wanti
masyarakat ten-
tang skenario
politik ke arah tiga
periode itu

oposisi atau dalam ketiadaan demokrasi maka Indonesia bakal mengalami kehancuran politik dan perpecahan bangsa yang lebih berat lagi.

“Saya meminta saudara-saudara

sekalian para anggota DPR MPR, DPD, lembaga-lembaga tinggi yang lain, akankah kita biarkan ‘plotting’ rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya bisa keliru, kalau perlu saya minta maaf.

“Atau kemudian, kita akan menekan, bukan people power turun ke jalan, itu sudah kuno. Tapi, bagaimana kita bisa menunjukkan dengan posisi yang betul-betul solid bahwa rezim itu sedang mengarah kepada penguburan demokrasi kita. Demokrasi sedang akan dikubur kalau rencana rezim yang saya curigai itu berjalan,” ujar politisi yang di masa sebelum reformasi sempat mempopulerkan frasa kancil pilek untuk menggambarkan kaum intelektual dan cerdas-pandai yang bungkam menghadapi kezaliman ini.

Namun, jarang yang mengaitkan pernyataan Amien Rais soal Presiden tiga periode tadi dengan peristiwa beberapa hari sebelumnya. Pada Selasa, 9 Maret, Amien bersama perwakilan Tim Pengawal Peristiwa Pembunu-

• INFO UTAMA

han (TP3) enam anggota laskar FPI menyampaikan sejumlah hal kepada Presiden Jokowi.

"Kami minta agar para pelaku pembunuhan diadili dan dihukum secara adil. Ini adalah pelanggaran HAM berat, bukan hanya pelanggaran HAM versi Komnas HAM," kata salah satu inisiator TP3, Muhyiddin Junaidi lewat pesan singkat.

Ada tujuh orang perwakilan TP3 yang bertemu dengan Jokowi. Amien Rais yang memimpin rombongan itu.

Dalam pernyataan yang disampaikan saat audiensi dengan Jokowi, Amien Rais dkk mengatakan enam

siaan Pancasila dan UUD 1945," demikian pernyataan sikap TP3.

Amien Rais dkk mendesak pemerintah untuk memproses kasus tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. "Kami mendesak kasus ini harus segera diselesaikan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan agar tidak menjadi warisan buruk dari pemerintahan ini," lanjut pernyataan tersebut.

Sebagai tanggapan resminya, Presiden Joko Widodo mengemukakan sudah meminta Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan apa yang sebenarnya

diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik, yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50 adalah pelanggaran HAM biasa," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta.

Mahfud juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.



anggota laskar FPI telah dibunuh secara kejam. Mereka menilai ada extra judicial killing oleh aparat negara.

"Polri memang telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Komnas HAM juga menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana biasa. Akan tetapi temuan kami menyatakan pembunuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, kami menganggap kasus ini masih jauh dari penyelesaian yang sesuai dengan asas keadilan dan kemanu-

terjadi, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar FPI di tol Cikampek. Hal itu diutarakan Presiden saat menerima sejumlah perwakilan terkait hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Maret 2021.

Komnas HAM sendiri telah memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut kepada pemerintah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. "Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar

"Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah membentuk (TGPF) lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan," ungkapnya.

Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya apabila terdapat bukti-

bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat.

"Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Nggak ada (bukti pelanggaran HAM berat)," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden yang didampingi oleh Menkopolhukam Mahfud Md. dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sejumlah perwakilan meminta adanya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwakilan tersebut ialah Amien Rais, K.H. Abdullah Hehamahua, K.H. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansuфри Idrus Sambo.

Lepas dari kaitan pertemuan mengenai enam laskar FPI itu, seperti apa tanggapan Presiden Jokowi tentang wacana jabatan tiga periode? "Apa lagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah," ungkapnya dalam rekaman video.

Jokowi juga menegaskan, sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. "Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama," sambungnya.

Namun bagaikan karhutla, wacana tiga periode masih akan merembet ke mana-mana. Mungkin para intelektual dan cerdas-pandai yang diibaratkan para kancil penghuni belantara yang mulai langka pun, meski masih pilek, menjadi lebih waspada. •

APA KABAR AMENDEMEMEN KONSTITUSI?

Amien Rais mengungkapkan proses menuju jabatan tiga periode Presiden dapat menempuh jalan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana perkembangan soal amendemen konstitusi itu?

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, menyatakan lembaganya itu memang melakukan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem tata negara melalui rencana amandemen UUD 1945 yang diajukan sejak periode 2014-2019. Namun dia memastikan sama sekali tak ada menyangkut materi perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Di antara poin-poin rekomendasi itu tidak ada satu pun rekomendasi terhadap perubahan masa jabatan presiden. Karena dianggap oleh MPR periode sebelumnya dan juga oleh periode sekarang, tidak ada urgensi untuk mengubah pasal tentang masa jabatan presiden," kata Basarah yang berasal dari PDI Perjuangan itu, Minggu, 21 Maret 2021.

Menurut dia, fokus MPR mengenai amandemen adalah materi haluan negara, atau populer dengan sebutan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Itu Pun bisa lanjut jika mendapat persetujuan pimpinan MPR dan rapat paripurna MPR.

"Sehingga, dapat saya pastikan bahwa pembahasan di Badan Pengkajian MPR saat ini sama sekali tidak ada materi apalagi kesepakatan untuk menjadikan perubahan pasal masa periode jabatan presiden itu diamandemen kembali," ungkapnya.

Untuk materi haluan negara saja, kata Wakil Sekjen PDIP itu, masih panjang tahapan yang harus dilalui untuk mencapai pengesahan pembahasan materinya. "Masih diperlukan uji publik, hingga persetujuan pemangku kepentingan termasuk para ketua umum partai politik. Presiden Jokowi juga harus memberi persetujuan," sambungnya.

Soal sikap PDIP tentang tiga periode masa jabatan Presiden, ia menyatakan tak ada urgensi untuk menambah masa jabatan presiden atau mengurangi masa jabatan presiden dari dua periode. "Dari Fraksi PDI Perjuangan sudah harga mati, istilah kami menyebutkan amandemen terbatas. Terbatas itu hanya menyangkut pasal 3 atau pasal yang menyangkut tentang wewenang MPR, tidak menyangkut pasal yang lain," tandas Basarah. •



MEMANG MASIH WACANA

Wacana Presiden tiga periode di masa pemerintahan Joko Widodo sudah muncul pada akhir 2019. Namun, belum ada yang menegaskan terang-terangan bertanggung jawab memulai wacana itu.

Bukti di atas kertas, entah kajian akademik, atau suara resmi fraksi memang belum ada. Bagaimana asap belum jelas apinya dari mana. Begitulah wacana Presiden tiga periode.

Sebagai kilas balik, wacana itu pernah mengemuka pada akhir November 2019. Malah media sempat mengutip pernyataan Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustofa soal amandemen menyeluruh UUD 45. Salah satunya adalah wacana penambahan masa jabatan presiden.

Namun, Saan menegaskan berkilah belum ada sikap resmi politik partai Nasdem untuk wacana penambahan masa jabatan presiden. Dia berharap hal tersebut sudah ada sebelum masa sidang kedua.

"Jadi kita mewacanakan itu ke publik dan kita sedang menyerap, sikap

publik seperti apa soal GBHN, soal MPR, soal masa jabatan presiden. Bahkan terkait juga soal bagaimana sikap publik terkait dengan pemilu yang 2019 kemarin itu yang antara pileg dan pilpres disatukan," jelas Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 26 November 2019.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah menyatakan, MPR harus mendengarkan berbagai respons masyarakat, termasuk dalam menyikapi wacana masa jabatan maksimal presiden hingga tiga periode. "Ya itu suatu wacana, suatu diskursus. Ditindaklanjuti saja. Nanti kita lihat apa masyarakat sambutannya. Kalau memang kebutuhan ke arah itu kenapa tidak?" kata Surya di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 23 November 2019

la menambahkan, MPR harus jeli



Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid

melihat dan memetakan respons masyarakat. Jika diskursus tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, ia meminta agar disudahi dan tidak dimunculkan kembali. Surya juga mengingatkan jangan sampai pembahasan wacana tersebut membawa kemunduran bagi sistem politik Indonesia.

"Yang kita waspadai adalah terhadap tentu masalah-masalah yang mengganggu semangat persatuan kita. Untuk apa diskursus yang mengundang perpecahan. Tapi kalau diskursusnya semakin mencerdaskan kehidupan bangsa bagus," lanjut dia.

Kala itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak tegas wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia pun menyebut bahwa pengusul masa jabatan tiga periode tersebut sama saja ingin menampar mukanya. "Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maksudnya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua

ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Kepala Negara mengatakan sejak awal sudah meminta amendemen UUD 1945 ini fokus pada masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Jokowi menyayangkan bahwa rencana amendemen itu kini melebar ke masalah pemilihan, hingga masa jabatan presiden. "Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," ujarnya.

Yang pasti, wacana Presiden tiga periode selalu menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Ada yang setuju, tapi ada yang tidak. Begitu pula untuk yang muncul pada tahun ini.

Pengajar Sosiologi Politik di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedi-

lah Badrun, mempertanyakan kemunculan wacana itu belakangan ini. Sedangkan situasinya, kata dia, saat ini rezim Jokowi pada periode pemerintahan yang kedua bisa dikatakan sudah tidak layak mengelola negara, apalagi mau tiga periode.

"Sebab, korupsi terjahat sepanjang sejarah telah dilakukan oleh rezim ini. Selain itu, melakukan kejahatan demokrasi bertubi-tubi dari mengabaikan aspirasi rakyat soal pelemahan KPK, mengabaikan aspirasi rakyat soal omnibus law, dan memanfaatkan situasi Covid-19 untuk membuat regulasi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat," ujarnya, Minggu, 14 Maret 2021.

Dia menambahkan, menjabat dua periode saja sebetulnya tidak layak bagi Presiden Jokowi karena pemerintahannya telah membuat negara berantakan dan makin terpuruk. Jika benar skenario politik Jokowi tiga periode itu sedang berjalan, Ubed menyebutnya sebagai bencana besar bagi



Wakil Ketua MPR dari PKB, Jazilul Fawaid

• INFO UTAMA

masa depan Indonesia.

"Itu kemunduran demokrasi. Salah satu gagasan utama pada reformasi 1998 agar presiden cukup dua periode itu agar rezim tidak mengarah pada diktatorisme atau pseudo-democracy alias demokrasi semu. Jadi kalau rezim ini mau tiga periode, itu artinya melawan agenda reformasi politik 1998. Langkah yang bertentangan dengan

tan oposisi tidak ada lagi, oposisi sedang dihajar, katakanlah sekarang tinggal PKS. Wacana amendemen itu bisa terjadi dalam politik karena koalisi pemerintahan sudah mayoritas, sudah 80 persen. Kalau mau amendemen, ya bisa terjadi," terangnya.

Pendiri Indonesia Political Review ini kembali mengingatkan bahwa segala hal mungkin terjadi dalam dunia politik.

saan, sudah sepuluh tahun merasakan jabatan dan kalau kekuasaan itu lepas mereka mengalami post power syndrome. Kalau Pak Jokowi jadi presiden lagi mereka aman dan tidak tergantikan juga," jelas doktor ilmu politik ini.

Ujang meyakini wacana presiden tiga periode ini bisa diterima dengan nyaman oleh level elite politik tetapi belum tentu menyenangkan hati rakyat. "Sementara level elite politik nyaman, di tingkat rakyat bisa saja menimbulkan kemarahan karena kekuasaan yang terlalu lama akan cenderung korup atau disalahgunakan," katanya.

Dia mencontohkan bagaimana Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat padahal baru menjabat sebagai KSP beberapa tahun. "Bagaimana Moeldoko bisa mengku-deta Demokrat itu kan abuse of power, penyalahgunaan jabatan. Apalagi kalau kekuasaan itu bertahan 15 tahun, akan cenderung korup, disalahgunakan, menjadi kekuatan absolut yang pasti menjadi penyalahgunaan absolut," katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Vox-pol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, berpendapat, isu Presiden Jokowi menjabat tiga periode mungkin saja terealisasi dengan berkaca pada kemampuan Jokowi menyelesaikan konflik politik selama ini. "Memungkinkan atau tidak itu hanya presiden yang tahu, beliau yang menghitung kekuatan politiknya. Lihat saja kemampuan beliau selama ini cukup berhasil, tidak ada yang gagal," ujarnya.

Menurut dia, keinginan melanggengkan kekuasaan menjadi satu periode lagi adalah wajar. Namun, dia sendiri belum yakin target tersebut sesuai dengan kemauan Presiden Jokowi, apalagi jika melihat kembali pernyataan Jokowi pada Desember 2019 silam setelah isu itu muncul dari parlemen.

"Tiga periode itu maunya siapa? Belum tentu maunya presiden, mungkin maunya orang-orang lain. Pernyataan Jokowi dulu kan dia enggak mau itu. Tujuan menggulirkan isu tersebut mungkin untuk menyenangkan presiden atau menjebak presiden, saya



Ujang Komarudin



Pangi Syarwi Chaniago

agenda demokrasi," ujarnya.

Sedangkan pakar ilmu politik yang juga dosen di Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan konstruksi politik yang ada saat ini memang sangat memungkinkan ide Jokowi tiga periode terwujud. "Kekua-

Apa yang dikhawatirkan Amien Rais, menurutnya, sangat beralasan karena isu presiden tiga periode tidak mungkin timbul-tenggelam dalam waktu panjang tanpa ada desain politik yang jelas.

"Orang-orang di lingkaran Pak Jokowi sudah nyaman dengan kekua-

enggak tahu,” ungkap Pangli.

Di sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa tidak ada keinginan pemerintah untuk menambah masa jabatan presiden satu periode lagi. “Presiden Jokowi tidak setuju adanya amendemen lagi,” kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, Senin, 15 Maret 2021.

Mahfud juga menyampaikan hal sama kepada para wartawan yang meliput kunjungan kerjanya ke gedung Kejaksaan Agung. “Pemerintah tidak punya wacana tentang mau tiga kali, empat kali, lima kali, kita Undang-Undang dasar yang berlaku sekarang saja,” terang Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bilang, salah satu alasan penting mengapa Orde Baru dibubarkan dan Reformasi 1998 digulirkan adalah periode masa jabatan presiden yang tidak dibatasi. Lalu, MPR 1999-2004 melakukan rangkaian amendemen konstitusi yang salah satunya membatasi menjadi hanya dua periode.

“Kalau mau mengubah lagi, itu urusan MPR, bukan wewenang Presiden,” tegasnya.

Ia memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet karena hal tersebut bukan bidangnya. “Itu urusan partai politik, mau mengubah, mau tidak,” ucap Mahfud.

Jadi, kata Mahfud, hendaknya janganlah pihak eksekutif diseret-seret dalam wacana ini. “Diskusinya di MPR dan partai politik, dan itu haknya, kan asyik baca-baca begitu, enggak apa-apa,” ucapnya.

Sanggahan juga datang dari Juru Bicara Presiden, Fadjoel Rachman. Menurutnya, sampai sekarang Jokowi tetap menghormati ketentuan masa jabatan presiden selama dua periode. “Presiden Jokowi tegak lurus ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, khususnya masa jabatan Presiden 2 periode,” kata Fadjoel, Senin, 15 Maret 2021.

Bagaimana kalangan partai politik? Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyatakan tidak ada agenda parlemen untuk mengamendemen

kembali UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. “Sampai hari ini belum ada satu pun usulan secara legal dan formal baik dari Istana, individu, maupun anggota MPR yang mengusulkan ke pimpinan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode,” kata Hidayat melalui pesan singkat.

Tokoh senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, justru sebagian besar pimpinan MPR dari berbagai fraksi sudah secara terbuka menyatakan tidak ada agenda amen-

nan MPR untuk menjaga amanat reformasi agar tidak terulang kondisi politik yang tidak demokratis karena masa jabatan presiden yang berkepanjangan seperti pada masa Orde Baru,” terangnya.

Sedangkan Wakil Ketua MPR dari PKB, Jazilul Fawaid, mengajak publik untuk tidak berlebihan atau curiga terhadap isu amendemen UUD 1945 karena MPR belum resmi menerima usulan perubahan terhadap konstitusi negara. “Tidak perlu saling curiga, amendemen bukanlah sesuatu yang dilarang. MPR pada masa Pak Amien Rais melakukan amendemen juga,”



Pengajar Sosiologi Politik di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun.

demen untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Hidayat, hal itu merupakan komitmen pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi dengan melaksanakan Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Itu merupakan sikap kolektif pimpi-

kata Jazilul.

Dia juga mengingatkan, upaya mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945 bukan langkah yang mudah. “Perlu kehendak kuat dari rakyat, yang tercermin dalam usulan dan pendapat fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah,” tandas Jazilul.

Jadi, anggaplah asap lama yang sumber apinya belum kelihatan juga. Kemudian hilang untuk muncul lagi suatu ketika. ●



Presiden RI Joko Widodo.

YANG TERSIRAT DAN TERSURAT

Komunikasi politik memang dapat berupa pesan tersurat atau terang-terangan, namun kerap juga tersirat atau samar. Yang tersirat itu memerlukan pemahaman mendalam termasuk konteksnya. Makin rumit karena digitalisasi semakin mengintensifikannya.

Yang tersurat sudah jelas. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit membatasi masa jabatan presiden hanya boleh dua periode. Pembatasan ini dinilai memiliki alasan yang signifikan untuk keberpihakan kepemimpinan di negeri ini.

Nah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman bahkan menekankan agar MPR tetap menolak adanya amandemen untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Sekalipun keinginan amendemen itu muncul dari rakyat. "Gimana kalau rakyat yang mau 3 periode? Tetap tidak boleh!" tegasnya lewat akun Twitter pribadinya, Minggu, 21 Maret 2020.

Menurut dia pembatasan dua periode adalah hal penting yang tujuannya juga eksplisit. Mencegah presiden memperluas atau menyalahgunakan kekuasaan.

Toh amendemen tetap dimungkinkan jika ada usulan sekurangnya dari 1/3 anggota MPR. Namun, tanda-tanda munculnya usulan yang memenuhi syarat itu juga belum tampak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, belum ada satupun usulan legal/ formal baik dari Istana, individu maupun anggota MPR yang mengusulkan ke pimpinan MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 demi memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Justru yang terjadi, sambungnya, pada 13 dan 14 Maret 2021 sebagian besar pimpinan MPR, baik itu dari PKS juga dari PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, dan PPP sudah secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada agenda amandemen UUD NRI 1945 perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode.

Menurut Hidayat, sikap itu merupakan komitmen pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi dengan melaksanakan UUD NRI 1945 pasal 7. Bahwa masa jabatan Presiden dan Wapres selama lima tahun dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Itu merupakan sikap kolektif Pimpi-



Refly Harun dan Amien Rais

nan MPR untuk menjaga amanat reformasi, agar tidak terulang kondisi politik yg KKN dan tidak demokratis seperti pada masa Orba, krn berkepanjangan-masa jabatan Presiden,” tandasnya.

Jika demikian, boleh jadi wacana Presiden tiga periode mengandung pesan tersirat. Pandangan Anggota Komisi I DPD RI, Abdul Rachman Thaha boleh jadi mewakilinya.

“Isu masa jabatan presiden tiga periode, saya yakini, hanya pancingan terhadap watak kenegarawanan Jokowi,” katanya, Rabu, 17 Maret 2021. Menurut dia, banyak isu politik lain yang juga mempersoalkan sikap kenegarawanan Presiden.

“Tapi khusus pada wacana penambahan periode masa jabatan presiden, jika itu benar-benar menjadi kenyataan maka akan menjadi realitas yang terlalu mahal bagi reputasi Presiden dan terlalu suram bagi catatan perjalanan negara-bangsa Indonesia,” tuturnya.

Pesan tersirat pun dapat muncul dengan gaya santai, malah jenaka. Misalnya, apa yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari.

“Dengan ini saya proklamirkan, saya adalah eksponen tiga periode begitu. Ya walaupun ditolak ya nggak apa-apa. Namanya juga ide dan gagasan,” kata Qodari dalam tayangan video, Kamis, 18 Maret 2021.

Qodari mengatakan, sebetulnya bu-

kan soal Jokowi menjadi presiden tiga periode. Tapi, dia membayangkan dan mengantisipasi bahwa pemilu 2024 nantinya Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dia menilai, saat ini dua figur tersebut menjadi ‘imajinasi politik’ di kalangan masyarakat kita.

“Jadi tepatnya bukan Jokowi tiga periode, tapi Jokowi-Prabowo 2024 itu tagline saya. Saya proklamirkan nih Jokowi-Prabowo 2024 begitu,” ujarnya.

Menurut Qodari, dirinya memproklamirkan duet Jokowi-Prabowo pada 2024 karena didasari atas fakta polarisasi yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, polarisasi itu sudah terjadi sejak Pilkada DKI 2012, Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017 dan terakhir polarisasi yang terjadi di Pilpres 2019.

Bahkan Qodari melihat polarisasi politik juga terjadi di belahan dunia lain seperti yang dialami Amerika Serikat (AS) di Pilpres 2020 kemarin. Negeri Paman Sam itu sempat terbelah, meski dianggap sebagai negara super power dan tingkat demokrasi yang matang serta pendidikan dan ekonomi yang maju.

Nah, menyusuri timbul tenggelamnya wacana Presiden tiga periode, tampak benang merah yang tersambung jika melihat konteksnya. Tanggapan Jokowi pun sebenarnya mengandung pesan komunikasi yang tersirat pula.

Ketika wacana itu muncul di akhir 2019, jawaban Jokowi jelas dan tegas.

Namun, tetap di dalamnya terkandung pesan tersirat juga.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maksudnya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Pesan tersirat dari Jokowi, ia paham wacana itu mengemuka sebagai ekspresi adanya keinginan atau kepentingan terselubung di balik pengajuan wacana itu. Keinginan terselubung yang kemungkinannya ada tiga: menampar muka, mencari muka, dan menjerumuskan.

Jika melihat konteks wacananya, akan lebih mudah menelusuri, apa yang kemudian menjadi keputusan Jokowi terkait kepentingan terselubung di akhir 2019 itu.

Konteks wacana Presiden tiga periode yang muncul kembali pada Maret 2021 mendapat tanggapan berbeda. Jawaban Jokowi terekam secara digital dan membuka kemungkinan untuk melihat pesan tersiratnya.

“Apa lagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah.

“Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden

• INFO UTAMA

tiga periode. Konstitusi mengamankan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ungkap Presiden Jokowi pada Senin, 15 Maret 2021.

Dua hari sebelumnya, Amien Rais muncul dalam video yang mewacanakan Presiden tiga periode. Wacana itu mendapat tanggapan berbeda dari Presiden. Bukan menampar, atau mencari muka, dan menjerumuskan

dang surut dan mengkhawatirkan. Presiden Jokowi menyangkalnya dengan tetap berpegang pada konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat di masa pandemi.

Namun, rupanya Amien kurang puas dengan jawaban itu. Ini tampak dalam video di kanal YouTube Refly Harun yang mulai tayang pada Sabtu, 20 Maret 2021. “Rezim Jokowi ini me-

meyakini, Pemerintahan Jokowi ingin menggenggam seluruh kekuasaan secara totalitas. “Coba bayangkan DPR, sudah takluk, DPD, MPR takluk. Kemudian ketua-ketua lembaga tinggi, itu semua kata istana,” jelas Amien Rais.

Tidak hanya itu, Amien Rais juga menyayangkan aparat Kepolisian dan TNI, turut serta diseret-seret ke dalam politik, yang seharusnya TNI dan Polri bersifat netral tidak memihak. “Bahkan yang paling sedih lagi, TNI tiga angkatan juga polisi, itu kan diseret-seret ke arena politik,” ujar Amien Rais.

Kemudian Amien Rais mengimbau agar TNI dengan sungguh-sungguh setia hanya kepada bangsa dan negara. “Pemerintah harus dilihat dulu. Pemerintahnya itu betul-betul bela kepentingan bangsa dan negara, atau sebaliknya,” ujarnya.

Ia kemudian mengkhawatirkan kondisi demokrasi di Indonesia. “Sehingg saya khawatir, bahwa kalau demokrasi pelan-pelan dipotong kakinya, dipotong tangannya, kemudian akhirnya seperti beberapa analisis itu, kalau sebuah demokrasi menjadi otoriterisme, maka ibaratnya raganya utuh, jiwa raganya sudah tidak ada,” tandasnya.

Dalam video itu, Amien juga menyebut sudah tahu ke mana arah rezim ini. Ia berkata jika tak segera diingatkan untuk putar haluan maka akan ‘tenggelam’. “Jadi rezim ini arahnya sudah jelas menurut saya, kalau tidak kita suruh putar haluan ya, bisa-bisa kita sudah too late, jadi tenggelam, sudah,” ujarnya.

Dalam video lain masih bersama Refly Harun, Amien menilai pemerintahan ini sudah jauh meninggalkan demokrasi. “Semua sudah going extreme. Jadi, kezaliman ekonomi sudah ekstrem. Kezaliman politik juga sudah ekstrem. Kezaliman HAM juga sudah ekstrem. Bisa jadi sudah jadi ekstremis semua rezim ini. Jadi, ini tinggal tunggu waktu,” ujar Amien Rais.

Hal tersebut mengingatkan Amien teringat momen jatuhnya Soekarno pada 1966 dan digantikan oleh Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Ketika Soeharto jatuh, Amien mengaku bahwa dirinya turut ikut melakukan reformasi.



Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari.



Anggota Komisi I DPD RI, Abdul Rachman Thaha.

kali ini, melainkan menunjukkan sikapnya yang tetap memegang prinsip demokrasi dengan memegang konstitusi dan tetap fokus pada upaya menangani pandemi. Tersirat juga upaya membenahi ekonomi sehingga keluar frasa janganlah membuat kegaduhan.

Dari gaya komunikasi Presiden, jelas ia menangkap pesan tersirat Amien Rais yang menilai praktik demokrasi dalam penyelenggaraan negara se-

mang ingin menggenggam kekuasaan, setotalitas mungkin,” kata Amien Rais.

Amien Rais lalu membandingkan era pemerintahan Jokowi dengan Soeharto sewaktu orde baru. “Jadi pada zaman Pak Harto saja tidak seperti ini,” tegas Amien Rais.

Doktor Ilmu Politik alumni University of Chicago ini lalu menjelaskan alasan mengapa dirinya sangat

"Bukan ikut tapi Pak Amien yang jadi masinisnya," ujar Refly.

"Ini saya kira ya kalau makin panik makin serba curiga. Saya dikejar-kejar dengan pertanyaan kenapa tiga periode, siapa dalangnya, dan apa buktinya. Itu sudah dibuka semua dan itu sudah ketahuan semua," ungkap Amien.

"Ini juga merupakan pengalihan isu dengan berpura-pura mengejar tiga periode ini. Tapi, sesungguhnya ada hal yang lebih gawat lagi. Negara kita sudah jadi Negara Republik MCC (Mafia Cyber Cukong) Indonesia," ungkap Amien.

Begitulah gambaran komunikasi politik di era digital. Bisa eksplisit, namun ada juga yang tersamar. Eksplisit dan tersamar sekaligus memungkinkan juga melalui komunikasi digital. •



Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman.

KSP: KEMBALI KE MPR, PEMERINTAH TAK MEMIKIRKANNYA

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak berminat untuk menjabat sebagai presiden selama tiga periode. Namun jika banyak pihak yang mendorong Jokowi untuk kembali maju dalam pemilihan presiden, kata Irfan, keputusan akan diserahkan kembali kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Itu kembali lagi kepada MPR. Nanti teman-teman di MPR yang menyerap aspirasi itu," kata Irfan dalam diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu, 20 Maret 2021. Irfan lalu mengaitkan hal itu dengan zaman Reformasi, di mana ada perubahan pasal-pasal yang diamandemen lantaran adanya dorongan kuat dari rakyat. Apabila ada dorongan besar dari rakyat untuk mengamandemen UUD 1945, Irfan menyebut semuanya dikembalikan lagi ke MPR.

"Kembali kepada parpol-parpol yang ada di parlemen untuk menyikapi masalah tersebut. Jadi konteksnya harus bisa dibedakan apakah keinginan ini jadi keinginan Pak Jokowi atau keinginan rakyat secara masif," jelas Irfan.

Sebelumnya, isu amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden tiga periode kembali bergulir setelah

memanasnya polemik pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono. Apalagi, mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut kudeta Demokrat itu sebagai salah satu langkah Jokowi untuk merangkul oposisi dan merencanakan skenario jabatan tiga periode.

dang Dasar 1945, bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden tak mungkin tiga periode atau lebih.

Irfan menyebut Amien tak memiliki dasar dan argumentasi yang kuat terkait jabatan presiden menjadi tiga periode. "Mimpi di siang bolong, disamber petir, tiba-tiba bangun 'Oh Pak Jokowi mau



Sedangkan Irfan menyatakan pemerintah tak pernah memikirkan soal jabatan presiden tiga periode. Bahkan, kata Irfan, Jokowi tak berminat menjabat sebagai presiden selama tiga periode. Menurut dia, Jokowi tetap memegang amanat Pasal 7 Undang-un-

tiga periode nih'," kata Irfan.

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wapres itu, kata dia, merupakan semangat reformasi pada era 98. "Jadi, kami berkeyakinan Pak Jokowi tidak punya niat, ambisi untuk melanggar konstitusi negara," ujarnya. •



PEMPROV DUKUNG KELANJUTAN PLTU SUMSEL 8

Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru berkunjung ke proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim. Kunjungan itu merupakan dukungan untuk mewujudkan Sumsel sebagai lumbung energi.

U paya Provinsi Sumatera Selatan menjadi lumbung energi nasional terus berlanjut meski banyak kendala di depan mata. Salah satunya adalah merealisasikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Lalang atau lebih dikenal dengan PLTU Sumsel 8 yang berada di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.

"Pembangunan PLTU Tanjung Lalang ini semakin membuktikan Sumsel merupakan lumbung energi nasional," ujar Gubernur Sumsel Herman Deru saat



meninjau progres pembangunan PLTU 8 Sumsel tersebut, Senin, 15 Maret 2021. Menurut Gubernur HD, pengoperasian PLTU ini kelak memungkinkan Sumsel memasok energi listrik kita ke pulau lain jika jaringan listrik bawah laut telah tersedia.

"Ini akan menjadi satu-satunya kawasan ekonomi khusus energi yang di dalamnya juga akan memproduksi batubara menjadi gas dan hasil produksi lainnya. Dan ini yang pertama," ungkapnya.

Pada kunjungan itu terungkap kemajuan pengembangan proyek ini telah mencapai sekitar 72 persen. Sedangkan target pengoperasiannya tetap sesuai jadwal pada tahun depan.

Pembangunan PLTU dengan kapasitas 2x660 megawatt oleh PT Bukit Asam bekerja sama dengan perusahaan asal Hongkong itu disebut-sebut merupakan yang terbesar dan mampu menyuplai kebutuhan listrik di pulau Sumatera. PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 di Tanjung

Lalang ini merupakan salah satu proyek ketenagalistrikan 35.000 MW yang tahap konstruksinya terus menunjukkan kemajuan di tengah kendala pandemi Covid-19.

Proyek ini disponsori oleh PT Huadian Bukit Asam Power (PT. HBAP) dengan equity senilai 25 persen dari total biaya konstruksi yakni mencapai 420 juta dolar AS. Sedangkan sisanya mendapat bantuan dana dari China Export Import Bank (CEXIM) sebesar 75 persen atau senilai 1,26 miliar, setara dengan sekitar Rp17 triliun. PT HBAP merupakan konsorsium antara perseroan China Huadian Hongkong Company Ltd dengan share sebesar 45 persen, dan PTBA 55 persen.

Gubernur HD menyatakan dukungannya terhadap pembangunan PLTU tersebut. Alasannya PLTU tersebut akan membawa dampak baik bagi Sumsel.

"Ini akan membawa dampak besar bagi pendapatan negara. Untuk daerah juga demikian, berdampak langsung dengan terciptanya lapangan kerja baru.

Di masa pandemi ini saja, ada sekitar tiga ribu tenaga kerja lokal terserap," tuturnya.

Dampak lainnya yakni akan menggeliatnya ekonomi baru sekitar kawasan PLTU tersebut. "Ini juga akan menumbuhkan ekonomi rakyat. Mulai dari hal kecil seperti usaha makanan. Ini akan sangat membantu masyarakat sehingga ekonominya meningkat," sambungnya.

Ia menambahkan, pembangunan PLTU tersebut ditargetkan akan rampung pada Maret 2022 mendatang. "Targetnya Maret tahun depan pembangunan ini selesai dan sudah bisa menyuplai listrik," sambungnya.

Sedangkan Wakil Direktur Huadian Bukit Asam Power (HBAP) Dody Arsiadian mengatakan terhitung pada akhir Februari 2021, progres pembangunan PLTU 8 Sumsel sudah lebih dari 50 persen. "Sejauh ini tidak ada kendala dalam pembangunannya. Progresnya sudah sampai 72,6 persen. Seperti yang

disampaikan Pak Gubernur pada Maret 2022 mudah-mudahan sudah siap digunakan," ujarnya.

Mengenai dukungan Gubernur Herman Deru terhadap pembangunan



• INFO SUMSEL

PLTU tersebut, Huadian menyampaikan apresiasinya. "Sudah lama kita menunggu kunjungan pak Gubernur ini. Kita ingin membuktikan janji yang telah kita sampaikan. Kita harapkan, kunjungan selanjutnya bisa dilakukan pak Gubernur saat peresmian nanti. Yang jelas, kami ucapkan terima kasih atas dukungan tersebut," tandasnya.

PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 adalah pembangkit listrik tenaga batu bara dengan skema "Mine-to-Mouth" dengan lokasi pembangkit yang terletak paralel terhadap lokasi tambang batu bara sehingga biaya logistik dapat dikurangi. PLTU ini direncanakan akan memiliki kapasitas 1.200 MW dan akan tersambung dengan Transmisi Sumatera 500 kV, dan transmisi HVDC Jawa-Sumatera.

Pengembangan PLTU Mulut Tambang didukung dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk menekan bi-

“
Sejauh ini tidak ada kendala dalam pembangunannya. Progresnya sudah sampai 72,6 persen. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur pada Maret 2022

aya produksi seperti bahan bakar, kendaraan, dan terjamin lebih efisien 20-40 persen dibandingkan dengan PLTU

thermal lainnya. Selain itu pasokan batu bara dari lokasi pertambangan dengan kalori rendah lebih terjamin akan terserap oleh PLTU mulut tambang tanpa terbebani biaya transportasi yang menjadi penyebab risiko kerugian.

Selanjutnya, dalam regulasi lain, dikemukakan ketiga Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Pengesahaan RUPTL 2018-2028 menyebutkan, pemerintah mewajibkan PLN untuk mengutamakan pembangunan PLTU Mulut Tambang dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas/ Gas Uap/ Mini Gas sepanjang sumber energi dimaksud tersedia di wilayah usaha yang dikembangkan.

Bagi perusahaan batu bara, proyek PLTU Mulut Tambang cukup menggurukan. Pasalnya perusahaan bisa mendapatkan jaminan penyerapan produksi batu bara. biasanya, PLTU Mulut Tambang terletak di lokasi tambang batu



bara dengan kalori rendah antara 2.800 hingga 3.500 kal dengan kandungan air tinggi. Namun, tanpa bermitra dengan PLN, konsesi batu bara tidak akan menguntungkan bagi perusahaan.

Sedangkan batu bara berkalori rendah bukan komoditas ekspor mengingat pengirimannya akan mengalami penyusutan tajam hingga 50 persen. Itu pula sebabnya pembangkit mulut tambang harus dekat dengan sumber batu baranya. Terlebih lagi, pembangkit membutuhkan batu bara sekitar 1,5 hingga dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan PLTU biasa. Namun, dengan berkurangnya biaya transportasi dan penyimpanan, beban biaya pembangkitan PLTU MT bisa lebih rendah sekitar 30 persen.

Biaya konstruksi juga lebih murah, karena tidak perlu membebaskan lahan yang telah disediakan oleh pemegang konsesi batu bara. Sebagai imbangannya, pemerintah mengatur harga listrik



PLTU MT maksimal 75 persen dibandingkan Biaya Pokok Produksi (BPP) setempat.

Di sisi lain, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang pemanfaatan batubara untuk pem-



• INFO SUMSEL

bangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*), Pengembangan PLTU Mulut Tambang bisa menggunakan skema penunjukan langsung. Maka, sejumlah PLTU mulut tambang dibangun di daerah-daerah yang merupakan pusat cadangan batubara melimpah yaitu di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, terdapat 5.690 MW PLTU Mulut Tambang yang direncanakan akan diban-

pembangkit. Terlebih, biaya transportasi menjadi lebih efisien.

Sedangkan untuk PLTU Sumsel 8, semula pembangunannya juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa melalui High Voltage Direct Current (HVDC). Namun, oleh sebab pasokan listrik Jawa sudah mengalami surplus, maka listrik dari PLTU Sumsel 8 akan dialirkan untuk Sumatera Grid melalui jalur transmisi Extra High Voltage 500 kV. Dalam hal ini PT HBAP juga akan membangun jalur transmisi dari PLTU

Indonesia di dalamnya. Inti kesepakatannya adalah bersama-sama menurunkan emisi karbon dan menekan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celsius.

Kabar baiknya, dampak lingkungan PLTU Tanjung Lalang juga telah diperhitungkan. Misalnya soal limbah abu sisa pembakaran batu bara di pembangkit listrik ini. Perkembangan terakhir, limbah batu bara dari PLTU Tanjung Lalang akan menjadi bahan tambahan pembuatan semen di PT Semen Baturaja



gun dengan rincian sekitar 4.790 MW berada di Sumatera, sementara 900 MW di Kalimantan. Beberapa di antara proyek PLTU tersebut dibangun oleh perusahaan pertambangan batubara dan anak usahanya. Ini juga merupakan solusi ekspansi bisnis dari hulu hingga ke hilir dalam menguasai rantai pasok batubara untuk beberapa

Sumsel 8 ke gardu induk PLN di Muara Enim sejauh 45 km.

Toh sebagai catatan, proyek-proyek PLTU mulut tambang, tanpa kecuali yang di Tanjung Lalang, tetap berada dalam kerangka COP 21, Conference of Parties di Paris (dikenal juga sebagai Kesepakatan Paris dalam mengatasi perubahan iklim) yang juga menyertakan

(Persero) Tbk. Sebelumnya, BUMN semen Baturaja itu juga sudah bekerja sama serupa dengan PT Pupuk Sriwijaya yang memanfaatkan batu bara dalam proses produksinya.

Jadi, lebih dari sekadar Sumsel menjadi lumbung energi, PLTU Sumsel 8 pun mendukung Sumsel maju untuk semua. ●



SEMEN BATURAJA SIAP TAMPUNG LIMBAH PLTU SUMSEL 8

Untuk mengurus limbah pembakaran batu bara di PLTU Sumsel 8, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. bekerja sama dengan PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) dalam pemanfaatan hasil dari pengembangan pembangkit mulut tambang batu bara itu. Direktur Pemasaran Semen Baturaja Mukhamad Saifudin mengungkapkan, kerja sama ini merupakan bentuk sinergitas dari kedua perusahaan untuk meningkatkan daya saing.

"Apalagi lingkungan industri semakin kompetitif. Kami berupaya memanfaatkan peluang penciptaan revenue stream maupun cost transformation," ujarnya dalam keterangan resmi terkait penandatanganan nota kesepahaman dengan China Huadian Hongkong Co Ltd (CHDHK) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang berlangsung pada Rabu, 17 Maret 2021.

Dalam kerja sama itu, limbah PLTU Sumsel 8 berkapasitas 2x600 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang tercakup antara lain berupa debu hasil pembakaran batu bara, yakni fly ash dan bottom ash. Saifudin menerangkan perseroan memanfaatkan fly ash dan bottom ash untuk proses produksi semen. Dia menjelaskan kedua produk itu dapat diolah dengan baik dalam produksi semen portland dengan peningkatan kualitas dan ketahanan.

Nota kesepahaman kerja sama tersebut akan berlangsung selama periode dua tahun terhitung tanggal 02 Maret

2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023. Menurut Saifudin, ini bukan yang pertama kali Semen Baturaja mengolah limbah fly ash dan bottom ash.

"Sejak 2019 pun SMBR telah melakukan sinergi BUMN dengan Pusri Palembang untuk pemanfaatan fly ash dan bottom ash," katanya. Sekadar info proses pembuatan pupuk berbahan baku gas itu juga dapat menggunakan energi batu bara yang dianggap lebih murah.

Sedangkan dengan HBAP, Semen Baturaja akan memasok batu kapur (limestone) untuk kepentingan pengembangan PLTU Sumsel 8. Produk batu kapur Semen Baturaja bermanfaat dalam proses flue gas desulfurization (FGD). FGD adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menghilangkan sulfur dioksida (SO₂) atau belerang dari gas buang pembangkit listrik berbahan bakar fosil, maupun emisi sulfur oksida lainnya seperti pembakaran limbah.

Semen Baturaja, kata Saifudin, siap memasok limestone sesuai kebutuhan PT HBAP, karena SMBR memiliki kemampuan untuk menghasilkan limestone dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan proses operasi perusahaan tersebut. "Kami juga menyediakan gypsum sebagai bahan baku proses produksi," ujarnya

Jadi, sambungnya, kerja sama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. "Terutama dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing perusahaan," tandasnya. ●

JALAN KEBAIKAN GUBERNUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Rentetan dampak pandemi Covid-19 memang kerap tak terduga. Setelah menjadi kenyataan, baru terasa berat menanggungnya. Begitulah dengan pemberian santunan korban yang meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19. Namun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menawarkan jalan kebaikan.

Keluarga yang kehilangan anggotanya oleh virus corona yang berbahaya itu sudah pasti merasakan langsung duka cita dan kehilangan. Negara lantas berupaya hadir dengan niat baik menyantuni untuk meringankan duka cita warganya yang tertimpa kemalangan.

Maka melayanglah Surat Edaran Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani Adi Wahyono. Surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial tingkat provinsi se-Indonesia itu adalah permohonan untuk mensosialisasikan adanya santunan senilai Rp15 juta bagi ahli waris

yang keluarganya meninggal karena Covid-19 berdasarkan pernyataan resmi dari rumah sakit atau puskesmas.

Sosialisasi tentu berjalan. Namun, realisasi bantuan dana kematian itu terhenti. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui penghentian santunan itu menjadi keputusan setelah melihat kekuatan anggaran di kementerianya. Risma mengatakan, ada kesalahan administrasi sebelumnya saat program bantuan tersebut dijalankan. Termasuk dalam pendataan serta kesalahan administrasi lainnya.

"Jadi ada yang terlampaui dalam pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat sekitar bulan Juni tahun lalu tersebut oleh Plt direktur di Kemensos. Ini adalah kesalahan ad-



ministrasi karena seharusnya yang membuat adalah menteri," kata Risma di Surabaya, Minggu, 28 Februari 2021.

Selain itu, menurut Risma, keberadaan dana bantuan kematian Covid-19 juga tidak mempertimbangkan berapa jumlah mereka yang meninggal. Kondisi ini mengakibatkan Kemensos kelabakan dalam pengelolaannya. Karena jumlah yang meninggal tidak bisa diprediksi, sehingga Kemensos kehabisan anggaran untuk dana kematian akibat Covid-19.

Risma yang pernah menjadi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, selama dua periode itu mengaku Kemensos tak memiliki anggaran lain untuk tetap mengakomodasi santunan tersebut. "Dapat dari mana uangnya, jadi nggak mungkin saya mengada-adakan juga dari mana," ucap Politikus PDI Perjuangan itu.

Sedangkan Adi Wahyono sudah bukan pejabat lagi. Ia malah menjadi tersangka korupsi bantuan sosial yang juga melibatkan Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Peter Batubara.

Pejabat pengganti Adi, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Sunarti, melayangkan surat edaran baru. Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19 tertanggal 18 Februari 2021 mengemukakan, usulan dan rekomendasi penerima santunan terhenti karena ketiadaan anggaran.

"Pada tahun anggaran 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 bagi ahli waris pada Kemensos RI, sehingga terkait dengan rekomendasi dan usulan yang disampaikan oleh Dinsos Provinsi/Kab/Kota sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti," demikian antara lain petikan SE tersebut.

Selanjutnya edaran itu juga meminta Kepala Dinas Sosial Provinsi dapat menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing. Termasuk permintaan Dinas Sosial agar menghentikan pengajuan rekomendasi dan/atau

usulan pada Kementerian Sosial.

Semula, Kemensos berencana memberikan bantuan kepada ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal sebesar Rp 15 juta per orang. "Sebagai bentuk perhatian dan belasungkawa dari negara," ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama dalam konferensi pers di BNPB, Selasa, 24 Maret 2020.

Namun, apa daya, harapan keluarga korban meninggal untuk mendapat santunan pun sirna. Di Jawa Timur, misalnya, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) M Alwi mengungkapkan, telah mengirimkan 1.480 berkas permohonan santunan korban Covid-19 ke Kemensos. Namun, dari ribuan berkas permohonan yang dikirim itu, baru 76 orang yang menerima santunan dari Kemensos.

"Yang sudah dikirim 1.480, yang ada di kita belum dikirim 731, yang sudah cair, itu 76," kata Alwi Rabu 24 Februari 2021. Ia mengatakan para korban Covid-19 di Jatim belum ada lagi yang menerima santunan dari Kemensos se-



• INFO JATIM

lain yang 76 tadi.

"Setelah itu kok nggak ada lagi. Kami menanyakan melalui surat ke Kemensos, tapi ya nggak ada jawabannya," ujarnya.

Menurut Alwi, pihaknya masih menunggu instruksi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur untuk solusi kelanjutan santunan kepada korban Covid-19. Sementara Alwi menunggu, Gubernur Khofifah yang berpengalaman menjadi Menteri Sosial di masa

korban meninggal akibat Covid-19 sebagaimana tertuang dalam surat dari Kementerian Sosial RI Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tertanggal 18 Februari 2021 yang menimbulkan perasaan kecewa bagi ahli waris korban," demikian antara lain bunyi edaran tersebut.

Dalam surat tersebut, para ahli waris korban meninggal yang diakibatkan oleh Covid-19, berhak dan akan menerima santunan sebesar Rp5 juta, dari (Pemerintah Provinsi) Pemprov Jatim. "Maka berkaitan dengan hal terse-

Covid-19. "Keputusan Bu Gubernur (Khofifah) ini untuk meringankan beban masyarakat," kata Alwi, Kamis, 18 Maret 2021.

Menurut dia, pemberian santunan ini akan dilaksanakan secara bertahap. Prioritas pertama kepada para ahli waris yang sudah mengajukan permohonan sebanyak 2.144 orang. "Kami telah menyampaikan surat edaran kepada bupati/wali kota agar segera mengirim nama-nama ahli waris korban akibat Covid-19 dari 2.144 orang itu," katanya.

Sebenarnya, lanjut Alwi, Dinsos Jatim sudah memiliki data by name by address. Namun, Pemprov Jatim ingin ada pengajuan ulang. Jika santunan kepada 2.144 korban itu sudah selesai, Dinsos Jatim akan melaksanakan untuk tahap selanjutnya.

Diperkirakan, di Jawa Timur saja ada sekitar tujuh ribu ahli waris korban virus corona yang belum tersantuni. Sedangkan data kematian Covid-19 di Jawa Timur pada awal Maret 2021 tercatat mencapai 9.200 jiwa lebih.

Toh Alwi menjelaskan, berdasarkan catatan sementara, baru sekitar 2.144 orang yang mengajukan permohonan tersebut ke Dinas Sosial Jatim. Mereka akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan. "Prioritas pertama, santunan dari Pemprov Jatim itu diberikan kepada yang sudah mengajukan permohonan," ucapnya.

Jika sebanyak 2.144 orang tersebut telah menerima bantuan, kata Alwi, maka penyerahan santunan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. "Ada sekitar tujuh ribuan lebih korban yang belum tersantuni. Santunan ini menggunakan dana bantuan tidak terduga. Semua dana santunan untuk korban Covid-19 ini dari APBD," ucapnya.

Meski demikian, lanjut Alwi, para korban terdampak harus melengkapi beberapa persyaratan untuk mengambil bantuan itu. Seperti, surat keterangan meninggal Covid-19 dari rumah sakit/puskesmas/dinas kesehatan. Kemudian, surat keterangan ahli waris, fotocopy kartu keluarga korban dan ahli waris, serta fotocopy Rekening Tabungan yang aktif atas nama ahli waris yang ditunjuk.

Bagaimana dengan daerah lain? Semoga menemukan juga jalan kebaikan. ●



pemerintahan Presiden Susilo Bambang sudah lebih dulu menunjukkan daya tanggapnya.

Khofifah ternyata sudah melayangkan Surat Edaran (SE) nomor 460/5026/107.4.07/2021, perihal Pemberian Santunan Korban Meninggal Dunia Akibat Terinfeksi Covid-19 kepada para Bupati dan Wali Kota di wilayah pemerintahannya.

"Sehubungan adanya kebijakan penghentian pemberian santunan kematian

but Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan bagi masyarakat Jawa Timur yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan diberikan kepada ahli waris korban," lanjut petikan surat itu.

Kadinsos Alwi pun lebih lega sekarang. Dia bilang, keputusan Khofifah itu bertujuan untuk meringankan beban para ahli waris, setelah ditinggalkan anggota keluarganya karena

JALAN SANTUN MENUJU KEBAIKAN

Santun dan menyantuni. Jejak-jejak jabatan Menteri Sosial itu masih tampak jelas pada sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Seperti memberi contoh kepada para bupati dan wali kota di wilayahnya, acara menyantuni anak yatim dan piatu mendahului pelantikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota itu.

Dalam sesi ketiga pelantikan 17 bupati dan wali kota di Jawa Timur di Gubernuran, Gedung Graha, Surabaya, Jumat, 26 Februari 2021 itu, acara diawali dengan santunan kepada anak yatim oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung Wibowo yang hadir bersama sang istri Endang Nugrahani.

Acara berlanjut dengan pengambilan sumpah dan jabatan oleh Gubernur. Selanjutnya, pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan dan penyerahan surat putusan. Menurut Khofifah, dalam sesi ketiga pelantikan ini dihadiri oleh dua tamu istimewa yaitu, Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni yang mengawasi secara langsung protokol kesehatan (prokes) selama pelantikan dan Sekab Pramono Anung, sebagai orang tua dari Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.

"Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati bersama, tamu VVIP kita Bapak Sekretaris Kabinet RI, Dr Ir Pramono Anung Wibowo bersama Ibu Endang Pramono Anung. Terima kasih rawuhnya, semangatnya, supportnya bagi kami semua. Kalau kita ingin cari top mentor untuk para bupati dan wali kota, ya beliau ini. Hari ini mudah mudahan resonansinya bisa ke kita semua. Bagaimana manajemen kabinet dan seterusnya," kata Khofifah.

"Kemudian yang kita hormati Wakil Gubernur Jawa Timur dan Ibu Arumi Bachsin, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Dekranasda, Balitbang Kementerian Dalam Negeri Bapak Agus Fatoni. Kita hormati bersama Sekda Prov Jawa Timur dan Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian Bapak Konjen Amerika Serikat yang hadir se-

cara virtual. Tentu kita berikan doa dan selamat serta kita beri support kerja mereka bupati dan walikota dan wakilnya yang hari ini tiga tahap, mulai tadi pagi enam kepala daerah, siang enam kepala daerah dan sore lima kepala daerah. Kalau dihitung jadinya 17. Karena untuk Tuban bulan Juni dan Pacitan bulan April. Total yang melaksanakan Pilkada serentak 19 kota dan kabupaten di Jawa Timur," tambahnya.

Khofifah juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan jajaran di daerah serta Bawaslu Jatim dan daerah yang telah menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu dengan aman dan lancar, serta menghasilkan kepala daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat.

daerah sudah mengikuti pengambilan sumpah jabatan. Oleh karena itu, dirinya mendorong setiap kepala daerah segera menyusun Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPd. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun. Sedangkan RKPd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

"Ini akan mengantarkan awal perjalanan Bapak Ibu kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentu harapan kita disegerakan RPJMD di masing-masing daerah. Setelah itu RKPd di masing-masing daerah, proses beriringan di



"Selama kampanye pilkada berjalan baik. Dari semula dikhawatirkan bakal terjadi kluster pilkada, tetapi kekhawatiran itu tidak terjadi. Ini kerja keras yang terhormat Ketua KPU Provinsi Jatim dan daerah dan Ketua Bawaslu Jatim dan daerah. Terima kasih semuanya sudah memberikan kerja keras. Melahirkan pemimpin - pemimpin yang akan mengomandani perjalanan kabupaten kota di Jawa Timur yang akan datang," imbuhnya.

Proses pelantikan pada hari ini, menurut Khofifah sudah berjalan dengan lancar. Masing-masing kepala

kabupaten dan kota dan provinsi serta RKP di Nasional. Tentu harus dilakukan percepatan dan sinkronisasi. Karena beberapa waktu lalu kita rapat koordinasi, sesungguhnya fokus disiapkan untuk skala prioritas program, akan melaksanakan musrenbang Provinsi pada bulan April nanti, kemudian tingkat Nasional pada Mei dan Maret dilaksanakan di kabupaten dan kota, maka mohon semua beriringan di masing-masing daerah," pesannya.

Termasuk beriringan bersikap santun dan ringan menyantuni itu tentunya. Bukan begitu Bunda Khofifah? ●



COBLOS ULANG DI 4 TPS KABUPATEN PALI

Empat Tempat Pemungutan Suara di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, harus mengulang pencoblosan untuk memilih Bupati. Mahkamah Konstitusi memutuskannya setelah pasangan calon nomor 1 mengajukan perselisihan hasil pemilihan bupati pada Pilkada 2020 lalu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nomor urut 1 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi. Demikian salah satu butir Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Pali yang dibacakan pada Senin, 22 Maret 2021.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian" kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya. Mahkamah juga menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pe-

milihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, tertanggal 15 Desember 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS.

Keempatnya adalah TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan KPU PALI



untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 4 TPS tersebut. Pelaksanaan PSU paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan ini.

Hasil rekapitulasi KPU menyebutkan perolehan pasangan nomor urut 1 Devi Darmadi adalah 51.205. Sedangkan Pasangan nomor urut 2, petahana Heri Amalindo dan pasangannya Suharjono meraih 51.863 suara.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menilai pelaksanaan Pilkada PALI banyak terjadi pelanggaran yang tidak sesuai asas pemilihan yang jujur. Pelanggaran dimaksud, di antaranya banyak pemilih ganda atau yang memilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS. Dalil Pemohon tersebut, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang terjadi di 4 TPS.

Sebelumnya, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon terkait penerapan Pasal 158 UU No. 16 Tahun 2010 tentang Pilkada. Jumlah perbedaan perolehan antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah dua persen x 103.068 suara (total suara sah) yaitu

2.061 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah 2.061 suara.

Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 51.205 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 51.863 suara. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 658 suara atau 0,64 % (51.863 suara dikurangi 51.205 suara), sehingga kurang dari 2.061 suara atau tidak melebihi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil ke MK.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang juga membacakan pendapat Mahkamah.

Sidang perdana PHP Bupati PALI berlangsung pada Selasa, 26 Januari 2021. "Pemohon mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan seperti Penukal Utara, Penukal, Tanah Abang, Abab dan Talang Ubi," ungkap Pemohon Devi Harianto.

Pada persidangan, Pemohon juga mengungkapkan terdapat perbedaan hasil perhitungan dari penelusuran penghitungan suara, surat suara berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan absen dibandingkan dengan formulir C.

Sidang berlanjut pada Senin, 1 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait. Dalam sidang ini

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Termohon menilai permohonan Paslon Nomor Urut 1 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi, Pemohon Perkara 16/PHP.BUP-XIX/2021, salah objek.

"Permohonan Pemohon salah objek. Karena objek gugatan Pemohon adalah

• INFO PILKADA

Surat Keputusan KPU No. 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bukan Penetapan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020," jelas Ali Nurdin salah seorang kuasa Termohon.

Menurut Termohon, Pemohon tidak melakukan koreksi atau perbaikan terhadap objek sengketa yang dipersoalkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa

kesalahan penghitungan perolehan suara paslon dalam Pilkada Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020. Menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara itu, termasuk juga penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon ihwal pemilihan yang mencoblos lebih dari satu kali. Berdasarkan pengawasan Bawaslu, tidak ditemukan adanya dugaan pelangga-

hon tidak menunjukkan bukti kuat atas dugaan tersebut.

Termasuk juga, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas perbedaan hasil penghitungan dari penelusuran penghitungan suara, surat suara berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan absen dibandingkan dengan formulir C. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas.

Namun, dalam sidang pembuktian yang berlangsung pada Rabu, 3 Maret 2021, saksi Tarmizi mengungkap



objek sengketa yang diajukan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU No. 366. Padahal Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 tersebut, sehingga objek sengketa itu bukanlah keputusan Termohon.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Penukal Abab Lematang Ilir, perolehan suara Paslon Nomor urut 1 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi sebesar 51.205. Sedangkan untuk Paslon Nomor Urut 2 Heri Amalindo dan Soemarjono memperoleh 51.863 suara. Perbedaan suara yang diperoleh oleh paslon nomor urut 1 dengan paslon nomor urut 2 adalah sebesar 658 suara.

Berikutnya, Termohon menampik tuduhan Pemohon mengenai terjadinya

ran seperti disampaikan Pemohon. Juga tidak ada keberatan dari saksi paslon nomor urut 1 dan saksi paslon nomor urut 2 terhadap dugaan tersebut. Para saksi dari kedua paslon tersebut menandatangani formulir C hasil KWK.

Selain itu, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan daftar hadir di TPS Desa Air Hitam, Kecamatan Penukal. Hasilnya, tidak ditemukan bukti yang jelas mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan seperti didalilkan Pemohon.

Sementara itu, Paslon Nomor Urut 2 Heri Amalindo dan Soemarjono selaku Pihak Terkait, membantah semua dalil yang disampaikan Pemohon dalam sidang pendahuluan. Menurut Pihak Terkait, dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tidak mendasar dan Pemo-

adanya pemilih memilih dua kali dalam satu TPS. "Lokasinya di TPS 08 Desa Babat, Kecamatan Penukal. Saat itu saya sebagai pemilih dalam pilkada dengan menggunakan KTP karena tidak mendapat surat undangan memilih. Saya mendengar cerita dari seseorang bernama Mulkan, ada tiga pemilih memilih dua kali di TPS 08 Desa Babat," ungkap Tarmizi.

Selanjutnya Saksi Pemohon, Hendra Gunawan menerangkan dugaan terkait tanda tangan surat suara saat pencoblosan. Pada 9 Desember 2020 saat pencoblosan untuk Pilkada PALI, Hendra datang ke TPS 10 Desa Air Hitam, Kecamatan Penukal.

Kemudian dia menyerahkan surat undangan pemilih ke anggota KPPS. Tak lama Hendra dipanggil anggota KPPS untuk melakukan pencoblosan. Sebe-

lum mencoblos, menurut anggota KPPS tersebut, Hendra tidak perlu melakukan tanda tangan.

“Daftar hadir ada, tapi anggota KPPS langsung menyuruh saya untuk melakukan pencoblosan. Jadi, saya tidak tanda tangan. Setelah saya mencoblos dan melipat surat suara, saya langsung pergi,” jelas Hendra yang kemudian mengetahui bahwa surat suara miliknya ditandatangani anggota KPPS bernama Khoiri.

Sedangkan Saksi Pemohon, Amrullah mengutarakan laporan dia ke Bawaslu

dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pilkada,” kata Rufinus.

Alasannya, belum ada hukum acara peradilan Pilkada yang dapat memproses kecurangan di lapangan. Oleh sebab itu, ia berharap hukum acara itu tersedia. “Sehingga Hakim MK dapat berfungsi lebih optimal sebagai penyidik, penyidik, penuntut umum maupun yang akan memutuskan perkara ini,” tandasnya.

Sedangkan KPU Penukal Abab Lematang Ilir selaku Termohon menghadirkan saksi bernama Dahrul Munadzali,

tidak memilih dalam DPT. Selanjutnya Saksi Termohon bernama Johan Saputra, Ketua PPK Penukal Utara. Johan juga membantah soal dua pemilih yang dituduh mencoblos dua kali di Kecamatan Penukal Utara.

Termohon juga menghadirkan I Gde Pantja Astawa selaku ahli yang menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon terkait para pemilih yang memilih lebih dari satu kali, termasuk pemalsuan tanda tangan pemilih, sebenarnya sudah dibantah oleh Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon. Na-



terkait dugaan pemilih bernama Tarmizi yang juga Saksi Pemohon, diketahui memilih dua kali di TPS 08 Desa Babat. Amrullah mengetahui hal itu dari daftar hadir DPT dan DPTb.

“Saya diminta tim paslon nomor urut 1 selaku Pemohon untuk mengecek daftar hadir DPT dan DPTb. Saya melihat ada nama Tarmizi di DPT dan DPTb dengan NIK yang sama,” ujar Amrullah.

Dari sisi pandangan ahli, tampil pakar hukum Rufinus H Hutauruk sebagai saksi dari pemohon. Ia menjelaskan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tujuannya antara lain agar demokrasi dapat diterapkan dalam pilkada dengan jujur dan adil. Rufinus berpandangan, jujur dan adil didefinisikan tidak ada kecurangan apapun. “Namun, ketika saya mendengar pernyataan dan jawaban dari Saksi Pemohon, saya sangat sedih

anggota PPK Talang Ubi saat hari pencoblosan pada 9 Desember 2020. Dahrul menjelaskan terkait tuduhan Pemohon bahwa ada 12 pemilih yang memilih dua kali di Kecamatan Talang Ubi.

“Tuduhan itu tidak benar, kami telah melakukan penelusuran bersama segenap jajaran kami. Baik PPK, PPS maupun KPPS dan bertemu langsung dengan para pemilih yang bersangkutan. Mereka tidak pernah menggunakan hak pilihnya dalam DPT, sebagaimana surat pernyataan dari para pemilih yang diperkuat dengan surat pernyataan dari KPPS,” jelas Dahrul.

Saksi Termohon berikutnya, Alamsyah, Ketua PPK Penukal. Dia menegaskan bahwa tidak benar ada 13 pemilih memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Penukal. Alamsyah beserta jajaran telah menelusuri 13 pemilih yang ternyata

mun Astawa lebih fokus pada persoalan mandat dari Saksi Pemohon.

“Persoalan mandat ini menjadi penting karena kajian tentang mandat akan menjelaskan esensi makna mandat, hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat, akibat hukum yang timbul dari hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat. Semua ini penting dikaji, apakah hal-hal yang sudah dilakukan dan disetujui oleh saksi yang berbekal surat mandat Pemohon, bertindak untuk dan atas nama Pemohon, apakah dapat diajukan ulang oleh Pemohon dalam persidangan ini,” urai Astawa.

Dengan berbagai pertimbangan dan kesaksian, MK akhirnya memutuskan hanya empat TPS yang menjadi lokasi pemungutan suara ulang. Kita tunggu bersama hasilnya. ●



PEMUNGUTAN SUARA ULANG KEBUN SAWIT LABUHANBATU SELATAN

Perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, dalam Pilkada 2020 berakhir dengan putusan pemungutan suara ulang di 16 TPS. Dalam putusan Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap.

"Amar putusan mengadili... Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 TPS," tegas Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan yang berlangsung pada Senin, 22 Maret 2021.

Dalam amar putusan, Mahkamah

juga memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di 16 TPS. masing-masing TPS itu antara lain TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 018 di Desa Torganda. Selanjutnya, TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torganda, juga TPS 001, TPS 003, TPS 005, TPS 006 Desa Tanjung Selatan Kecamatan Kampung Rakyat.

Pelaksanaan PSU paling lama 30 hari kerja sejak pengucapan putusan tadi. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan KPU Labuhanbatu Selatan untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS serta PPK di TPS-TPS tersebut.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini menjadi jalan keluar sengketa yang sidangnya berlangsung sejak akhir Januari 2021. Pada sidang



perdana PHP Bupati Labuhanbatu Selatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021, terungkap paslon Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap berdasarkan pleno rekapitulasi perhitungan KPU kabupaten berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 65.429 suara. Sedangkan Paslon Edimin dan Ahmad Padli memperoleh 66.007.

Namun menurut perhitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 65.429 dan perolehan suara Paslon Edimin dan Ahmad Padli adalah sebesar 65.340 suara. "Perolehan suara yang menempatkan Pemohon berada di peringkat kedua terkait upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edimin dan Ahmad Padli, sehingga menyebabkan nilai partisipasi pemilih pada Kecamatan Torgamba, yang lokasi TPS-nya terletak dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, mencapai nilai rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 95%. Namun tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu terkait

dugaan-dugaan yang terjadi," ungkap Pris Madani, kuasa hukum Hasnah dan Kholil dalam sidang yang berlangsung Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan dalil itu, Paslon nomor urut 2 memohon agar MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, Pukul 15.45 WIB.

Kemudian menetapkan perolehan suara pasangan Hasnah Harahap-Kholil Jufri (Pemohon) sebanyak 65.429 suara, dan perolehan suara pasangan Edimin dan Ahmad Padli sebanyak 65.340 suara. Selain itu, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS di Desa Torganda, Desa Bukit Tujuh, Desa Aek Raso, dan Desa Tanjung Selatan.

Dalam sidang selanjutnya yang berlangsung pada Rabu, 2 Februari 2021,

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Termohon) melalui kuasa hukumnya, Muhammad Halim memaparkan jawaban atas permohonan perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Paslon Hasnah-Kholil.

"Setelah menelaah substansi dari pokok permohonan Pemohon dari angka 1-27, terdapat dua isu alasan yang dijadikan dasar dari dalil permohonan Pemohon. Pertama, keberatan Pemohon atas tingginya tingkat partisipasi pemilih di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di empat desa yaitu Desa Torgamba, Desa Bukit Tujuh, Desa Aek Raso, dan Desa Tanjung Selamat. Kedua, keberatan Pemohon atas banyaknya pelanggaran administrasi," kata Muhammad Halim.

Halim menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyerahkan jawaban atas kedua isu yang diangkat oleh Pemohon kepada Kepaniteraan. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan membantah seluruh Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan benar dan berlaku atas keputusan rekapitulasi perole-

• INFO PILKADA

han suara yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan keterangan di persidangan melalui perwakilannya, Ahmad Habidin memberikan penjelasan terkait dalil Permohonan perkara nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan proses pengawasan selama berlangsungnya Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil pengawasan dengan hasil keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten

nyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah pihak perusahaan yang memobilisasi dan mengintimidasi para pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 2 Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung.

"Perusahaan melalui beberapa mandor mengajak para karyawannya di sembilan divisi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Apabila diketahui ada provokator-provokator di antara karyawan yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2, maka mereka diberi sanksi mutasi kerja," jelas Ihwan kepada Majelis Hakim Panel II yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

room motor di daerah Torganda.

Berikutnya ada saksi Pemohon, Bangun Sahril Harahap sebagai saksi pasangan calon nomor urut 3 di PPK Kecamatan Torgamba. Bangun menerangkan, Kecamatan Torgamba terdiri dari 14 desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan perkebunan kelapa sawit. "Khusus perkebunan PT Torganda Sibisa Mangatur di Desa Torganda dan perkebunan PT AIP Tasik Raja di Desa Bukit Tujuh, kami tidak mampu merekrut saksi karena 100 persen warga desa merupakan karyawan dua perkebunan tersebut. Maka tidak ada satu pun warga bersedia jadi saksi. Terpaksa kami merekrut saksi dari luar desa untuk memantau TPS-



Labuhanbatu Selatan.

"Kemudian, terkait dalil Pemohon perihal selisih perolehan suara yang disebabkan oleh dugaan kecurangan, berdasarkan hasil pengawasan terkait dugaan kecurangan tersebut, bahwa disimpulkan tidak terbukti adanya dugaan kecurangan karena tidak terdapat laporan perihal dugaan kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon," tegas Ahmad Habidin.

Namun, pasangan Hasnah-Holil mengajukan keterangan para saksi di siang berikutnya pada Selasa, 2 Maret 2021. Ihwan, salah seorang saksi, membenarkan bahwa di tujuh TPS Desa Bukit Tujuh ada upaya terorganisir yang dilakukan oleh institusi di luar pe-

Selanjutnya saksi Pemohon, M Efendi menjelaskan soal DPT di TPS 18 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Dalam DPT tersebut ternyata ada yang sudah pindah domisili, ada yang sudah meninggal, ada pula yang berstatus narapidana. "Nama-nama mereka tercatat di DPT sebagai pemilih di TPS 18 Desa Torganda. Jumlahnya ada 31 orang," ujar Efendi.

Efendi mengaku mengetahui informasi soal DPT tersebut di kantor desa. Sebagian pemilih dalam DPT merupakan relasi bisnisnya. "Sebagian dari para pemilih di DPT tersebut adalah konsumen motor yang saya jual. Jadi saya tahu informasi para pemilih itu," ungkap Efendi yang membuka show-

TPS," kata Bangun.

Sidang PHP Bupati Labusel juga menghadirkan Saksi Ahli Nur Hidayat Sardini yang pernah menjadi Ketua Bawaslu RI. Menurut dia, banyak permasalahan yang tidak mampu dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labusel (Termohon).

"Saya melihat jawaban Termohon sama sekali tidak menjawab dari seluruh hal yang terjadi selama pilkada. Padahal dilihat dari data, banyak sekali masalah yang seharusnya memperoleh jawaban dari Termohon. Misalnya, Termohon tidak menguraikan basis-basis penanganan dari yang sudah dilakukan seluruhnya," ucap Nur Hidayat.

Demikian pula Bawaslu yang men-

urut Nur Hidayat, tampaknya tidak bergerak dalam konteks untuk melaksanakan tugasnya. Struktur organ Bawaslu harus membantu dalam pengawasan pemilihan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 bahwa keberadaan KPU berdampingan dengan jajaran Bawaslu.

Dalam konteks Pilkada Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, ungkap Sardini, pada 21 TPS misalnya tidak ada peran pengawas TPS sejauh yang ia dapatkan berkasnya. "Setiap persoalan harus memiliki jawaban. Khusus jajaran Bawaslu harus mampu menguraikan riwayat-riwayat dari seluruh pelanggaran yang ada. Padahal penyelenggara pemilu wajib menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan," tegas Nur Hidayat.

Sedangkan saksi dari termohon (KPU kabupaten), yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kampung Rakyat, Beni Irawan mengutarakan kejadian saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kampung Rakyat. Hal ini menanggapi keberatan saksi paslon nomor urut 3 terkait segel kotak suara dalam keadaan rusak.

"Kabel untuk mengunci kotak suara masih dalam keadaan utuh dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dipastikan isi dalam kotak suara tersebut dalam kondisi utuh, tidak terjadi perubahan, tidak hilang dan tidak rusak," ungkap Beni.

Ada pula Saksi Termohon, M. Azhar Siregar selaku Ketua PPK Torgamba yang menerangkan fakta yang terjadi di 11 TPS yakni TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 18 di wilayah perkebunan PT Torganda Sibisa Mangatur di Desa Torganda. Selain itu ada beberapa TPS di wilayah PT AIP Tasik Raja di Desa Bukit Tujuh.

"Jumlah pengguna hak pilih pada 11 TPS tersebut adalah di atas 90%. Besarnya partisipasi pemilih di 11 TPS tersebut bukan saja terjadi pada Pilkada Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tetapi terjadi saat Pilpres dan Pileg Tahun 2019 serta Pilgub Sumatera Utara Tahun 2018," ujar Azhar.

Kemudian ada Saksi Pihak Terkait, Singaraja B. Samosir sebagai pemilih dalam pilkada dan karyawan PT Ta-

sik Raja. Singaraja mengungkapkan PT Tasik Raja tidak pernah melakukan intimidasi atau menekan para karyawannya untuk memilih paslon manapun, apalagi paslon nomor urut 2. Singaraja juga menjelaskan terkait pemberian amplop. "Pada 3 Desember 2020 saya juga ditelepon teman saya Ali Siregar sebagai tim pemenang paslon nomor urut 3. Saya diundang Bapak Bupati untuk sebuah acara pada 5 Desember 2020. Saya datang ke perumahan dinas Bupati, diajak makan, berbincang-bincang. Bupati menyarankan saya untuk mendukung paslon nomor urut 3 dan diberi amplop berisi 5 juta rupiah," tutur Singaraja.

Sedangkan dalam pertimbangan

0,37% (66.007 suara dikurangi 65.429 suara), sehingga kurang dari 2.331 suara atau tidak melebihi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil ke MK. "Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo yang juga membacakan pendapat Mahkamah.

Alhasil, panel hakim MK yang mengadili PHP Bupati Labusel berpendapat memang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya



hukum putusan, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon terkait penerapan Pasal 158 UU No. 16 Tahun 2010 tentang Pilkada. Bahwa jumlah perbedaan perolehan antara Pemohon dan paslon peraih suara terbanyak yakni Paslon No. Urut 2 Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung (Pihak Terkait) adalah 1,5% x 155.372 suara (total suara sah) yaitu 2.331 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah 2.331 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 65.429 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 66.007 suara. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 578 suara atau

proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih dan untuk menegakkan asas jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 16 TPS yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ungkap Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan putusan Mahkamah. ●



KEMENANGAN UNTUK PETAHANA DI TASIKMALAYA

Paslon nomor urut 4 di pemilihan Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Iwan Saputra-lip Miftahul Paoz, menyoal kemenangan Paslon nomor urut 2, petahana Ade Sugianto yang berpasangan dengan Cecep Nurul Yakin. Mahkamah Konstitusi memenangkan petahana.

Dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, warga memilih empat pasangan calon (Paslon). Paslon nomor urut 1 adalah Aziz Rismaya Mahpud-Haris Sanjaya yang diusung Partai Gerindra dan Demokrat. Kemudian Paslon nomor urut 2 Ade Sugianto- Cecep Nurul Yakin, diusung oleh partai koalisi PDI Perjuangan, PPP nomor urut 2. Sedangkan Paslon nomor urut 3 jalur independen, Cep Zamzam Zulfikar Nur-Padhil Karsoma. Paslon nomor urut 4 usungan koalisi gemuk PKS, Golkar, PKB, PAN dan NasDem, Iwan Saputra-lip Miftahul Paoz mendapat nomor urut 4.

Rekapitulasi KPU Kabupaten di kawasan Priangan Timur, Jawa Barat itu memenangkan Paslon nomor urut 2 petahana Ade Sugianto-Cecep Nurul

Yakin (PDIP-PPP) dengan perolehan 315.332 suara. Di urutan kedua, Paslon nomor 4, Iwan Saputra-lip Miftahul Paoz (Golkar, PKB, PKS, PAN, Hanura dan Nasdem) meraih 308.259 suara. Selanjutnya Paslon nomor urut satu, Azies Rismaya Mahpud-Haris Sanjaya (Gerindra-Demokrat) 221.924 suara dan Paslon nomor urut 3, Cep Zamzam Dzulfikar Nur-Padil Karsoma (Perseorangan) sebanyak 113.571 suara.

Pleno KPU yang merekapitulasi penghitungan suara sempat kisruh dengan tim pemenang Paslon nomor urut 4 yang memprotes hingga meninggalkan rapat. Di sisi lain quick count LSI Denny JA yang mengambil sampel beberapa TPS memenangkan Paslon nomor 4, sedangkan hasil rekapitulasi memenangkan Paslon nomor urut



2. Pasangan Iwan-lip itu selanjutnya memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi sebagai perselisihan hasil pemilihan.

Alhasil, sidang pengucapan putusan perkara yang berlangsung pada Kamis, 18 Maret 2021 menyatakan, permohonan Paslon Iwan-lip tidak dapat diterima. Alasannya, selisih suara antara Paslon Iwan-lip dan petahana Ade-Cecep terlalu besar dari minimal 0,5 persen suara sah.

"Amar putusan, mengadili... dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ucap Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 itu.

Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon terkait penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah 1.801.882, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan PHP Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 persen x 959.086 suara (total suara sah) = 4.795 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 308.259 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 315.332 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (315.332 suara - 308.259 suara) = 7.073 suara (0,73 persen) atau lebih dari 4.795 suara.

"Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun Pemo-

hon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum," ujar Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan putusan.

Mahkamah juga menanggapi pokok permohonan Pemohon terkait dugaan pelanggaran ASN dalam tahapan pilkada dan politik uang yang dilakukan Pihak Terkait. Mengenai dugaan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak didukung fakta hukum yang dapat meyakinkan Mahkamah. Oleh sebab itu menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Termasuk juga mengenai pembagian uang RT Siaga kepada masyarakat seperti didalilkan Pemohon. Hal ini menurut Mahkamah, merupakan program pemerintah terkait Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Soal pembagian uang melalui ketua RT itu terjadi antara lain di lingkungan RT 01/RW 004 Desa Bojong Sari pada waktu fajar, beberapa jam sebelum Pilkada Tasikmalaya diselenggarakan

• INFO PILKADA

pada 9 Desember 2020. Dalam sidang pada Kamis 4 Maret 2021, saksi Saniah yang diajukan Paslon nomor urut 4 mengungkapkan, warga desa Bojong-sari yang menerima masing-masing mendapat uang Rp 25 ribu. Namun, warga penerima uang harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin.

"Saya dan keluarga saya masing-masing menerima uang Rp 25.000," ungkap Saniah kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Desa Setia Wangi. Mutakin diminta datang ke Balai Desa Setia Wangi. "Saya lupa hari dan tanggal saya ditelepon. Seingat saya, sebelum pilkada. Sampai di Desa Setia Wangi sudah banyak tokoh masyarakat yang hadir. Sedangkan saya sebagai masyarakat biasa. Pak Camat dalam acara itu bilang, tolong dukung paslon nomor urut 2 untuk kenang-kenangan," ujar Mutakin sembari menambahkan tidak ada pembagian uang dalam acara itu.

Selain itu, pemohon juga menghadirkan Topo Santoso sebagai ahli. Pakar hukum pidana pemilu ini mengatakan bahwa secara umum penyelesaian

mendasi Bawaslu dan tindak lanjut KPU. Secara umum, dalam UU Pilkada dinyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi selama pemilihan dikaji oleh Bawaslu, kemudian membuat rekomendasi agar KPU menindaklanjuti.

"KPU wajib menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu. Pada kasus lain, Bawaslu melakukan persidangan dan membuat putusan yang wajib dijalankan oleh KPU," tegas Topo.

Toh, banyak soal teknis lain yang terungkap dalam sidang-sidang sebelumnya, termasuk bantahan dari KPU kabupaten mengenai adanya kabel ties



Saksi lain, Susilo Firdaus mengaku menghadiri rapat pembinaan RT Siaga Covid-19 yang bertempat di aula Desa Suka Senang. "Bapak Bupati Ade Sugianto hadir dalam acara itu. Ada pemberian tunjangan dana RT Siaga Covid-19 sebesar Rp 500 ribu per RT dari tujuh desa. Pemberian tunjangan dana ini sudah tiga kali dibagikan, pada September, Oktober dan November 2020. Sekdes pesan kepada yang hadir agar mendukung pencalonan kembali Bapak Ade Sugianto menjadi Bupati Tasikmalaya," ungkap Susilo.

Selain itu ada Saksi Pemohon, Mutakin menuturkan bahwa suatu pagi dia ditelepon Asep selaku pegawai

perselisihan hasil pilkada merupakan puncak dari upaya mencari keadilan pemilu. Terkait upaya mencari keadilan pemilu, terdapat integritas dalam proses dan integritas dalam hasil. "Sebetulnya, kedua integritas itu tidak bisa dipisahkan secara tegas, sehingga pelanggaran atau kecurangan yang bisa mengganggu integritas proses, pada hakekatnya bisa memengaruhi integritas hasil," ujar Topo.

Dengan demikian menurut hemat Topo, MK merupakan muara dari para pihak yang merasa dirugikan selama proses pemilu maupun hasil pemilu yang ditetapkan KPU untuk mencari keadilan. Topo juga menyoroti reko-

(ikatan penutup) di kotak suara yang sudah terbuka di Kecamatan Cikatomas. Saksi Agam yang menjadi Ketua PPK Cikatomas menyatakan tidak ada kotak suara yang telah terbuka dalam perhitungan suara.

"Saya menyaksikan tidak ada kotak suara yang terbuka. Semua dalam keadaan tertutup dan terkunci," ucap Agam, saksi yang diajukan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Ia juga menegaskan, pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada 11 Desember 2020 berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

Sedangkan mengenai tuduhan kampanye melalui sertifikasi tanah wakaf,

saksi Termohon, Suwardi --Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tasikmalaya, menyampaikan percepatan sertifikasi itu merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Jadi bukan program pemerintahan daerah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020," jelas Suwardi.

Paslon Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin (Pihak Terkait) menghadirkan saksi bernama Mohamad Zen selaku Sekda Kabupaten Tasikmalaya.



Zen menuturkan hal yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf seperti disebutkan Kepala BPN Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa Kepala BPN Tasikmalaya pernah melakukan koordinasi dengan Zen dan segenap jajarannya agar melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Tasikmalaya. Beberapa bulan kemudian Kepala BPN Tasikmalaya datang lagi dan mengatakan percepatan sertifikasi tanah belum memenuhi target.

"Kemudian diadakan rapat koordinasi di jajaran Kabupaten Tasikmalaya dan diterbitkan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya agar mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Tasikmalaya. Dengan

demikian, surat edaran bupati tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada Tasikmalaya," kata Zen.

Berikutnya Saksi Pihak Terkait, Kusnanto selaku Camat Singaparna menerangkan pada 7 September 2020 ada kegiatan sosialisasi tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf yang dihadiri para tokoh masyarakat, para pejabat kecamatan, aparat kepolisian. Namun tidak ada ajakan agar memilih salah satu paslon tertentu dalam kegiatan tersebut.

Kusnanto juga menjelaskan soal dugaan penyalahgunaan APBD melalui dana Covid-19. Dia menerangkan pernah mendapat dana Rp 7,5 juta sebagai anggaran penanganan

kresi. Diskresi berarti pertimbangan, artinya pertimbangan yang baik. Selain itu, diskresi mengandung arti memilih. Oleh sebab itu, diskresi sering disebut sebagai kewenangan bebas. Dalam arti, kewenangan bebas mengambil kebijakan.

Termohon juga menghadirkan seorang ahli, Nur Hidayat Sardini yang menanggapi dalil Pemohon bahwa Termohon dinilai tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu agar mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 (Pihak Terkait) karena banyaknya pelanggaran yang terjadi selama pilkada. Termasuk juga dugaan pelanggaran terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf yang pencairannya diberikan



Covid-19. Dana tersebut bukan untuk pribadi, tetapi digunakan keperluan gugus tugas penanganan Covid-19 di Kecamatan Singaparna.

Kemudian keterangan ahli Pihak Terkait, I Gde Pantja Astawa menanggapi masalah pokok yang dipersoalkan Pemohon berkaitan dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati Tasikmalaya. "Kebijakan yang saya maksud adalah dalam bentuk Instruksi Bupati No. 6 Tahun 2020, kemudian Surat Edaran No. 42 Tahun 2020 dan saya sudah menginventarisir 26 putusan bupati," urai Astawa.

Dikatakan Astawa, semua kebijakan yang dikeluarkan Bupati Tasikmalaya dalam perspektif hukum administrasi negara terkait dengan yang disebut sebagai kewenangan bebas atau dis-

pada hari pencoblosan.

"Rekomendasi itu tidak bersifat mengikat, berbeda dengan putusan yang wajib dilaksanakan. Rekomendasi Bawaslu tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU pada 11 Januari 2021. Hal ini pula sudah pernah diuji di Mahkamah Agung oleh Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 4 Iwan Saputra dan lip Miptahul Paoz," ujar Nur Hidayat.

Namun, inti kelemahan permohonan sengketa Pilkada Tasikmalaya 2020 ini adalah soal teknis berupa batas perolehan suara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yakni 0,5 persen dari suara sah. Begitulah, maka akhirnya MK memutuskan permohonan Paslon Iwan-lip tak dapat diterima. Final dan mengikat. ●

Morowali Utara

PILKADA ULANG DI KAWASAN ANAK PERUSAHAAN ASTRA

MK memerintahkan pemungutan suara ulang di kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Agro Nusa Abadi. Selisih suara antarpaslon hanya 600-an suara. Jumlah pemilih di perkebunan sekitar 900-an. Pemenangnya sangat menentukan.

Pilkada Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menghadapi dua pasangan calon. Sebagai paslon nomor urut 1 Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan Djira K. menghadapi paslon nomor urut 2 Holiliana-H.Abudin Halilu (Handal).

Kisruh yang memicu perselisihan Pilkada ini terkait dengan putusan Pleno KPU Morowali Utara yang menetapkan Delis Julkarson Hehi-Djira mendapatkan 34.016 suara dan Holiliana-Abudin Halilu mendapatkan 33.396 suara. Hasil Pilkada yang memenangkan Paslon 1 berlanjut ke Mahkamah Konstitusi karena Paslon 2 mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada.

Alhasil, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Paslon Handal. Pengucapan putusan berlangsung dalam sidang pleno MK serangkaian dengan beberapa perselisihan pilkada lainnya pada Jumat, 19 Maret 2021.

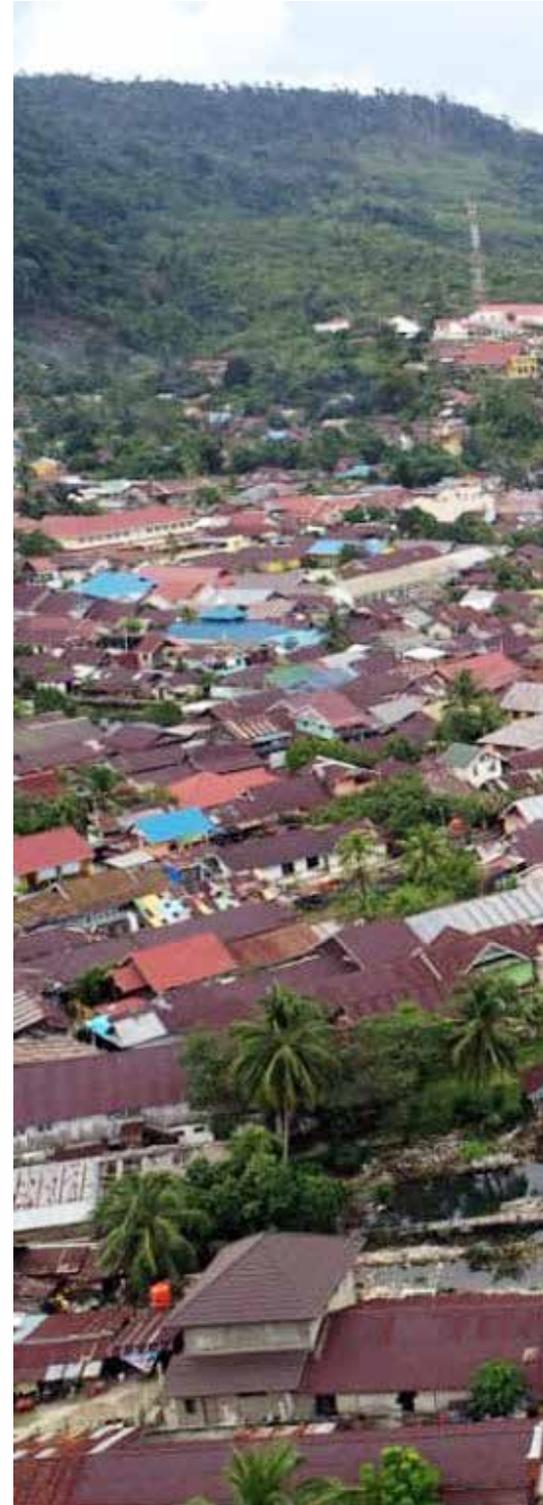
"Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara) untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA)

bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya 228 karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan.

PT ANA adalah anak perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. Perusahaan perkebunan sawit itu telah beroperasi belasan tahun di wilayah itu.

Sedangkan MK, dalam amar putusannya memerintahkan pula kepada KPU Morowali Utara menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dengan hasil yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.

Kemudian, KPU kabupaten ini juga harus menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020. Selanjutnya, mengukumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa melaporkan



hasilnya ke MK.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan, untuk menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS bagi karyawan PT ANA yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih. Namun, mengingat kondisi pandemi covid-19 dan jauhnya jarak TPS tempat memilih serta



untuk melindungi hak pilih pemilih, pemungutan suara dilakukan hanya bagi karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak pilihnya dengan menyediakan TPS khusus yang mudah diakses di kawasan PT ANA.

“Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT ANA hanya dapat diikuti oleh karyawan PT ANA yang belum menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember

2020. Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT ANA yang telah menggunakan hak pilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya,” sampai Hakim Konstitusi Manahan terhadap perkara permohonan perkara yang teregistrasi 104/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Morowali Utara.

Pada hari H Pilkada 2020 itu, saksi

Paslon Nomor Urut 02 Holiliana dan Abudin Halilu (Pemohon) menolak menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan. Alasannya, pada formulir C-1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara ditemukan ketidaksinkronan jumlah pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara. Setelah dilakukan pengecekan dengan membuka kotak suara, memang terdapat ketidaksesua-

• INFO PILKADA

ian antara jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan pada TPS 1 Desa Kolo Bawah.

Alwi Lahadji, salah satu saksi yang diajukan Paslon Handal, misalnya, menyatakan keberatan saat dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Pada TPS 01 Desa Menyo'e, ia menemukan banyak coretan pada formulir C-Hasil. Selain itu, ia juga menemukan jumlah data pemilih yang memilih tidak jelas.

Dalam sidang yang berlangsung pada 25 Februari 2021 lalu, Alwi yang merupakan Saksi di PPK Kecamatan

rekapitulasi lanjutan digelar pada 14 Desember 2020, terlihat PPK yang membawa bungkus plastik ungu berisikan dokumen. Dalam rapat tersebut, sambungnya, justru dokumen yang berada di luar dokumen yang ada pada kotak suara saat pleno pada 13 Desember 2020 itu dibahas untuk dijadikan dokumen yang akan disertakan dalam kotak suara untuk hasil akhir rapat.

"Atas hal ini saksi berkeberatan dokumen itu untuk dimasukkan dalam kotak suara sebagai bagian dari hasil perolehan suara. Namun dokumen

imbauan bagi karyawan yang memilih untuk wajib melakukan swab antigen sebelum memasuki kembali kawasan perusahaan.

"Ada kebijakan kalau sekembali dari memilih itu untuk swab antigen senilai Rp300.000 dan jika dinyatakan positif covid, maka wajib isolasi yang semua keperluannya ditanggung karyawan. Sebenarnya setiap pemilih bisa memilih, tapi pada akhirnya banyak yang tidak memilih karena jika memilih harus lakukan swab antigen yang pembiayaannya diambil dari dana pengobatan tahunan karyawan," ungkap Sabrin pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra dari Ruang Sidang Panel III MK.

Pada kesempatan yang sama, Pemohon juga menghadirkan Maruarar Siahaan sebagai Ahli untuk menanggapi dalil-dalil permohonan yang diajukan ke MK. Terkait kasus konkret yang ditemukan Pemohon atas kewajiban karyawan PT Ana untuk melakukan swab antigen usai melakukan pemilihan ke TPS, Maruarar berpendapat hal tersebut berarti telah mencegah mereka menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, dalam Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 dinyatakan negara harus menghormati dan melindungi hak asasi.

"Hak asasi di sini adalah hak pilih, yang menjadi tugas negara melalui penyelenggara pemilu. Bahwa hak pilih adalah hak asasi yang wajib difasilitasi oleh negara dan berkoordinasi dengan perusahaan agar tidak ada kondisi mengesampingkan hak konstitusional warga negara," jelas Maruarar dalam sidang yang diadikannya secara virtual.

Sedangkan Mohammad Masnan yang menjadi saksi pada tingkat kabupaten dari Paslon 01 mengungkapkan persebaran domisili karyawan PT Ana yang dikatakan tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Utara. Bahwa PT ANA yang berada di Kecamatan Petasia tersebut memiliki 916 karyawan, bukan 41.130 orang. Informasi tersebut didasarkan pada data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali Utara yang



Mamosalato dan Kabupaten Morowali Utara, mengungkapkan, banyak kejanggalan dalam perhitungan suara di kabupatennya. "Sehingga saat itu disepakati untuk memilih daftar pemilih dengan mencocokkannya dengan kebenaran yang hadir. Pada DPT-nya itu 364 pemilih, hasilnya Paslon 01 memperoleh 209 suara, Paslon 02 memperoleh 98 suara," ucap Alwi pada sidang perkara yang teregistrasi Nomor104/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Morowali Utara tersebut.

Selanjutnya, Alwi menceritakan bahwa DI TPS 01 Desa Menyo'e saat

dalam kantong plastik ungu itu tetap diisi oleh KPPS hingga selesainya pembacaan rekapitulasi," ungkap Alwi yang juga hadir dalam sidang pembuktian bersama dua saksi lainnya, yakni Sabrin dan Nuriati.

Sedangkan Sabrin yang merupakan Ketua Serikat Pekerja di PT ANA yang juga dihadirkan Pemohon membagikan kesaksiannya terkait karyawan yang tidak ikut pemilihan. Menurutnya, rata-rata karyawan pada perusahaan tersebut memiliki hak pilih pada TPS-TPS yang ada di kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 15 menit menggunakan motor. Namun, karena ada



mengungkapkan sejumlah 916 orang karyawan perusahaan tersebut tersebar sejumlah 16 orang di Kabupaten Morowali. “Sisanya 900 orang itu berdomsili di Kabupaten Morowali Utara. Itu pun tersebar pada 10 desa dan 4 kecamatan. Sedangkan dari 900 orang ini, penduduk asli yang punya hak pilih pun belum diketahui,” jelas Masnan.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 150 suara dari 4 TPS, yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara Nomor 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. Di samping itu, Pemohon juga menemukan adanya surat suara sah untuk pemilihan bupati yang berada pada kotak suara pemilihan gubernur di Desa Momo.

“Jika berpedoman pada selisih suara, maka terdapat selisih sejumlah 616 suara, di mana Pemohon mendapatkan 33.396. Sesuai Pasal 158 ayat (2), maka kami masih memenuhi ketentuan tersebut. Maka selanjutnya kami bacakan dalil-dalil pelanggaran yang terjadi, termasuk tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu oleh Termohon,” ungkap Harli, salah satu kuasa hukum paslon 2.

Berikutnya, Pemohon juga mengungkapkan ada KPPS yang tidak menyediakan daftar hadir. Untuk itu, Pemohon memohonkan pada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

Di persidangan lanjutan terbukti

tidak ada larangan tertulis bagi karyawan untuk mengikuti pencoblosan. Terdapat surat dari Grup PT Astra Agro Industri (bapak usaha PT ANA-red) yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilbup. Tapi terdapat imbauan tidak tertulis yaitu bagi karyawan yang datang mencoblos wajib ikut swab test dengan biaya ditanggung pemilih. Sehingga aturan tidak tertulis itu membebankan pemilih.

“Mahkamah berpendapat kebijakan tidak tertulis tersebut secara tidak langsung memengaruhi psikologi para pemilih dan berpengaruh pada banyaknya karyawan PT ANA yang memiliki hak pilih tidak menyalurkan hak pilihnya,” terang majelis.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan, menolak eksepsi dari pihak termohon. Anwar Usman mengabulkan sebagian permohonan Holiliana dan Abudin Halilu. Dengan demikian, hakim juga membatalkan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. “Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 De-

seMBER 2020,” kata Anwar Usman.

Kabupaten Morowali Utara dengan ibu kota Kolonodale berada tepat di sudut Sulawesi yang membentuk huruf K menghadap Laut Banda. Topografi wilayahnya mulai dari pesisir, dataran rendah, hingga bergunung-gunung yang merupakan bagian dari Pegunungan Pompangeo, Paa-Tokala, Peleru dan Pegunungan Rerende dengan ketinggian wilayah antara 0-2.500 meter di atas permukaan air laut (mdpl).

Wilayahnya termasuk beberapa pulau kecil di Teluk Towuri dan Teluk Tolo di Laut Banda seperti Pulau Pangia, Pulau Tokonanaka, Pulau Tokobae dan lain-lain. Gunung tertinggi di Kabupaten Morowali Utara adalah Gunung Pompangeo (2.590 mdpl) di Pegunungan Pompangeo. Sedangkan sungai terbesar dan terpanjang di kabupaten ini adalah Sungai La’a yang memiliki panjang sekira 96,30 Km.

Kabupaten dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ini mengandalkan ekonominya pada sektor pertanian termasuk perkebunan. Belakangan sektor tambang dan penggalian seperti nikel membuat kegiatan ekonomi setempat semakin semarak di samping tarik-menarik antara kepentingan tambang dan lahan pertanian serta perkebunan. ●





Pilkada Kalsel

BERLANJUT KE PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Seratus hari pasca Pilkada 2020, proses pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan berlanjut ke pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan. Hasilnya akan menentukan siapa pemenangnya.

Putusan pemungutan suara ulang (PSU) itu adalah hasil upaya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskannya melalui amar

(perintah) Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang bunyinya antara lain memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di beberapa kecamatan.

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Benua (Kabupaten Tapin)," ujar Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Jumat, 19 Maret

2021 petang.

Mahkamah dalam amar putusan juga memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (yang sebelumnya harus diganti) di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan penyelenggaraan tahapan, proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di seluruh TPS dari enam kecamatan di Kalsel dan 24 TPS di Kecamatan Binuang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur, adil (jurdil).

“Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara pemilih dan mengagakkan asas pemilihan yang luber dan jurdil, maka harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sejumlah kecamatan wilayah Kalimantan Selatan,” ucap Wakil Ketua Aswanto yang membacakan pendapat Mahkamah.

Sebelumnya, Mahkamah juga mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Kalsel sebesar 4.070.320 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dalam Pilka-

da Kalsel paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Pilkada Kalsel yang ditetapkan KPU. Mahkamah menyebutkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak 1,5% x 1.695.517 suara (total suara sah) yakni 25.432 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 843.695 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 851.822 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8.127 suara (851.822 suara dikurangi 843.695 suara) atau 0,48% yang jumlahnya tidak melebihi dari 25.432 suara atau tidak melebihi ketentuan ambang batas pengajuan

“Saat ini sebanyak 62 persen negara di dunia secara teratur mengadakan pemilu yang diklasifikasikan sebagai pemilu bebas dan adil dan kompetitif. Pemilihan yang bersih adalah instrumen untuk memastikan pemerintah, perwakilan dan kendali rakyat atas pengambilan keputusan bisa berjalan. Pemilu demokratis akan melahirkan pemerintah yang legitimasi. Pemerintah yang legitimasi akan melahirkan pemerintah yang efektif dan responsif,” ungkap Titi dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Titi juga menyatakan sejumlah parameter pemilu dinilai demokratis



permohonan sengketa hasil ke MK.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang juga membacakan pendapat Mahkamah.

Sebelumnya, dalam sidang pembuktian pada Senin, 22 Februari 2021, yang berlangsung jarak jauh memanfaatkan jaringan internet. Paslon Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Didi Friadi menghadirkan Direktur Eksekutif (kini menjadi pembina) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sebagai Ahli.

seperti disampaikan pakar Ramlan Surbakti. Di antaranya, ada kepastian hukum, persaingan antara pasangan calon yang berjalan relatif bebas dan adil. Parameter berikutnya, partisipasi masyarakat yang sangat menonjol. Di samping itu, penyelenggara pemilu secara umum telah melaksanakan tugasnya secara independen, profesional, transparan, akuntabel dan melayani pemilih.

Sedangkan dalil atau argumen paslon Denny-Difri mengemukakan di sidang berikutnya pada Selasa, 26 Januari 2021. Sejumlah dalil disampaikan Denny-Difri dalam persidangan yang digelar secara daring dan luring dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dalam rangka pencegahan pe-

• INFO PILKADA

nyebaran Covid-19.

Pasangan Denny-Difri berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai pemenang pilkada (Sahbirin-Muhidin).

"Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi masyarakat

ruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel yang ditemeli stiker citra diri berupa gambar dan nama "Paman Birin" ditambah tagline "Bergerak".

Selain itu berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL/02/6-BA.63/PROV/XII/2020, jumlah suara sah sebanyak 1.659.517 yang artinya 1,5 persen dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Sedangkan perolehan Pasangan Sahbirin-Muhidin seban-

1945 yaitu "luber" (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan "jurdil" (jujur dan adil). Oleh sebab itu menurut Pasangan Denny-Difri, seharusnya Pasangan Sahbirin-Muhidin dibatalkan dari pencalonannya.

Pasangan Denny-Difri mendalilkan, pada pelaksanaan Pilgub Kalsel terdapat kecurangan, ancaman, dan intimidasi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kecamatan Hatungun, kecurangan di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, serta kecurangan dan pelanggaran yang menyebabkan penambahan suara bagi Pasangan Sahbirin-Muhidin di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Sementara itu Denny Indrayana yang hadir secara daring menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara luring dalam persidangan. "Kami memohon maaf tidak bisa hadir secara langsung ke MK karena berbarengan dengan tanggap darurat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Kami memutuskan untuk hadir secara online," kata Denny.

Denny melanjutkan, sepanjang pemahamannya, sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan terkait perbaikan salah ketik dan sebagainya maupun perbaikan nonsubstansial. Dengan pemahaman itu, pihaknya memutuskan untuk tetap berada di Kalimantan Selatan. "Sebenarnya kesempatan kami untuk menyampaikan permohonan pada sidang selanjutnya. Kami ingin menyampaikan pokok permohonan pada sidang selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para pemilih di Kalimantan Selatan," ungkap Denny kepada Majelis Hakim.

Ketua Panel Aswanto menyatakan yang diutarakan Denny tersebut sudah diatur oleh Peraturan MK dalam perkara PHP Kada. "Di Peraturan MK sudah jelas disebutkan kesempatan kepada Pemohon untuk menjelaskan pokok permohonan. Soal perbaikan, Peraturan menyebutkan hanya satu kali perbaikan. Kalaupun ada perbaikan-perbaikan di ruang sidang, itu yang hanya sifatnya minor. Itu sudah clear di norma kita," ujar Wakil Ketua MK Aswanto selaku Ketua Panel.



dalam pemilu yang sedang menurun. Selain itu, ada bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon Nomor Urut 1," kata kuasa Pemohon, TM Luthfi Yazid didampingi kuasa Pemohon lainnya Muhammad Razvi Barokah.

Pasangan Denny-Difri melalui kuasa hukumnya juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, seperti bantuan tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di selu-

yak 851.822 suara dan perolehan suara Pasangan Denny-Difri sebanyak 843.695 sehingga selisih keduanya adalah 8.127 (0,4 persen).

"Oleh sebab itu, Pemohon berpendapat selisih suara antara paslon nomor urut 1 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan sebagaimana dalam UU Pilkada," jelas Luthfi Yazid.

Lebih lanjut Pemohon menyatakan, dalam pelaksanaan Pilgub Kalsel terdapat beberapa hal yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD

Selanjutnya, giliran KPU Kalsel mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pasangan Denny-Difri dalam sidang yang berlangsung pada Senin, 1 Februari 2020. KPU Provinsi Kalsel sebagai Termohon tentu saja membantah dalil permohonan Pasangan Denny-Difri.

"Pemohon tidak menjelaskan alasan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon," kata kuasa hukum KPU Provinsi Kalsel, Ali Nurdin kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeckh.

Dengan demikian menurut Termo-

hasil pengawasan petugas-petugas KPPS di sejumlah TPS di Kecamatan Binuang. Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran dan kecurangan yang melanggar asas "jurdil" dan "luber" oleh Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin selaku petahana seperti ditudingkan Pemohon. "Selanjutnya terhadap dalil Pemohon soal pencoblosan surat suara, namun di DPT pemilihnya sudah meninggal di Kabupaten Tapin, Bawaslu juga menolak tuduhan tersebut," kata Erna.

Erna mengungkapkan, Bawaslu Kabupaten Tapin juga sudah melakukan rekomendasi dugaan pelanggaran etik kepada KPPS dan KPU Kabupaten Tapin. Sedangkan untuk dugaan pidananya diteruskan ke Sentra Ga-

nye," jelas Erna yang juga menyampaikan, berdasarkan pengawasan Bawaslu tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan petahana yang diduga melakukan penggelembungan suara, pengrusakan surat suara, dan politik uang saat pilkada.

Di sisi lain, Paslon Sahbirin-Muhidin selaku Pihak Terkait, melalui tim kuasanya menegaskan bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan permohonan yang dibacakan Pemohon dalam persidangan. Selain itu, Pihak Terkait menampik semua dalil yang disampaikan Pemohon pada sidang pendahuluan karena tidak ada faktanya.

Dari bantahan soal persoalan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa



hon, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020. Selain permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Termohon, petitum Pemohon dengan tiga juga tidak jelas. Ketidakjelasan petitum Pemohon akibat ketidakjelasan posita yang dibangun Pemohon.

"Apakah Pemohon menuntut pemungutan suara ulang di sejumlah TPS atau di seluruh TPS yang dipermasalahkan," ujar Ali yang juga menampik tudingan Pemohon soal penggelembungan suara, adanya intimidasi, ancaman yang dilakukan oleh Pihak Terkait selama pilkada.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Erna Kasypiah menyampaikan

kumdu. Selain itu, Erna menanggapi dugaan Paslon Sahbirin Noor dan Muhidin (petahana) dalam kampanye menyalahgunakan bantuan sosial penanganan Covid-19 dan sembako. Erna menegaskan, Bawaslu Kalsel tidak pernah menemukan pelanggaran penyalahgunaan bansos Covid-19 dan sembako saat kampanye.

"Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial penanganan Covid-19 dan sembako untuk kampanye petahana. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah menemukan pelanggaran yang dilakukan petahana terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial penanganan Covid-19 dan sembako saat kampa-

TPS di tengah partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Kemudian bantahan tentang tuduhan kecurangan KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara paslon nomor urut 1, hingga bantahan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor seperti tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel yang ditemeli stiker citra diri berupa gambar dan nama "Paman Birin" ditambah tagline "Bergerak".

Namun, MK sudah menyampaikan putusan dan amarnya. Kita tunggu bersama hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kalsel hingga jelas siapa pemenangnya. ●



Askolani SE, MA

KHATAM DI ALOKASI ANGGARAN, KINI MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN NEGARA

Lebih dari tujuh tahun menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013-2021), Askolani SE, MA kini beralih tugas menjadi Dirjen Bea dan Cukai. Jabatan barunya ini lebih mengejar pendapatan. Namun, pengalaman meniti karir dari bawah menjadi kelebihan yang sulit bandingannya.

Sejak masa kecil dan remaja, garis tangannya memang mengurus anggaran. Hidup bersama kakak-beradik di Palembang, Sumatera Selatan, orang tuanya yang berdinasi di TNI kerap harus meninggalkan anak-anak di kota pempek itu.

Boleh jadi karena latar belakang itu pula Askolani muda yang lahir pada 11 Juni 1966 memilih program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Sriwijaya

Palembang dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1990. Pendidikan lanjutan sebagai staf kementerian membawanya ke Amerika Serikat untuk meraih gelar Master of Arts Economics and Banking di Universitas Colorado pada 1999.

Ia memulai karirnya di Kementerian Keuangan di Badan Analisa Keuangan dan Moneter (1992-2001) sebagai Pelaksana, Kepala Urusan Penerimaan Minyak Bumi, Kepala Subbagian penerimaan Migas, dan Kepala Subbagian Penerimaan Pembangunan. Pada 12 April 2001 Askolani melanjutkan karir di Badan Analisa Fiskal (2001-2004) menjabat sebagai Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Hutang kemudian sebagai Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin, masih bergeser posisi di level kepala sub bidang.

Jabatannya naik lagi pada, 2004 ketika mulai beralih ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (2004-2006) dan menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara (2006-2008).

Pada 2008 menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan pada 31 Desember 2008 diangkat menjadi Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mulai 21 Juni 2011, ia naik ke jabatan eselon II sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran.

Belum tiga tahun sebagai direktur, ia meraih jabatan eselon I pada 27 November 2013 sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Hampir delapan tahun menjadi Dirjen Anggaran, pada 12 Maret 2021 Askolani beralih tugas lagi menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Askolani bersama 24 pejabat lainnya yang terdiri dari 18 Pejabat Tinggi Madya, 2 Pejabat Tinggi Pratama, dan lima Direksi pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) bertempat di Aula Mezzanine Gedung

Djuanda I Kemenkeu pada Jumat, 12 Maret 2021.

Dalam sambutannya pada acara pelantikan tersebut, Menkeu mengharapkan para pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten, untuk menjaga dan melaksanakan etika jabatan dan untuk terus menjalankan tugas selurus-selurusnya dengan integritas yang tinggi.

"Ini adalah satu momen yang sangat penting bagi kita untuk bersama-sama meresapi tanggung jawab yang kita emban di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Sebuah institusi bendahara negara yang memiliki peran luar biasa penting," jelasnya.

Menkeu juga menyampaikan terima



kasih kepada seluruh pejabat yang dilantik atas dedikasi dan kontribusi serta keseluruhan bakti mereka kepada negara melalui jabatan di Kemenkeu selama ini. Di dalam tantangan ke depan, seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu untuk bersama-sama menjaga dan mempromosikan kebijakan fiskal secara koheren, bekerja secara sinergis antar unit Eselon 1 dan antar pejabat.

"Di lingkungan Kementerian Keuangan, teamwork adalah penting sekali. Tidak ada tempat bagi ego individual dan ego unit. Di lingkungan Kementerian Keuangan bekerja bersama adalah suatu keharusan, karena dalam menghadapi tantangan global termasuk pandemi, climate change, transformasi digital maupun tantangan

pemulihan ekonomi di dalam melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian untuk bangkit kembali tidak mungkin dilakukan secara sylo dan sendiri-sendiri," tegasnya

Menkeu juga kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian untuk bekerja tidak hanya dengan pikiran, namun juga bekerja dengan hati dan kepedulian serta etika. Bekerja tidak hanya mengikuti aturan perundang-undangan, namun bekerja dengan tetap fokus apakah yang kita hasilkan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan tetap menjaga rambu-rambu kepastian serta etika publik.

"Kementerian Keuangan akan terus dan saya minta seluruh pejabat untuk mengukir prestasi dengan inovasi dengan leadership dengan pengalaman

dan dengan komitmen. Saya yakin Kementerian Keuangan akan terus menjadi institusi bendahara negara yang bisa menjaga masyarakat Indonesia, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga perekonomian Indonesia dan sekaligus menjaga martabat bangsa kita," tandas Menteri Ani.

Nah, untuk Askolani sendiri, soal anggaran tentu sudah khatam. Sejak kecil oleh orangtuanya ia telah dipercaya untuk mengatur anggaran keluarga. Terbiasa hidup berjauhan dari orang tuanya yang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI yang kini menjadi TNI), Askolani sering kali ditinggal bertugas di luar daerah dalam waktu lama.

Karena tugas, ayah-bunda Askola-

• INFO PROFIL

ni, pasangan A. Arsyad dan Syariah terpaksa kerap meninggalkan anak-anaknya berpindah mengikuti perintah tugas. Ini membuat Askolani dan keempat saudara kandungnya terbiasa hidup mandiri sejak kecil. Kedisiplinan dan kemandirian itulah yang membentuknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Sejak remaja, Askolani dan kakak-kakaknya, Iskandar, Andi Rivai, Ahmad Sanusi, Hemalia Herlina, diasuh oleh sang Kakek Hasanudin dan neneknya Hasanah di rumah mereka yang berlokasi di Jalan Balayudha, Kota Palembang. Selain mendapatkan pendidikan formal, Askolani juga bersyukur karena diasuh dalam lingkungan keluarga

lebih ketiga kakak laki-lakinya sudah hijrah ke Bandung untuk kuliah. Sedangkan Askolani dan kakak perempuannya tetap melanjutkan pendidikan di kota tepian Sungai Musi itu.

"Saya sudah lupa gaji bapak berapa. Tapi semua kebutuhan saya rinci. Bayar listrik, kuliah, jajan. Dan itu bukan untuk keperluan saya saja. Ada kakek, nenek, serta kakak di rumah," ujarnya.

Layaknya Kementerian/Lembaga mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), anggaran yang telah disunnya pun harus diserahkan terlebih dahulu kepada orangtuanya. Kemudian, ayahnya, baru mengirim sebagian gaji kepada seorang tetangga dekat rumah yang telah dipercaya sang ayah. "Kami

bang. "Ketika orang tua kami pulang akan dicek. Kalau ada utang, akan diganti," tambah suami dari Sri Hartini ini.

Pembelajaran mengatur keuangan keluarganya, agaknya lama-lama tumbuh menjadi gairah di jiwa Askolani. Karena itu, ketika memasuki masa kuliah, ia memilih mengambil jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) di Universitas Sriwijaya.

Mata kuliahnya tak lepas dari menelaah kebijakan makro dan mikro ekonomi, termasuk, belajar menyusun APBN. Kecintaannya pada ilmu ekonomi kian bertambah ketika para dosennya pun selalu memberinya semangat agar giat belajar.

"Walaupun jurusan ini tidak saya rencanakan, tidak ada beban. Saya happy berpikir dari visi makro," ungkap pria yang mengidolakan sosok Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Djohadikusumo ini.

Lulus dari Unsri, ia melamar kerja di sebuah bank, sekaligus di Kemenkeu. Agaknya sudah garis tangan ia berkarir sebagai birokrat di Kementerian Keuangan. Maka pada 1991 ia mulai menjadi pegawai di Kemenkeu. Karier Askolani di mulai sebagai pelaksana Badan Analisa Keuangan dan Moneter.

"Apa yang saya dapatkan dari kuliah tentang analisis keuangan Indonesia, implementatif di Kemenkeu. Alhamdulillah, itu saya sukuri," ungkap Askolani.

Rasa syukur kembali berulang, ketika pada tahun 1999 ia berkesempatan mendapatkan beasiswa Magister ke luar negeri. Agar linier dengan bidang studi yang geluti, Askolani memilih jurusan Arts Economics and Banking di Universitas Colorado.

Setelah pulang ke Tanah Air, pada 12 April 2001 ia dimutasi ke Badan Analisa Fiskal. Kala itu, Askolani menjabat sebagai Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Utang kemudian sebagai Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin.

Ia semakin merasa ilmunya sangat berguna untuk negara sehingga membuatnya bekerja tanpa beban. Apalagi, bidang yang digelutinya membuatnya selalu dengan ilmu dan tantangan baru.

"Ada tugas untuk menyusun APBN makro, harus bersinggungan dengan



yang religius. Sejak kecil ia sudah digembleng pendidikan karakter melalui nilai-nilai agama yang menjadi fondasi kehidupannya hingga kini. Selain mengajari beribadah dan mengaji, kakek neneknya juga memberinya keteladanan dalam menjalankan ibadah.

"Kakek nenek saya usianya saat itu 80 tahunan. Beliau rajin salat dan mengaji. Alhamdulillah, saya mendapatkan contoh yang bagus," ungkap Dirjen Bea dan Cukai ini mengenang.

Lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), ia mulai mendapat tugas dari kedua orang tuanya untuk mengatur gaji sang ayah dalam memenuhi keperluan rumah tangga di Palembang. Ter-

memanggilnya Bude Suhud," kata Askolani menyebut nama tetangga kepercayaan sang ayah tersebut.

Untuk melatih kejujuran dan efisiensi, Askolani hanya dapat mencairkan uang per hari. Jika anggaran defisit, ia boleh meminjam pada Bude Suhud. Sebaliknya, kalau surplus, Askolani juga wajib menabung di tempat tetangga yang sudah dianggapnya sebagai orangtua keduanya itu. "Jadi, manajemennya, kami spending-nya, Bude itu ibarat banknya, hahahaha," ujarnya membandingkan pengaturan anggaran keluarga dan negara.

Sedangkan audit dilakukan ketika kedua orang tuanya pulang ke Palembang.

mikro. Merencanakan ke Kementerian/Lembaga (K/L). Wawasan kita semakin luas," paparnya.

Pada 2004, Askolani masuk ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Lalu menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara hingga tahun 2008. Pada tahun yang sama, ia dilantik sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal dan menjadi Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tiga tahun berikutnya, Juni 2013, Askolani dipercaya sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran. Hanya selang beberapa bulan, tepatnya 27 November 2013, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan hingga saat ini.

Dalam menyusun anggaran, Askolani menyebut, pemerintah selalu mengutamakan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Ia menyebut salah satunya, program Keluarga Harapan (PKA) yang setiap tahun ditingkatkan besaran anggarannya lantaran dinilai dapat menekan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Kemudian, ia juga mendorong efektivitas program Beras Untuk rakyat (Rastra), sebanyak 15 kg per keluarga. Caranya dengan mengubah sistem dan manajemennya. Jika awalnya penerima subsidi langsung menerima beras, kini diubah menggunakan voucher. Alasannya, sistem yang lama kurang tepat sasaran karena mereka yang mendapat jatah belum tentu yang layak menerima subsidi. Dengan sistem voucher, program itu dinilai lebih tepat sasaran karena penyaluran subsidi berdasarkan data kemiskinan.

Askolani juga mendorong penggunaan APBN berbasis kinerja agar anggaran yang digunakan lebih optimal, bukan sekadar terserap tanpa bekas. Selain itu, evaluasi terhadap pengguna anggaran pun diperketat agar benar-benar digunakan dengan semestinya. "Kami punya sistem check and balance-nya. Bappenas mengecek konsistensinya, Kemenkeu melihat efisiensi anggarannya," ungkapinya.

Di bawah kepemimpinannya, Askolani juga dikenal sebagai pejabat yang bersih. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepadanya pada Peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2015. Askolani, mendapat peringkat kedua pegawai negeri/penyelenggara negara dengan nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara tahun 2015 yakni senilai

meminta saran kepada para stafnya jika ada hal yang belum dimengertinya.

Kini tantangan baru berada di hadapannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi yang lebih terfokus untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Sebagaimana tujuannya: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan,



SGD 100.000.

Setelah 26 tahun bekerja di Kemenkeu, Askolani mengaku selalu melewatinya dengan sukacita, tanpa rasa jenuh. Semua masalah dijadikan tantangan. "Saya tidak pernah jenuh, sampai hari ini. Masih banyak tantangan harus diperbaiki. Kalau masalah itu kita jadikan tantangan maka kerja tidak akan jenuh." ujarnya.

Di lingkungan kerjanya, Askolani juga menerapkan sinergi dengan para sejawatnya. Ia bahkan, tak sungkan

penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika diibaratkan mengarungi sungai, boleh dibilang Askolani kini menghulu. Sebagai Dirjen Anggaran ia berurusan dengan pengalokasian. Kini ia lebih ke optimalisasi sumber anggaran. Selamat bertugas Pak Askolani, semoga lebih sukses dari tugas-tugas sebelumnya. •



LELANG INVESTASI HARTA KARUN DEMI CIPTA KERJA

Salah satu turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka pintu investasi pengangkatan harta karun muatan kapal tenggelam. Investasi asing lebih berpeluang.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah kembali membuka kesempatan investor termasuk asing untuk mencari harta karun bawah laut yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di laut Indonesia. Bila berhasil, maka akan ada bagi hasil dengan pemerintah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan lewat UU Cipta Kerja ada 14 bidang usaha telah dibuka, salah satunya adalah pengangkatan berharga muatan kapal tenggelam. Namun, apabila ada investor yang tertarik untuk mencari harta karun di bawah laut harus memenuhi beberapa syarat ketat dari BKPM.

"Jadi, kalau mau cari harta karun di laut bisa kau (investor) turun. Syarat izinya datang ke kita (BKPM), untuk bisa dapatkan izin," jelas Bahlil dalam konferensi pers, Selasa, 2 Maret 2021.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP-BMKTI) menyambut baik keputusan ini. Lantas, seberapa besar sebenarnya kekayaan laut Indonesia hingga membuat minat swasta untuk mencari harta karun di dalam laut besar?

Sebagai gambaran sederhana, Indonesia adalah wilayah perdagangan pada zaman Hindia Belanda. Dengan garis pantai mencapai 95.181 Km membuat Indonesia sebagai jalur perdagangan. Banyak kapal dari negara

luar masuk ke Indonesia, mulai dari Timur Tengah, China hingga Eropa.

Diperkirakan ada sekitar 30 ribu kapal Cina yang melakukan pelayaran ke Nusantara tidak pernah kembali ke pelabuhan asalnya. Kapal-kapal itu diperkirakan karam di lautan Indonesia. Sementara riset UNESCO menyebut, terdapat 20 ribu kapal pernah berlayar ke Selat Malaka juga tidak pernah kembali.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat mencatat bahwa ada 134 lokasi kapal tenggelam di Pelabuhan Ratu Jawa Barat dan 37 lokasi di Selat Malaka. Angka ini hanya sebagian kecil saja.

Sedangkan catatan APPP BMKTI menyebutkan setidaknya terdapat 464 titik harta karun bawah laut Indonesia. Lokasi harta karun bawah laut itu meliputi Selat Bangka (tujuh lokasi), Belitung (sembilan lokasi), Selat Gaspar, Sumatera Selatan (lima lokasi), Selat Karimata (tiga lokasi), dan perairan Riau (17 lokasi). Tak cuma itu, APPP BMKTI juga mencatat data kapal



tenggelam di Selat Malaka (37 lokasi), Kepulauan Seribu (18 lokasi), perairan Jawa Tengah (sembilan lokasi), Karimun Jawa (14 lokasi), dan Selat Madura (lima lokasi). Potensi harta karun juga diperkirakan berada di NTB dan NTT (delapan lokasi), Pelabuhan Ratu (134 lokasi), Selat Makassar (delapan lokasi), perairan Cilacap (51 lokasi), perairan Arafuru (57 lokasi), dan perairan Ambon (13 lokasi). Sisanya, di Maluku Utara berada di perairan Halmahera (16 lokasi), perairan Morotai (tujuh lokasi), kemudian Teluk Tomini, Sulawesi Utara (tiga lokasi), Papua (32 lokasi), dan Kepulauan Enggano, Bengkulu (11 lokasi).

Sekretaris Jenderal APPP BMKTI, Harry Satrio mengatakan, saat ini terdapat tujuh perusahaan lokal yang beroperasi. Ia menyebut perusahaan lokal siap untuk diberdayakan dibandingkan mengizinkan investor asing mengeruk kekayaan laut Indonesia. Menurut Harry, pihaknya sebagai pelaku usaha kini seolah menjadi korban dari pertarungan dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aturan soal riset pengawasan dan pemanfaatan BMKT memang berada di dua kementerian tersebut. Ia mendesak pemerintah

melibatkan asosiasinya untuk beleid baru ini. "Mbok ya kami ini diajak ngobrol. Karena kami kan yang di lapangan," kata Harry.

Harry menegaskan ia amat setuju artefak BMKT tidak keluar dari Indonesia. Pengusaha, katanya, masih bisa mendapat laba dari berbagai usaha lain, selain melelang atau menjual temuan ke orang asing. "Banyak pemanfaatan yang bisa kami lakukan," kata dia.

Nah, meski APPP-BMKTI menyambut baik keputusan ini, ada hal yang masih menjadi pertanyaan sebelum aktivitas pengangkatan harta karun bawah laut yang nilainya ditaksir US\$ 12,7 miliar atau sekitar Rp 170 triliun lebih itu. "Artinya lama berjalan lagi sebagaimana biasanya. Dari sisi pengusaha kami berterima kasih, ada

dampaknya. Namun (kami) masih menyimpan satu pertanyaan gimana izin ekspor (hasil pengangkatan harta karun kapal kuno) setelah melalui tahapan-tahapannya," kata Sekretaris Jenderal APPP-BMKTI Harry Satrio, awal Maret 2021.

Poin itu masih menjadi pertanyaan karena dalam peraturan sebelumnya, Harry menyebut perusahaan yang berhasil mengangkat harta karun dari dasar laut dilarang untuk menjualnya ke luar negeri. Padahal, minat terbesar



Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

• INFO EKONOMI

barang antik seperti itu dari luar negeri, misalnya museum-museum lampau. Apalagi kondisi ekonomi dalam negeri juga sedang sulit.

"Boleh nggak kita menjual ke luar negeri, karena selama ini dihambat nggak boleh dijual ke luar, katanya itu kan budaya kita, terus piye? Sementara biaya untuk penangkapan nggak murah, mahal. Mana ada bank yang mau mendanai? Artinya investor dari luar kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal, dia berpikir kalau nggak bisa dibawa keluar untuk apa modalin kita," sebutnya.

Dengan waktu pengerjaan lebih dari dua tahun, ia menuturkan modal pengangkatan BMKT mencapai rentang US\$5 juta -US\$10 juta, setara

di perairan antara Pulau Mapur dan Merapas, dekat Tanjung Pinang, di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Total nilai harta karun yang berhasil diangkat kurang lebih US\$ 15 juta. Namun, Pemerintah Indonesia dikabarkan tidak menerima sepeser pun dari harta karun yang kurang lebih 2,5 abad berada di laut Indonesia itu.

Padahal, kata dia, seharusnya setelah diangkat ke darat pemerintah mengambil 10 persen dari harta karun itu untuk cagar budaya.

mengizinkan lelang harta karun yang sudah berada di darat.

Imbasnya, ada lima perusahaan yang merugi akibat kebijakan tersebut, termasuk milik Harry. Soalnya, mereka sudah mengeluarkan dana besar untuk mengangkat harta karun tersebut namun dilarang melelang.

Tanpa perusahaan asing pun, kata dia, perusahaan pengangkatan BMKT masih terilit masalah hukum. Ia mengatakan kini ada lima perusahaan yang jadi korban hasil pengangkatan 'harta karun' yang belum juga ada penyelesaiannya dari pemerintah.

Ia lantas meminta pemerintah memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak. "Karena perdagangan BMKT ini sangat menggiurkan secara komersial," katanya.

Boleh jadi dari berbagai pengalaman itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakinkan permohonan khusus kepada Presiden Joko Widodo ihwal izin pengangkatan harta karun yang istilahnya benda muatan kapal tenggelam (BMKT) ini. Ia menyarankan agar pemerintah sendiri yang mengangkat harta karun di dasar lautan.

Pemintaan yang sama Susi sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Sakti Wahyu Trenggono. Memang Susi yang saat menjadi menteri memorandum pengangkatan BMKT pada September 2014.

"Pak Presiden @jokowi & Pak MenKP ? @saktitrenggono @kkpgoid, mohon dg segala kerendahan hati utk BMKT dikelola & diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda-benda bersejarah yang seharusnya jadi milik bangsa," kata Susi di akun Twitter-nya @susipudjiastuti, Rabu, 3 Maret 2021.

Kalau perlu investor asing, berarti teu aya acisna (tak ada uangnya) Bu. Tapi, persoalannya dengan investor asing maupun lokal nonpemerintah adalah soal untung-ruginya. Juga cipta kerjanya. ●



eks menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti

Rp71,53 miliar-Rp143 miliar (mengacu kurs Rp14.307 per dolar AS). Belum lagi, tidak ada bank yang mau mendanai kegiatan tersebut lantaran penuh ketidakpastian.

"Dengan US\$10 juta siapa yang mau mengeluarkan uang segitu? Untuk bisnis yang belum pasti, bank juga tidak mau danai, akhirnya kami pakai dana asing," jelasnya.

Ia mencontohkan kasus pengangkatan harta karun oleh warga Australia berkebangsaan Inggris, Michael Hatcher. Pada 1985, ia berhasil mengeruk harta karun dari De Geldermalsen, sebuah kapal dagang milik VOC Belanda

Kemudian, sisanya baru dibagi pemanfaatannya antara perusahaan dan pemerintah.

Belum lagi jika ternyata harta karun di perairan Indonesia justru menjadi koleksi museum negara asing. "Di Singapura ada pameran Tang Cargo yang isinya temuan dari perairan Indonesia. Itu setiap hari dilihat turis di sana, padahal itu barang dari Indonesia," kata Harry.

Dalam perjalanan selanjutnya, pemerintah memilih kebijakan moratorium pengangkatan harta karun bawah laut sejak kepemimpinan eks menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Bahkan, pemerintah tidak

KISAH HARTA KARUN BELITUNG DAN CIREBON

Tang Cargo yang disebut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pengangkutan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia Harry Satrio sebagai harta karun asal Indonesia yang dipamerkan di Singapura adalah temuan kapal tenggelam di perairan Air Hitam, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Temuan besar di Belitung ini ada dua: Pertama, koleksi tunggal artefak Dinasti Tang terbesar yang ditemukan di satu lokasi di luar China, yang disebut "Harta Karun Tang". Kedua, dhow (perahu) arab, yang memberikan wawasan baru tentang jalur perdagangan antara Cina dan Timur Tengah selama periode tersebut.

Harta karun tersebut telah menjadi satu koleksi dan, selama penggalian, upaya untuk menjaga keutuhan situs dan muatannya telah menghasilkan bukti arkeologi yang terperinci. Bukti ini telah memberikan wawasan baru tentang metode konstruksi yang digunakan dalam pembuatan kapal, dan item serta gaya artefak telah mengungkapkan fakta yang sebelumnya tidak diketahui tentang perdagangan antara kedua area tersebut.

Bangkai dhow, yang ciri-cirinya masih ditemukan di Oman hingga sekarang, ditemukan oleh nelayan pada 1998 di Selat Gelasa di kedalaman 17 meter. Lokasi temuan yang berjarak sekitar kemudian dibebaskan dengan ganti rugi untuk nelayan setempat. Sedangkan izin untuk mengangkat kapal diberikan kepada perusahaan lokal Indonesia. Pengangkatannya kemudian dibiayai dan dilaksanakan oleh Tilman Walterfang dan timnya di Seabed Explorations yang bermitra dengan perusahaan lokal tadi.

Atas permintaan Pemerintah Indonesia, Angkatan Laut menjadi pengawal keamanan resmi dalam pengangkatan harta karun ini. Namun, kontroversi muncul setelah temuan kapal itu mulai dipamerkan pada 2011.

Toh kontroversi itu tak menghalangi pameran benda-benda yang tenggelam sekitar 830 masehi atau abad

IX lalu itu. Kini koleksi dhow Arab yang mengangkut harta karun masa dinasti Tang dan tenggelam di Belitung menjadi koleksi museum di Singapura. Harta karunnya di Museum Peradaban Asia, dan replika dhow arab dipamerkan di Museum Peninggalan Maritim di kawasan Sentosa, Singapura. Harta karun Belitung itu memang dibeli oleh perusahaan swasta dan pemerintah Singapura senilai 32 juta dolar AS setelah berhasil diangkat oleh perusahaan Seabed Explorations dari duet Tilman Walterfang dan Matthias Dräger dari

merupakan kerja sama PT Paradigma Putra Sejahtera dan Cosmix Underwater Research asal Swiss.

Kapal dengan panjang sekitar 30 meter yang tenggelam sekitar 970 atau akhir Abad X itu memiliki ciri-ciri peninggalan Sriwijaya dari jenis batu mulia dan sisa-sisa logam timah yang menjadi muatannya. Sedangkan ciri-ciri galangan kapalnya membentuk garis lurus antara Selat Bangka dan Semarang, Jawa Tengah. Pola penyimpanan muatan kapal ini menunjukkan sebagian besar periuk dan kargo



Jerman dan mitra lokalnya PT Sulung Segarajaya.

Harta karun Belitung ini sangat boleh jadi terkait dengan temuan bangkai kapal di leas pantai Laut Jawa sekitar 60 km dari daratan Kota Cirebon, Jawa Barat. Bangkai kapal buatan akhir abad ke-9 hingga ke-10 ini ditemukan pada 2003. Isinya sejumlah besar barang Yue Cina, dan terkenal sebagai bukti arkeologi kelautan penting dari aktivitas perdagangan Jalur Sutra Maritim di Maritim Asia Tenggara.

Berbeda dengan harta karun Belitung, temuan di Cirebon ini nyaris tanpa kontroversi. Terlebih hasil temuan harta karun ini menerapkan bagi hasil paron (separuh perusahaan pengangkat harta karun, separuh lagi pemerintah Indonesia). Pengangkatannya

keramik berasal dari pelabuhan di Tiongkok Selatan, kemungkinan besar Guangzhou, kemudian singgah di Satingpra, Tanah genting Kra, Thailand sekarang, untuk mengangkut tempayan dan kendi.

Artefak yang berhasil diselamatkan mulai dilelang pada 2006. Perusahaan pengangkut membagi penjualan 50-50 persen dengan pemerintah Indonesia. Mengingat pentingnya temuan ini untuk studi ekonomi dan sejarah perdagangan, juga arkeologi kelautan, para ahli, sejarawan, dan arkeolog mendesak pemerintah Indonesia menjaga dan melestarikan sebagian besar isi bangkai kapal secara utuh. Pemerintah memutuskan mengoleksi 10 persen dari 76 ribu artefak utuh sebagai koleksi museum Indonesia. ●



BABAK BARU LISTRIK ENERGI PANAS BUMI

Pengelolaan energi panas bumi memasuki babak baru. Orientasi profit melalui efisiensi menjadi pertimbangan untuk pembentukan holding BUMN geothermal.

Komunitas bisnis elektrifikasi atau pemasok energi listrik mafhum benar potensi energi panas bumi (geothermal) di Indonesia yang kaya gunung berapi memang besar. Namun, persoalannya adalah harga produk akhir yang kalah murah dari sumber lain terutama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Namun, listrik geothermal produksi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) masih lumayan murah dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar minyak semisal solar, apalagi harus impor. Nah, karena masih ada nilai lebihnya, PLTP perlu membuat terobosan berupa efisiensi agar tetap menarik untuk bisnis elektrifikasi.

Soal ini tampaknya sudah menjadi pertimbangan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tersiar kabar, meski masih sayup-sa-

yup, Kementerian BUMN tengah membentuk holding bisnis geothermal ini.

Setidaknya, PT PLN (Persero) dan Pertamina terlibat dalam pembentukan holding itu. Direktur Mega Proyek PLN M Ikhsan Assaad, misalnya, mengakui pembahasan soal holding ini masih terus berlangsung.

"PLN dan Pertamina memang sedang mempersiapkan pembentukan holding geothermal. Masih dalam pembahasan," kata Ikhsan, akhir Februari 2021.

Saat ini, sambungnya, sinergi antara kedua anak usaha perusahaan energi pelat merah itu sudah dalam tahap rintisan. Ikhsan bilang, anak usaha PLN, yakni PLN Gas & Geothermal (PLN GG) bersama anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) tengah menggelar joint study (kajian bersama) untuk pengembangan panas bumi di Lahendong dan Ulu

Belu.

PLTP Lahendong memulai rintisan-nya pasca krisis moneter 1997 dan memasok listrik sejak 2001. Lokasinya di Tomohon, Sulawesi Utara, sekitar 30 km ke arah selatan dari Manado, ibu kota provinsi itu.

Sedangkan PLTP Ulu Belu mulai memasok listrik pada 2011 berada di Tanggamus, Lampung, sekitar 120 km ke arah barat dari Bandar Lampung, ibu kota provinsi itu.

Kini PLTP Lahendong sudah sampai pada tahap pengembangan Unit 6 dan 7 setelah Unit 1-5 beroperasi. Sedangkan PLTP Ulu Belu sudah beroperasi Unit 1-4.

Direktur Operasi PLN GG Yudistian Yunis menjelaskan, pembahasan terkait holding dilakukan oleh Kementerian BUMN, dengan melibatkan PLN, Pertamina dan Geo Dipa. Sebagai anak usaha PLN di bidang panas bumi, sambung Yudis, PLN GG siap mendukung hasil pembahasan dalam pembentukan holding tersebut. "Saat ini sedang membahas opsi mekanisme penggabungan usaha panas bumi yang ada," kata Yudis.

Menurut dia hal ini penting untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi yang melimpah di Indonesia. Pasalnya, baru sekitar delapan persen energi panas bumi yang dimanfaatkan untuk tenaga listrik, dari total potensi yang teridentifikasi.

Sedangkan Ikhsan mengakui, hingga akhir 2020 pembangkit batu bara masih mendominasi sistem kelistrikan saat ini. "Dari tahun 2000-2019 memang pertambahan fosil 6,6 persen. (Namun) di 2020-2029 menurun ke 3,6 persen," ungkapnya.

Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury mengkonfirmasi pembentukan holding panas bumi tersebut. Juga keterlibatan Pertamina, PLN, dan Geodipa.

"Kami memang memiliki rencana menggabungkan aset geothermal dari ketiganya. Institusi gabungan nanti akan dimiliki bersama Pertamina, PLN dan pemerintah sehingga bisa diperoleh sinergi yang optimal," kata Pahala, Jumat 19 Februari 2021.

Dengan begitu, sambungnya, akan

terbentuk integrasi dari keunggulan pengembangan (*drilling*), transmisi energi ke pengguna, maupun dari sisi pendanaan. Pahala menambahkan, holding ini akan menjadi perusahaan dengan kepemilikan kapasitas PLTP terbesar di dunia.

"Gabungan perusahaan geothermal akan menjadi terbesar di dunia dalam installed capacity pembangkit geothermal. Ini merupakan inisiatif pengembangan baru dan terbarukan," sam-

Di sisi lain PT Geo Dipa Energi (Persero) menyambut baik rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk panas bumi (geothermal). Holding BUMN dinilai bisa mengakselerasi penugasan dari pemerintah dalam pengembangan energi panas bumi.

Direktur Utama Geo Dipa Riki F Ibrahim menyampaikan, peran BUMN sangat diperlukan dalam pencapaian target energi terbarukan. Dalam hal pe-



bung Pahala.

Namun, dia belum merinci tahapan yang sedang berjalan dalam pembentukan holding tersebut. Pahala pun masih enggan membuka siapa induk usaha holding panas bumi BUMN ini. Yang pasti, pembahasan terkait pembentukan holding ditarget rampung tahun ini. "Iya, 2021," ungkapnya.

manfaat panas bumi, peran BUMN sangat penting untuk mengurangi risiko eksplorasi dan pengembangan, di antaranya dengan melaksanakan penugasan pemerintah berupa *government drilling*.

Dengan adanya holding, peran BUMN dalam mengurangi risiko pengembangan panas bumi di hara-

• INFO EKONOMI

pkannya bisa meningkat. Hal ini juga bisa memperkuat sinergi dengan para pengembang swasta dalam upaya mencapai target kapasitas terpasang energi panas bumi.

Risiko berkurang berarti pula biaya untuk pengembangan panas bumi diproyeksikan dapat menjadi lebih murah. Sehingga, isu terkait harga listrik energi terbarukan lebih mahal bisa

wenangan dari pemerintah. "Kami menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah. Kami menunggu skema seperti apa yang akan dipakai. Namun apapun keputusannya kami berharap hasilnya akan mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia," sambung Riki.

Sambutan juga datang dari Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API

pemerintah ke BUMN. "Menjalankan misi pemerintah untuk mengoptimalkan dan mempercepat pengembangan panas bumi sebagai bagian dari program ketahanan dan kemandirian energi," ujar Priyandaru.

Soal harga listriknya, Priyandaru melihat segmen pasar PLTP memungkinkan efisiensi. "Kalau harga listrik dari BBM sekitar 20 sen dolar per kWh, panas bumi sekitar 7 sen sampai 13 sen dolar, tergantung kapasitas," ujarnya.

Jadi, kata dia, untuk wilayah yang memiliki kesulitan pasokan BBM solar, terlebih jika harus mengimpor, PLTP merupakan alternatif yang menarik sebagai sumber pasokan listrik. Sudah jelas potensinya, kawasan PLTP umumnya berada cukup jauh dari pesisir tempat pasokan solar.

Tak kurang regulator pun menyambut pembentukan holding BUMN bidang geothermal. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan, pemerintah telah membuat program eksplorasi untuk mencari sumber panas bumi baru dan mendorong sinergi BUMN yang bergerak pada sektor panas bumi.

"Sinergi BUMN dalam panas bumi PLN dengan PT Geo Dipa (Persero) atau dengan PGE (PT Pertamina Geothermal Energy) atau tiga-tiganya sekaligus (dengan PT PLN Gas & Geothermal)," katanya.

Dadan mengakui, sebagai regulator, Kementerian ESDM tidak dilibatkan. Pembentukan holding baru ini berada di bawah wewenang Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Meski begitu, dia berharap holding ini bisa memberikan banyak manfaat, terutama biaya eksplorasi hingga produksi panas bumi bisa kian efisien.

"Harapan kami kalau holding ini jadi, bisa dorong efisiensi. Dividen dan royalti semakin baik kontribusinya ke negara. Di dalam UU Panas Bumi, ada pengecualian untuk BUMN, ya mungkin statusnya diubah kalau bukan di bawah Pertamina lagi," kata Dadan.

Maksudnya efisiensi berorientasi profit agar pemasukan untuk negara juga lebih signifikan. Tentunya lebih banyak yang setuju begitu. ●



teratasi.

"Holding itu bagus. BUMN itu juga bersifat unik, dengan fungsi penugasan untuk menurunkan risiko, baik itu risiko bisnis maupun risiko operasional," kata Riki, Sabtu 20 Februari 2021.

Toh Riki menegaskan bahwa keputusan terkait holding menjadi ke-

Priyandaru Effendi. Menurut dia, hal itu akan memudahkan rencana pengembangan panas bumi. Termasuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan menambah modal kerja untuk keberlanjutan bisnis.

Holding pun dinilai bisa mengakselerasi target-target penugasan dari

MASIH KALAH DARI AS TAPI SUDAH MELAMPAUI JEPANG

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengemukakan, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia lebih baik dari Jepang. Saat ini, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) secara nasional mencapai 2.130 megawatt (MW), menduduki peringkat dua dunia.

Sementara posisi pertama ditempat Amerika Serikat 3.676 MW. Jepang masih tertinggal dari Indonesia dalam hal ini, pemanfaatan energi panas bumi di Negeri Fujiyama itu baru 542 MW.

"Kita ini tetap nomor dua, angka masih besar. Bicara panas bumi Indonesia, kita masih lebih bagus dari Jepang," kata

Untuk meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi, Dadan mengatakan pemerintah akan fokus pada area yang sudah beroperasi agar pengembangan bisa lebih efisien. Dengan begitu, harga jual listrik dari pengembang ke PT PLN (Persero) bisa lebih murah.

Mungkin pembentukan holding itu salah satu jalannya. Untuk Pertamina Geothermal Energy saja misalnya, saat ini sudah mengoperasikan lima PLTP. Masing-masing PLTP Kamojang Unit I-V, PLTP Lahendong Unit I-VI, PLTP Ulubelu Unit I-IV, PLTP Karaha Unit I, dan PLTP Lumut Balai Unit I.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 2020, kapasitas terpasang PLTP nasional mencapai 2.130,7 MW. Pertamina Geothermal Energy



Dadan dalam diskusi 'Optimalisasi Peran Panas Bumi dalam Wujudkan Ketahanan Energi Nasional, Kamis, 11 Maret 2021.

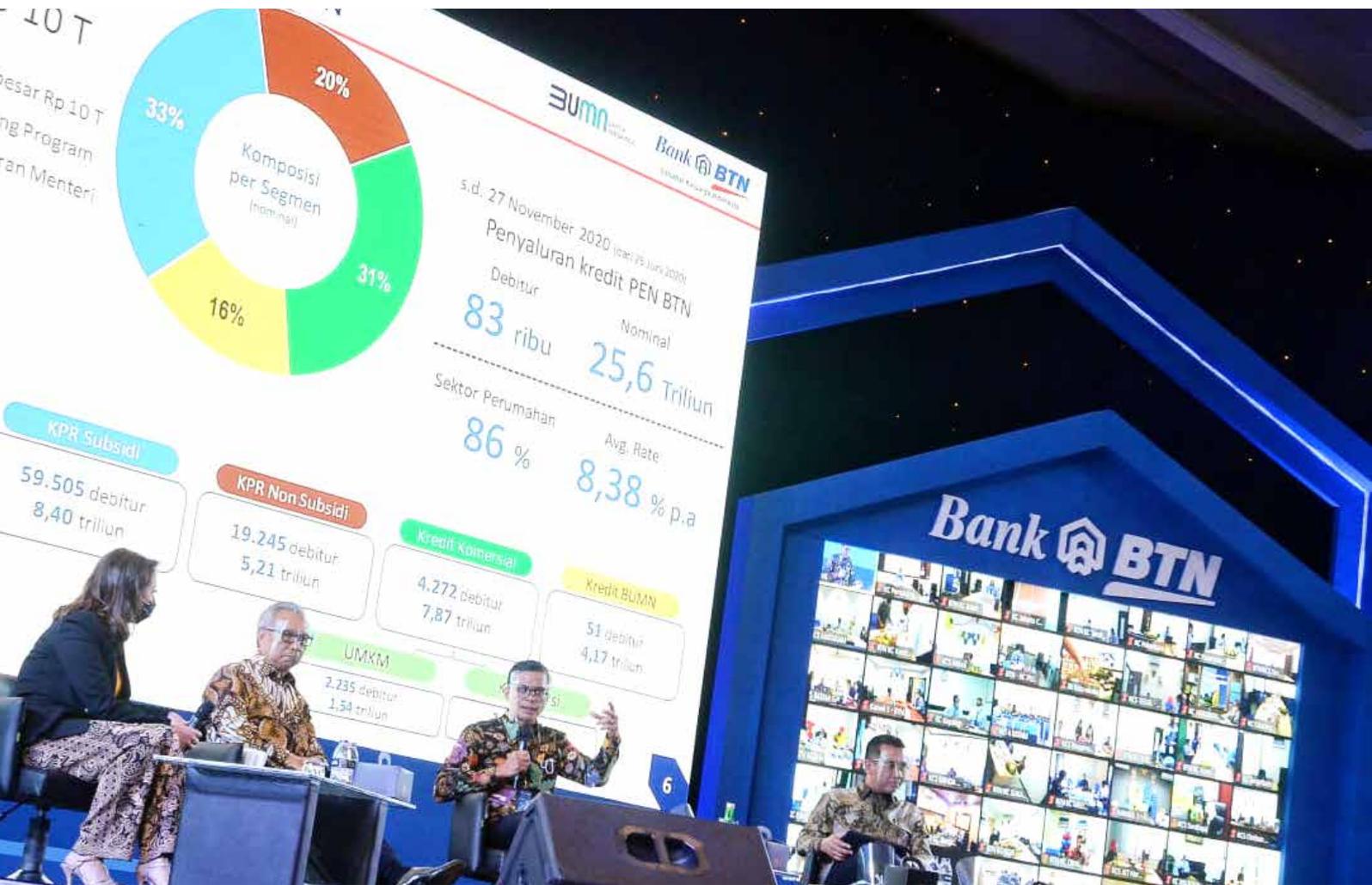
Setelah Amerika Serikat dan Indonesia, peringkat ketiga sebagai negara dengan pengembangan energi panas bumi terbesar dunia diduduki Filipina dengan 1.918 MW, Turki 1.526 MW, Selandia Baru 1.005 MW, Meksiko 963 MW, Italia 944 MW, Kenya 646 MW, Islandia 755 MW, dan Jepang 542 MW.

Toh jika dibandingkan dengan sumber daya panas bumi yang ada di dalam negeri, pemanfaatannya terbilang masih rendah. Berdasarkan data Geologi Kementerian ESDM tahun lalu, sumber daya panas bumi mencapai 23.000 MW, tapi yang termanfaatkan baru 2.130 MW di dalam 64 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

memasok sekitar 31,5 persen dari kapasitas terpasang nasional.

Tahun ini, PLTP swasta merencanakan pengembangan unit-unit baru di tiga PLTP setelah terkendala oleh wabah Covid-19 sepanjang tahun lalu. Total tiga PLTP baru tersebut memiliki kapasitas sebesar 140 MW: PLTP Rantau Dedap di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan berkapasitas 90 MW kelolaan PT Supreme Energy Rantau Dedap.

Selanjutnya PLTP Sorik Marapi Unit 2 berkapasitas 45 MW di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara kelolaan PT Sorik Marapi Geothermal Power. Kemudian PLTP Sokoria Unit 1 sebesar 5 MW di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur kelolaan PT Sokoria Geothermal Indonesia. ●



BANK BTN KEJAR TARGET LABA HINGGA RP 2,8 TRILIUN

Direksi baru Bank BTN tersusun dalam RUPS pada 10 Maret 2021. Targetnya meraih laba hingga Rp2,8 triliun pada tahun ini.

Sepeninggal Pahala Nugraha Mansury yang menjadi Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara, kursi Direktur Utama Bank BTN kosong. RUPS pada 10 Maret 2021 menetapkan Dirut baru dan jajaran direksi serta dewan komisaris.

Pahala naik jabatan menjadi Wakil Menteri BUMN I pada Desember 2020 lalu menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang menjabat Menteri Ke-

sehatan. Sejak itu muncul pertanyaan, siapa penggantinya sebagai Direktur Utama Bank BTN.

Nah, Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada Rabu, 10 Maret 2021 menjawab pertanyaan itu dengan mengangkat Haru Koesmahargo sebagai Direktur Utama. Ternyata RUPS juga memutuskan perombakan di Dewan Direksi dan Komisaris di salah satu

bank pelat merah ini.

Penambahan direksi yakni Wakil Direktur Utama yang diisi oleh Nixon L.P Napitupulu, yang sebelumnya sempat menjadi Plt Direktur Utama BTN ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut. Dengan demikian, Nixon akan mendampingi Haru untuk membawa Bank BTN lebih profitable lagi.

Haru sebelumnya merupakan Direktur Keuangan Bank BRI pada tahun 2015 hingga Januari 2021. Ia merupakan lulusan magister dari Investment Banking Emory University, USA. Sebelumnya lagi, Haru merupakan lulusan Teknik Industri Pertanian, Universitas



Brawijaya, Malang.

Karir awalnya adalah sebagai Kepala Desk, Hubungan Investor Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. Berkat jaringan dan pakar di bidangnya pada tahun 2011 dirinya dinobatkan sebagai General Manager untuk Kantor Cabang Luar Negeri New York PT BRI (Persero) Tbk pada periode 2011-2014.

Setelah menjadi general manager di cabang luar negeri, ia pun kembali dipilih sebagai Kepala Divisi Treasury Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk pada periode 2014-2015. Hingga pada akhirnya pada tahun 2015, ia pun menjadi Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia sampai dengan Januari 2021.

Pemegang saham juga memutuskan memberhentikan dengan hormat Pahala N Mansury selaku Direktur Utama Bank BTN dan Yossi Istanto dari posisi sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance. Pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Plan-

ning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal. RUPST Bank BTN 2020 juga mengangkat Iqbal Latanro yang pernah menjadi Dirut Bank BTN sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Berikut jajaran Direksi dan Komisaris BTN yang baru:

DIREKSI BANK BTN

- ▶ Direktur Utama: Haru Koesmahargyo
- ▶ Wakil Direktur Utama: Nixon L.P. Napitupulu
- ▶ Direktur Consumer dan Commercial Lending: Hirwandi Gafar
- ▶ Direktur Finance, Planning, & Treasury: Nofry Rony Poetra
- ▶ Direktur Legal, Human Capital, & Compliance: Eko Waluyo
- ▶ Direktur Remedial and Wholesale Risk: Elisabeth Novie Riswanti
- ▶ Direktur Operation, IT & Digital Banking: Andi Nirwoto
- ▶ Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics: Setyo Wibowo

- ▶ Direktur Distribution & Ritel Funding: Jasmin

DEWAN KOMISARIS BANK BTN

- ▶ Komisaris Utama Independen: Chandra M. Hamzah
- ▶ Wakil Komisaris Utama: Iqbal Latanro
- ▶ Komisaris: Heru Budi Hartono
- ▶ Komisaris: Eko D. Heripoerwanto
- ▶ Komisaris: Andin Hadiyanto
- ▶ Komisaris Independen: Armand B. Arief
- ▶ Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin.

Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. Bisnis BTN, lanjutnya, akan tetap berjalan normal dengan tetap mendukung program perumahan nasional sebagai core business Bank BTN.

Selain itu, Ari mengungkapkan Bank BTN juga akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect

• INFO EKONOMI

terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional.

Dengan tersusunnya Dewan Direksi dan Komisaris baru, Bank BTN optimistik target bisnis yang ditetapkan untuk tahun 2021 akan tercapai didukung jajaran Direksi baru yang ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. "Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa Bank BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," jelas Ari di Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.

Pada 2021, emiten bersandi saham BBTN ini membidik laba bersih naik ke kisaran Rp2,5 triliun-Rp2,8 triliun. Ari Kurniawan mengatakan perseroan tetap optimistis dapat mencapai target bisnis di tahun ini ditopang manajemen yang solid.

"Kami juga tetap optimistik mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah," kata Ari.

Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun ini yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7-9 persen. Dana Pihak Ketiga pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau di kisaran 7-9 persen.

Sayangnya, Bank BTN memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk para pemegang sahamnya atas kinerja perusahaan sepanjang tahun 2020. Berdasarkan pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham tahunan 2021 yang dipublikasikan pada Senin, 15 Maret 2021, RUPS menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1,6 triliun seluruhnya ditetapkan sebagai cadangan.

Jumlah suara yang setuju sebanyak 8,15 miliar saham atau 99,99 persen. Sedangkan 1.500 saham tidak setuju dan 17.787 saham abstain.

Wakil Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan laba yang berhasil dikantongi perusahaan akan



dibukukan sebagai laba ditahan perusahaan guna memperkuat modal Tier 1 BTN ke depannya.

"Itulah keputusan RUPS. Ada diskusi dengan pemegang saham Dwiwarna, memang ingin memperkuat Tier 1 Capital (modal tingkat 1) karena memang capital BTN ini paling rendah di antara

bank BUMN lain," kata Nixon.

Tier 1 Capital adalah ukuran kecukupan modal yang tertera pada laporan keuangan dan melibatkan equity sebagai ukuran kekuatan dan juga sesuai dengan ketentuan regulasi, dalam hal ini standard Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Tier 2 adalah modal lain-



nya termasuk cadangan, subordinated term debts, hybrid financial products, dan yang lainnya.

Bank BTN menargetkan modal Tier 1 ke depannya dapat meningkat ke angka 17 persen dari upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan kenaikannya ini diharapkan capital adequacy ratio

(CAR) atau rasio kecukupan modal bisa meningkat tanpa memberikan biaya yang lebih mahal kepada perusahaan. Pasalnya selama ini untuk meningkatkan CAR ini perusahaan berupaya dengan menerbitkan subdebt atau obligasi subordinasi. Upaya ini dinilai lebih mahal ketimbang melakukan upaya alternatif di samping masuk sebagai kategori Tier 2.

Sekadar kilas balik, pada tahun buku 2020, emiten berkode saham BBTN ini mencetak kinerja laba yang cukup signifikan. Di tengah masa pandemi, perolehan laba bersih perseroan meroket 665,71 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1,6 triliun dari posisi Rp209 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejauh ini Bank BTN dikenal sebagai salah satu bank nasional yang rutin membagikan dividen setidaknya dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, perseroan menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2019 senilai Rp20,93 miliar atau 10 persen dari total laba sebagai dividen tunai. Sedangkan pada tahun sebelumnya, perseroan menetapkan sebesar 20 persen dari laba bersih tahun buku 2018 sebagai dividen tunai.

Dalam konferensi pers usai RUPS pada 10 Maret 2021, Nixon menyampaikan perseroan terus melakukan perbaikan bisnis tahun ini khususnya pada penyaluran KPR. Upaya untuk menurunkan beban dana sekaligus mitigasi risiko akan tetap dijalankan guna membuat laba bersih kembali ke level optimal.

"Semua pengembangan dan perbaikan akan kami lakukan pada tahun ini. Kami juga optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025, dan mencetak laba Rp2,5 hingga Rp2,8 triliun tahun ini. Ini pun untuk penguatan modal kami," katanya.

Dalam laporan keuangannya, Bank BTN mencatatkan kredit baru hanya tumbuh 1,68 persen secara tahunan menjadi Rp 260,11 triliun. Meski begitu, Nixon menjelaskan realisasi itu masih lebih baik dibandingkan rata-rata kredit perbankan yang menurun lebih dari dua persen pada tahun lalu.

Untuk tahun ini, penunjang kredit per 2021 masih akan ditopang dari KPR

baik subsidi maupun non subsidi. Pilihan ini berdasarkan kinerja tahun lalu yang tercatat kredit perumahan BTN meningkat 3,29 persen yoy menjadi Rp 234,78 triliun atau sekitar 90,26 persen dari total kredit bank pelat merah ini.

Penopang utamanya bersumber dari KPR subsidi yang mencetak kenaikan 8,63 persen yoy menjadi Rp 120,72 triliun. "Untuk KPR subsidi dan KPR non subsidi dengan harga di bawah Rp 300 juta masih ada peluang untuk tumbuh baik," kata Nixon dalam Paparan Kinerja Kuartal IV secara virtual di Jakarta, Senin (15/2).

Sejalan dengan pertumbuhan kredit di tahun ini, Bank BTN berharap aset juga bisa ikut terkerek naik. Per akhir 2020 lalu, total aset Bank BTN tercatat sebesar Rp 361,2 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 15,85 persen dari total aset di tahun 2019 sebesar Rp 311,77 triliun.

Dengan memakai asumsi pertumbuhan yang sejalan dengan kredit, Nixon optimis aset Bank BTN bisa menyentuh Rp 400 triliun pada akhir 2021. Mengenai dana pihak ketiga (DPK) yang targetnya 7-9 persen, jelas lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun lalu yang mencapai 23,84 persen year on year.

Direktur Bank BTN Jasmin menjelaskan, target tersebut sangat realistis. Mengingat, tahun ini Bank BTN akan berupaya untuk meningkatkan dana murah alias tabungan dan giro. Tujuannya tak lain untuk menekan biaya dana atau efisiensi. "Nanti porsinya akan lebih banyak ke tabungan atau giro," kata Jasmin.

Strategi peningkatan CASA tersebut menurut perseroan antara lain dengan menggandeng kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga, perusahaan BUMN serta perusahaan swasta. Termasuk upaya optimalisasi digital untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.

Dengan segenap perhitungan dan kesepakatan RUPS, bank plat merah ini berani menargetkan pertumbuhan laba tahun ini naik pada kisaran 50-70 persen hingga kisaran Rp 2,5-2,8 triliun. Semoga jajaran Direksi dan Komisaris baru dapat membawa BTN mencapai target-targetnya. Malah bisa lebih baik lagi. ●



PGN KIAN MELESAT DI JARGAS RITEL

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) berkomitmen meningkatkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu utilisasi gas domestik. Terlebih lagi jangkauan jargas akan terus meluas sepanjang tahun ini.

Jargas merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Pada 2020, PGN berhasil menyelesaikan penugasan dari pemerintah untuk membangun jargas dengan dana APBN 2020 sebanyak kurang lebih 127.864 SR (sambungan rumah tangga) di 23 kabupaten/kota. Dengan pencapaian ini, kini telah ada lebih dari 422.000 pelanggan aktif di sektor rumah tangga di 60 kota/kabupaten di 17 provinsi.

Secara bertahap, PGN akan melanjutkan penugasan dari Kementerian ESDM untuk melaksanakan pengembangan jargas dengan dana APBN, KPBU, kemitraan dan investasi mandiri. Pembangunan jargas di 2021 akan dijalankan secara masif dalam rangka mengurangi subsidi energi impor dan mendukung target Holding Migas PT Pertamina (Persero) untuk mencapai 500.000 SR di 24 kota.

Salah satu strateginya adalah melau-

lui implementasi dari Sapta PGN (Program Gasifikasi Nasional), yaitu PGN Sayang Ibu, PGN akan mengembangkan 50.000 jaringan gas dengan investasi mandiri untuk rumah tangga dan pelanggan kecil (Gaskita) yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Karawang, dan Cilegon pada 2021. Proyek ini merupakan proyek Gaskita COCO (corporate owned, corporate operate) yang infrastruktur pipanya menggunakan pipa milik PGN dan dioperasikan juga oleh PGN.

Direktur Komersial PGN Faris Aziz mengungkapkan bahwa seiring dengan perubahan perilaku pasar dan gaya hidup yang semakin modern, PGN berupaya untuk tetap relevan dengan menawarkan *one-stop-service utility solution*, yaitu paket berlangganan gas dengan tarif tetap (flat rate) setiap bulan. Modernisasi layanan gas bumi yang akan dikembangkan mengusung teknologi seperti standar hidup modern seperti di negara Jepang, Korea, Singapura, dan Eropa.

“Dengan mengoptimalkan infrastruktur gas bumi yang sudah ada, PGN siap menjalan ekspansi pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga, salah satunya dengan produk Gaskita. Gaskita akan disalurkan langsung ke rumah-rumah pelanggan menggunakan pipa gas sehingga lebih modern, ringkas, selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan dan memiliki layanan tambahan yang bermanfaat bagi pelanggan,” ujar Faris, pertengahan Februari 2021 lalu

Berbagai manfaat dapat diperoleh dengan migrasi ke penggunaan gas melalui jaringan gas, antara lain kepastian penyediaan gas yang selalu tersedia karena disalurkan menggunakan pipa gas 24 jam tanpa putus. Dengan kandungan gas metana berkualitas tinggi akan menghasilkan api biru karena pembakaran yang sempurna.

Faris menjelaskan bahwa Gaskita juga lebih aman, karena gas yang dialirkan memiliki kandungan metana 98 persen yang mudah terurai di udara apabila terjadi kebocoran dan dilengkapi oleh piranti keamanan berupa valve (keran) dan gas alarm system un-

tuk mitigasi jika terjadi kebocoran gas.

Apabila terjadi kebocoran, gas bumi akan mengeluarkan aroma dan tidak akan menyebabkan ledakan. Kendala ataupun insiden lainnya yang terjadi terkait infrastruktur gas bumi, masyarakat dapat melaporkannya ke contact center PGN di nomor 1500 645 yang siap 24 jam melayani.

Keamanan bertambah dengan adanya layanan tambahan smart meter, di mana pemakaian gas akan termonitor dan tercatat otomatis secara real time, sehingga dapat meminimalisir kontak fisik saat pandemi karena petugas tidak perlu datang ke rumah untuk melakukan pencatatan manual.

Selain di kawasan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, PGN juga melaksan-

Sumber pasokan berasal dari Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dengan alokasi pasokan sekitar 0,1 MMSCFD.

“Ini merupakan bentuk sinergi grup Holding Migas dalam melayani kebutuhan akses energi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya pada Selasa, 23 Februari 2021.

Sebelum Gas In di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilaksanakan sosialisasi terkait berlangganan gas dan keamanan dalam menggunakan gas untuk kebutuhan sehari-hari pada 2 Februari 2021. Sosialisasi diselenggarakan secara daring (Jakarta - Tarakan- Kutai Kartanegara).

Dalam sosialisasi, disampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai



akan sambungan atau Gas In jaringan gas bumi (jargas) pada pelanggan rumah tangga di Kutai Kartanegara. Gas In dilaksanakan secara bertahap mulai 17 Februari sampai dengan Juni 2021.

Area Head PGN Jakarta, Sheila Merlianty menyampaikan bahwa jargas rumah tangga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia. Sheila menjelaskan, sebanyak 2.301 Sambungan Rumah (SR) telah rampung dibangun dengan dana APBN TA 2020.

Lokasi sambungan jargas itu mencakup Desa Semangko; Desa Sebuntal; dan Desa Bunga Putih, Kecamatan Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

manfaat penggunaan gas bumi, harga gas bumi, tata cara perhitungan dan pembayaran gas bumi, tips penggunaan peralatan gas yang aman, tanggung jawab antara PGN dan pelanggan, serta penanganan saat kondisi emergency. Selain itu, gas untuk rumah tangga merupakan jenis gas metana berbobot jenis ringan sehingga cepat dan mudah menguap di udara, minim risiko kebakaran, serta efisien untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup perekonomian.

Di balik ingar-bingar pemasangan jargas pada awal tahun ini, sebenarnya pelaksanaannya menghadapi kendala. Antara lain wabah Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 lalu. Alhasil, memang target instalasi jargas

• INFO EKONOMI

pada 2020 lalu meleset.

Pada 2020 itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menargetkan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR. Namun sebagian dananya terpaksa dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19, sehingga jargas yang akan dibangun hanya 127.864 SR di 23 kabupaten/kota dengan dana sekitar Rp 1,4 triliun.

Jadi, harap maklum juga jika PGN

akan diberikan untuk memaksimalkan pengalaman mengkonsumsi energi, dengan layanan jaminan keamanan di era pandemi untuk jaminan keselamatan yang lebih terjaga dan fitur penunjang lainnya. "Khusus untuk bulan Februari-Maret ini, PGN menghadirkan promo spesial untuk menarik minat calon pelanggan energi baik gas bumi," tandas Faris

Secara nasional, pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah

400.269 SR (74,41 persen) dibangun pemerintah melalui dana APBN, 132.982 SR (24,72 persen) dibangun PT PGN dan 4.685 SR (0,87 persen) dibangun oleh PT Pertamina. Meskipun lingkup nasional, pemasangan jargas memang baru di kawasan pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Tahun ini bertambah ke Sulawesi (Tengah dan Selatan).

Jargas dengan dana APBN telah dibangun Pemerintah sejak tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. Dana APBN untuk jargas tercatat sekitar Rp2,64 triliun dalam RPJMN.

Jika instalasi 2020 terpasang semua hingga mendekati 128 ribu SR di 23 kabupaten dan kota, total jargas di awal 2021 baru mencapai sekitar 666 ribu SR atau baru mendekati 17 persen dari target 2024 sebanyak empat juta SR. Masih 3,33 juta SR tersisa antara 2021-2024 atau rata-rata 833 SR per tahun setara dengan 208 ribu SR per triwulan atau kuartal.

Untuk mengejar target yang masih jauh itu dari tercapai itu, pemerintah mendorong program dengan skema public private partnership yang di Indonesia dikenal sebagai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mulai pada 2022 mendatang. Persiapan pelaksanaan skema KPBU telah dilakukan pemerintah. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggandeng Lemigas Kementerian ESDM untuk melakukan studi pendahuluan.

Menurut rencana, skema KPBU akan mulai dilaksanakan 2022 mendatang, setelah dilakukan penjajakan minat pasar pada 2021. Skema KPBU ini menyasar daerah-daerah yang cukup ekonomis untuk dibangun jargas oleh badan usaha. Pemerintah akan mengurangi perannya dan mendorong badan usaha membangun jargas. Sedangkan alokasi gas akan disiapkan.

Sudah tampak peluangnya? Hitung-hitungan untung ruginya jangan lupa. ●



tampak seperti memacu pemasangan jargas ini di wilayah penugasannya. Antara lain merealisasikan pengembangan 50 ribu Sambungan Rumah tangga (SR) jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil (GasKita) di wilayah Jabotabeka dan Cilegon pada tahun 2021.

Direktur Komersial PGN Faris Aziz mengungkapkan, program jargas ini merupakan proyek investasi mandiri PGN menggunakan skema COCO (Company Owned, Company Operate) dengan segmentasi perumahan. Dengan perhitungan bisnis, PGN juga berani menawarkan promo menarik seperti bebas biaya instalasi gas dan sudah termasuk gas alarm system untuk memberi peringatan bila terjadi kebocoran gas.

Tak hanya itu, ada layanan tambahan yang

tangga mematok target empat juta SR pada 2024. Hingga 2019, total jargas yang terbangun mencapai 537.936 SR, terdiri dari



PETA JALAN JARGAS 2021

Program pemasangan jaringan gas rumah tangga jelas merupakan salah satu cara konkret mencapai tujuan bernegara berupa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah jelas cadangan gas Indonesia masih besar, sedangkan kebutuhan rumah tangga untuk gas relatif kecil.

Hitung-hitungannya 0,1 mmscfd (million standard cubic feet per day) atau 100 ribu kaki kubik per hari dapat memenuhi aliran gas untuk 10.000 sambungan rumah (SR). Sementara cadangan gas bumi Indonesia pada 2020 tercatat sekitar 97 triliun kaki kubik. Jelas persoalan jaringannya yang menjadi kendala pemanfaatan.

Sudah benar pemerintah terus mendorong pembangunan jargas agar jumlah masyarakat yang dapat menikmati manfaat gas semakin besar. Selain itu, pengembangan jargas juga akan mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahun, penghematan subsidi LPG sebesar Rp297,55 miliar per tahun, serta menghemat pengeluaran energi masyarakat Rp386 miliar per tahun. Jargas juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas yang mencapai Rp2,64 triliun per tahun.

Nah, perkembangan terakhir, pada Rabu, 10 Maret 2021 lalu, berlangsung penandatanganan Kontrak Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (jargas) Tahap I Tahun Anggaran 2021. Anggarannya mencapai Rp467,79 miliar

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyampaikan bahwa program pembangunan jargas bertujuan memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi. "Juga membantu ekonomi masyarakat menuju mandiri dan ramah lingkungan, serta mengurangi beban subsidi BBM atau LPG pada sektor rumah tangga," ungunya.

nya.

Pak Dirjen berterus terang bahwa tagihan gas rumah tangga ini pasti lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan gas tabung, yang subsidi sekalipun. "Saya telah menyaksikan hasil pembangunan jargas di Kota Lamongan (Jawa Timur), dan terlihat jelas betapa bahagianya seorang ibu menggunakan jargas yang murah dan bersih. Kemudahan dan kenyamanan telah diberikan Pemerintah," ungkap Tutuka

Sedangkan kelanjutan program jargas pada 2021 terdiri dari 10 paket pekerjaan. Kontrak pembangunan jargas yang ditandatangani pada tahap I

banyak 17.506 SR.

Selanjutnya, dua paket sisanya terdiri dari Paket 4 meliputi Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan sebanyak 12.753 SR dan Paket 5 mencakup Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo sebanyak 10.817 SR. Dua paket terakhir tahap I Tahun 2021 ini juga berada di Jawa Timur

"Untuk penandatanganan kontrak tahap II, saat ini masih proses diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK yaitu untuk Paket 6 meliputi Kabupaten Banyuwangi (Sumatera Selatan) dan Paket 11 yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang



berjumlah lima paket yang mencakup 60.875 SR. Jumlah tersebut setara dengan separuh atau 50 persen dari total SR yang dibangun tahun 2021 di 21 kabupaten/kota yang sebanyak 120.776 SR.

Secara terperinci, kelima paket ini terdiri dari Paket 1 ini di antaranya meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 11.526 SR semuanya di Provinsi Aceh, Paket 2 meliputi Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sebanyak 8.273 SR di Jawa Barat, dan Paket 3 meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur se-

(Jawa Barat)," kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Noor Arifin Muhammad.

Kontrak Tahap III, lanjutnya, masih tahap proses penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan Kementerian ESDM. Tahap III mencakup satu kabupaten di Sulawesi Selatan, satu kabupaten di Sulawesi Tengah, dan empat kabupaten serta satu kota di Jawa Timur.

Tampak jelas masih jauh dari harapan 208 ribu SR per tahun untuk mencapai target empat juta SR pada 2024. Sulit jika hanya mengandalkan APBN yang juga terus tertekan. ●

PERJALANAN KE BALI MEMBENAH ETALASE NEGERI

Bali adalah etalase negeri karena menjadi gerbang utama pelancong asing yang datang ke Indonesia. Pembenahan sektor pariwisata domestik yang terdampak pandemi global Covid-19 bermula dari sana.

Pasti bukan liburan Presiden Joko Widodo mengunjungi Bali kali ini. Acaranya pun vaksinasi massal, termasuk untuk para pemangku kepentingan bisnis pariwisata di sana. Semakin jelas ketika dalam kunjungannya itu Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah akan mendorong kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali yang terdampak pandemi covid-19.

Antara lain dengan fokus pada pembukaan sektor pariwisata pada tiga zona hijau di Pulau Dewata. Boleh jadi untuk tahap pertama sebelum seluruh Bali terbuka ketika saatnya tiba. Momentumnya pun pas setelah Hari Raya Nyepi, saat semua kegiatan di Bali terhenti.

"Dengan kami fokus di tiga zona ini, kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai, dan akan kami evaluasi setiap minggu bagaimana perkembangan di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali," ujarnya usai meninjau vaksinasi massal di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa, 16 Maret 2021.

Ketiga zona hijau yang dimaksud adalah Ubud,



Sanur, dan Nusa Dua. Kepala negara meyakini para wisatawan baik asing maupun domestik akan merasa nyaman bepergian di zona hijau, sehingga mendorong aktivitas pariwisata di Bali.

Pemerintah Provinsi Bali yang menetapkan tiga wilayahnya sebagai zona hijau Covid-19. Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung.

Penetapan zona hijau di tiga kawasan itu bertujuan membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standard protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari tahapan-tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata apabila situasi pandemi telah terkendali.

“Kami harapkan ini menjadi kawasan hijau, zona hijau yang nantinya bisa kami buka penuh untuk turis, sehingga nanti mereka merasa aman dan nyaman tinggal di Bali,” kata Presiden. Ia menambahkan pembukaan sektor pariwisata di tiga zona tersebut, maupun di Bali secara umum tetap akan mempertimbangkan perkembangan kasus covid-19.

Oleh sebab itu, Jokowi berharap proses vaksinasi di Bali berjalan dengan lancar sehingga angka penularan pun semakin landai. Setelah angka penularan covid-19 landai, Presiden memastikan pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah akan mulai membuka sektor pariwisata di Bali secara perlahan.

“Tapi saat ini kami harus berbicara apa adanya: Masih memerlukan tahapan-tahapan menuju ke sebuah situasi yang normal dan kami harapkan kita semuanya masih pada posisi waspada,” ucapnya.

Acara inti di Puri Saren Agung adalah vaksinasi massal bagi para pelaku industri pariwisata, pemuka agama, hingga masyarakat setempat. Beriringan dengan itu, vaksinasi juga berlangsung serentak di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali.

Di Gianyar ini, kegiatan vaksinasi

massal yang menjadi bagian program vaksinasi gratis pemerintah pada hari ini diikuti oleh kurang lebih 680 orang yang pemberiannya dilakukan bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Saya ingin melihat proses berjalannya vaksinasi yang telah diberikan kepada para pelayan publik, tokoh-tokoh agama, juga sebagian di lingkungan masyarakat. Jadi dari setiap banjar (kesatuan masyarakat hukum di Bali), dari 13 banjar yang ada, ditunjuk 50 orang

tempat. Tak hanya Kabupaten Gianyar, pelaksanaan vaksinasi massal ini juga dilakukan serentak di 7 kabupaten dan 1 kota lainnya, yakni Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara turut melakukan konferensi video dengan para bupati dan wali kota. Dalam arahnya melalui konferensi video tersebut, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja



dan proses pada siang hari ini berjalan baik dan lancar,” ujar Presiden.

Vaksinasi ini utamanya ditujukan bagi para pekerja publik khususnya pelaku industri pariwisata, pemuka agama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, dan masyarakat se-

keras pemerintah daerah untuk turut serta menyukseskan program vaksinasi massal dari pemerintah.

Presiden mengingatkan agar jajaran di daerah tidak lengah dan tetap mengarahkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan untuk menjaga kea-

• INFO ISTANA

manan masyarakat setempat. “Yang penting tetap selalu menjaga protokol kesehatan secara ketat sehingga betul-betul nanti laju penyebaran Covid-19 ini bisa berkurang di Provinsi Bali,” tukasnya.

Dalam kesempatan di Gianyar, berlangsung pula teleconference Presiden dengan para Bupati se-Bali juga Wali Kota Denpasar. “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, seluruh Bupati dan Wali Kota yang terus menerus, tidak kenal lelah, selalu mengingatkan kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi.



“Yang kedua...agar tetap selalu menjaga protokol kesehatan secara ketat, sehingga betul-betul nanti laju penyebaran Covid-19 ini bisa berkurang di Provinsi Bali,” tandasnya.

Usai acara di Gianyar, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya di Bali dengan mengarah ke selatan menuju ibu kota provinsi, Denpasar. Di ibu kota Bali ini Presiden juga menyaksikan pelaksanaan vaksinasi massal yang berlokasi di Haris Hotel & Residences Sunset Road.

Berbeda dengan Gianyar, vaksinasi di Denpasar kali ini merupakan hasil kolaborasi sektor pariwisata dan pemerintah daerah. Sebanyak 500 orang mengikuti pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di hotel itu. Tampak dalam rombongan Presiden antara lain, Menteri Kesehatan Budi

Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, dan tuan rumah Gubernur Bali Wayan Koster.

Pelaksanaan vaksinasi massal ini terselenggara atas kerja sama Pemerintah Provinsi Bali dengan para pelaku pariwisata melalui sejumlah asosiasi di sektor pariwisata setempat. Hal itu merupakan salah satu upaya mengatasi penyebaran pandemi sekaligus menjaga keseimbangan dan percepatan pemulihan ekonomi Bali yang memang bertumpu pada sektor pariwisata.

“Ada beberapa asosiasi yang terlibat berkolaborasi bersama-sama baik dalam proses verifikasi sampai vaksinasi. Vaksinasi ini kita awali dengan pendataan secara komprehensif meliputi nama lengkap dengan kuesioner kesehatannya untuk bisa merangkul para pelaku usaha wisata di Bali,” ujar Agus Made Yoga Iswara, Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Chapter Bali, saat ditemui di lokasi.

Agus mengungkapkan, dalam waktu satu minggu, antara 22-28 Februari, terdata sebanyak 90.195 peserta yang berasal dari sektor pariwisata Bali. Kemudian, sejak 10 Maret 2021 lalu, vaksinasi bagi para pelaku usaha pariwisata tersebut mulai berjalan.

Para pelaku usaha pariwisata, dalam skema kerja sama tersebut, meny-

iapkan lokasi pelaksanaan vaksinasi dan mendata para pekerja pariwisata setempat untuk kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah akan langsung menindaklanjuti inisiatif tersebut dan mengkoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan agar dapat dilakukan vaksinasi.

“Saat ini tercatat kurang lebih 3.810 pelaku pariwisata yang sudah divaksinasi dari total 90.195. Jadi kurang lebih ada 3,7 persen yang divaksinasi,” ujarnya.

Skema kerja sama yang ditempuh itu merupakan bentuk usaha bersama dalam rangka gotong royong memulihkan dan menjaga kepercayaan ter-

“

“Dengan kami fokus di tiga zona ini, kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai, dan akan kami evaluasi setiap minggu

hadap pariwisata Bali yang terdampak pandemi. Selain itu, vaksinasi massal tersebut juga dilakukan dengan maksud untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat, khususnya pekerja di sektor pariwisata, selama menjalankan aktivitasnya dengan produktif.

“Harapannya ini menjadi penciptaan trust yang baik dan juga confidence untuk pelaku pariwisata Bali untuk bangkit. Kolaborasi inilah yang sangat indah terjadi di Bali. Dalam proses vaksinasi ini, stakeholder pariwisata bergotong royong mendukung program pemerintah seperti apa yang terjadi hari ini,” kata Agus.

Setahun pandemi global melanda Indonesia, semoga Bali sebagai etalase negeri aman, nyaman, sehat, dan ramai lagi. ●



DERITA BALI DALAM SETAHUN PANDEMI

Biarlah angka dulu yang berbicara penderitaan Bali di dalam setahun Covid-19 menjadi pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, mengungkapkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hanya tercatat 141 ribu pada Januari 2021. Jumlahnya merosot tajam 89,05 persen dibandingkan dengan posisi Januari 2020 yang mencapai 1,2 juta kunjungan.

Kepala BPS Suharyanto menyatakan penurunan kunjungan wisman juga terjadi secara bulanan atau dibandingkan dengan Desember 2020 sebesar 13,9 persen. Pada Desember 2020, jumlah kunjungan wisman tercatat sebanyak 164 ribu orang.

"Pandemi ini membawa dampak luar biasa ke sektor pariwisata dan penunjangnya. Pasar utama wisatawan mancanegara masih melakukan pembatasan, beberapa negara Eropa masih lockdown," ungkap Suharyanto pada 1 Maret 2021.

Sebulan sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa menyampaikan, semenjak pandemi Covid-19 sebagai besar usaha di sektor pariwisata tutup dan terutama hotel di Bali, karena sepiunya tamu. "Kalau saya tidak punya datanya (berapa usaha yang tutup) karena dinamis. Tapi hotel terutama sebagai besar tutup, karena

tamu tidak ada," kata Astawa, Selasa, 2 Februari 2021.

Sementara untuk usaha yang bergerak di sektor pariwisata, seperti restoran, obyek wisata, mereka tetap buka namun para pengunjung atau wisatawan domestik tidak terlalu ramai. "Usaha wisata juga sama, artinya buka tetap tapi pengunjungnya jumlahnya tidak seperti liburan. Kalau liburan Nataru (natal dan tahun baru) itu ramai, kalau sekarang tidak musim liburan iya domestiknya pasti turun. Karena, tamu-tamu domestik itu cenderung mengikuti ritme liburan," imbuhnya.

Astawa juga mengungkapkan, untuk kerugian di sektor pariwisata selama adanya pandemi Covid-19 per bulan bisa sekitar Rp 10 triliun. Karena, pariwisata itu efeknya beruntun. Mulai dari hotel, restoran, guide, transportasi, sampai ke obyek-obyek wisata serta lainnya yang terdampak.

"Kalau rata-rata devisa itu Rp 9,7 triliun per bulan. Dan mancanegara sudah nol tidak ada. Setiap bulan hampir Rp 10 triliun (kerugiannya)," ungkapnya.

Kondisi pelaku pariwisata di Bali saat ini sudah mengenaskan. Karena pandemi Covid-19 ini sudah hampir setahun. Awalnya, pihaknya berpikir bahwa pandemi Covid-19 ini kemungkinan hanya empat bulan saja.

"Sebenarnya sudah agak berat te-

man-teman pengelola akomodasi itu. Kalau dibilang bertahan sekali juga salah. Jadi mereka sudah sudah megap-megap, karena sudah terlalu lama hampir setahun," sebutnya.

"Hitung-hitungan kita hanya empat bulan, Lebih dari itu agak berat. Makanya dikasih hibah agar bisa bertahan, untuk menjaga hubungan dengan karyawannya. Iya kasih jaminan pengaman sosial kepada pekerja-pekerjanya program-program pemerintah untuk bisa survival saja," ujarnya.

Sementara, untuk kunjungan wisatawan domestik ke Bali di Bulan Januari 2021 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai ada sekitar 1.900 per hari. "Maksudnya kedatangan di bandara itu ada sekitar 1.900 per hari masih ada. Kalau dari segi jumlah kedatangan itu masih tetap segitu-gitu saja. Sekitar 2.000 dan 1.500," ujar Astawa.

Jadi, Bali memang perlu lebih banyak wisatawan lokal dan pelancong asing sekaligus. Tanpa itu, dampak rentetannya memang luar biasa. Hampir segenap kegiatan ekonomi, bahkan upacara-upacara tradisi yang biasa mendapat kunjungan menjadi sunyi.

Berharap kunjungan Presiden ke Bali pasca Hari Raya Nyepi yang membuka Tahun Caka 1944 juga menjadi momentum kebangkitan etalase negeri ini. Semoga cukup setahun derita Bali. •



KEMBALI (LAGI) MENGANDALKAN ANGIN

Revolusi memerlukan kekuatan dahsyat. Di lautan, revolusi maritim dapat mengandalkan kekuatan angin.

Hebah mobil bertenaga listrik sudah melanda dunia dengan munculnya Tesla dari Amerika Serikat. Swed-

ia memiliki ide lain, membuat kapal kargo pengangkut mobil yang juga bebas emisi gas rumah kaca: Oceanbird namanya.

Memang kapal laut tak semudah mobil yang beralih ke tenaga listrik. Apalagi kapal kargo yang sangat besar yang berarti harus diisi dengan baterai untuk beroperasi, sehingga menyisakan sedikit ruang untuk muatan. Kapal dapat beroperasi dengan gas alam cair, tetapi itu hanya akan mengurangi

sebagian emisi. Bahan bakar amonia tidak mencemari saat terbakar tetapi mencemari produksinya. Energi angin dapat menghindari semua tantangan tersebut.

Begitulah konsep dasar Oceanbird buatan galangan kapal Wallenius Swedia. Sebuah konsorsium Swedia mengembangkan kapal berenergi angin ini. Selain Wallenius Marine - milik keluarga Wallenius yang mendirikan kelompok usaha transportasi Wallenius RoRo -- konsorsiumnya mencakup pula Institut Teknologi Kerajaan Swedia dan konsultan transportasi kargo SSPA. Proyek ini dibiayai bersama oleh Kementerian Transportasi Swedia.

Kapal berspesifikasi panjang haluan ke buritan 200 meter ini akan memiliki kapasitas angkut 7.000 mobil. Tinggi maksimumnya 105 meter ketika lima "layar sayap" tegak setinggi 80 meter sepenuhnya tampil. "Ini tentu saja akan menantang kebiasaan kami. Ketika kapal ini akan berlayar di laut, itu akan menjadi burung yang aneh," kata mitra konsorsium Chief Operating Officer Wallenius Marine Per Tunell yang mengungkapkan proses pengemban-

gan sedang dalam percepatan, "agar memungkinkan peluncuran dan pengoperasian kapal ini pada akhir 2024."

Dua abad setelah kapal uap bertenaga batu bara pertama melintasi Samudera Atlantik, kapal kargo besar Oceanbird yang digerakkan oleh angin dapat membantu mengakhiri era bahan bakar fosil dan membatasi perubahan iklim. Terlebih Organisasi Maritim Internasional PBB (IMO) mendata bahwa bisnis kargo maritim menyumbang sekitar 2,9 persen gas rumah kaca buatan manusia pada 2018, sementara pangsa industri penghasil emisi pemanas bumi ini juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu solusinya mungkin memutar waktu kembali ke zaman pra-industri dan sekali lagi mengangkat layar untuk membawa kargo ke seluruh dunia. Begitulah maka Wallenius Marine AB dari Swedia kini berada di depan dengan membangun Oceanbird di sebuah teluk di Laut Baltik.

Oceanbird akan memiliki panjang 200 meter dengan kapasitas membawa 7.000 mobil. Ini mungkin kapal layar tertinggi yang pernah dibuat, dilengkapi layar sayap yang mencapai 105 meter di atas permukaan air. Layarnya, bagaimanapun, terlihat sedikit seperti layar kain tradisional yang mengepul, sebaliknya lebih mirip dengan sayap pesawat terbang yang naik secara vertikal dari geladak.

Kapal tersebut akan memiliki mesin sebagai cadangan, tetapi menargetkan menekan hingga 90 persen emisi karbon dibandingkan dengan kapal konvensional yang menggunakan bahan bakar dalam tangki yang mencemari udara dan bisa juga laut.

Oceanbird membutuhkan waktu sekitar 12 hari untuk menyeberangi Atlantik, dibandingkan dengan delapan hari untuk kapal bertenaga bahan bakar. Sedikit agak lambat karena kecepatannya 10 knot dibandingkan dengan 12 knot kapal bertenaga bahan bakar fosil.

Namun, desainnya "juga bisa diterapkan sebagai kapal pesiar, kapal curah, kapal tanker," kata Chief Operating Officer Wallenius Per Tunell. "Salah

satu syarat utamanya adalah harus layak secara komersial," sambungnya.

Tunell mengakui kapal masa depan ini mungkin akan lebih mahal biaya pembuatannya daripada pengangkut mobil konvensional. Namun, ia menolak menyebut harga pastinya. Tetapi biaya operasional akan lebih rendah, terutama jika pemerintah mencoba untuk menahan laju emisi yang mengubah iklim dan memberlakukan harga emisi karbon dari penggunaan bahan bakar.

Toh Oceanbird bukan satu-satunya pesaing baru dalam perlombaan pengiriman rendah karbon. Neoline di Prancis sedang mencari pesanan untuk kapal yang lebih kecil, 136 meter, juga cocok untuk mengangkut mobil atau mesin pertanian. Seperti Oceanbird, Neoline juga mengklaim dapat memangkas emisi hingga 90 persen.

Kapal kargo semacam itu akan menandai revolusi maritim. Hingga saat ini sebagian besar perusahaan yang mencoba mengurangi emisi memandang layar sebagai tambahan untuk menghemat konsumsi bahan bakar, bukan sebagai sumber tenaga penggerak utama. Namun teknologi baru, seperti layar sayap dan bahan yang lebih tangguh dan lebih ringan yang terinspirasi oleh yacht balap di America's Cup, memungkinkan peralihan sepenuhnya mengandalkan angin.

Prakiraan cuaca jangka panjang yang lebih andal juga memungkinkan perencanaan rute yang lebih baik untuk menghindari badai atau mati angin. "Masuk akal untuk menggunakan tenaga angin bersejarah ini, tetapi juga teknologi baru," kata Jean Zanuttini, kepala eksekutif Neoline.

Dia mengatakan negosiasi sedang berlangsung tentang kemungkinan kontrak dan kesepakatan galangan kapal, dengan kapal "Neoliner" pertama yang akan beroperasi pada Juli 2023, dengan biaya sekitar 45 hingga 50 juta euro (\$ 54-60 juta). Neoline bermitra dengan perusahaan otomotif Renault dalam merancang dan menggunakan kapal itu.

Diane Gilpin, kepala Smart Green Shipping Alliance di Inggris, mengatakan kapal bertenaga angin sangat menarik dan layarnya "tidak perlu dipikir-

• INFO TEKNOLOGI

kan lagi” untuk memerangi perubahan iklim.

Hampir satu dekade lalu, dia memimpin sebuah perusahaan yang merancang “kapal kargo bertenaga 100 persen terbarukan” dengan layar dan mesin yang menggunakan biogas dari limbah kota. Pengujian model berhasil, tetapi belum dibuat. “Tantangan terbesar adalah mendapatkan serapan pasar. Semua orang menyukai gambarnya, semua orang menyukai ceritanya. Tapi tidak ada yang mau mengeluarkan uang untuk itu,” kata dia.

Namun, Organisasi Maritim Internasional IMO mengatakan ingin mengurangi emisi perubahan iklim dari pengiriman hingga setengahnya pada tahun 2050, dari level 2008, katanya. Itu berarti bahwa kapal apa pun yang dipesan hari ini, dengan perkiraan masa pakai 30 tahun, harus jauh dari status mencemari lingkungan.

Dengan lebih dari setengah biaya perjalanan untuk sebuah kapal yang berasal dari bahan bakar, Gilpin mengatakan pemerintah dapat memacu peningkatan kualitas lingkungan den-

gan memberlakukan harga emisi karbon mungkin \$50 per ton untuk pengiriman.

Toh tetap ada kelemahan kapal bertenaga angin. Di antaranya, pelabuhan beroperasi pada tenggat waktu yang ketat, berarti hari ekstra tak terduga di laut dapat berarti kehilangan slot untuk menurunkan kargo di pelabuhan dan penundaan yang lama dan mahal.

Maka, Oceanbird maupun Neoliner berencana menggunakan mesin, yang ditenagai oleh bahan bakar fosil atau biofuel, untuk mengikuti jadwal jika angin bergantung pada ketepatan waktu dalam perjalanan. Tapi Tunell mengatakan mesin dan tangki bahan bakar akan lebih kecil daripada kapal yang sebanding.

“Sebagian besar perusahaan lain fokus pada bantuan angin. Kami fokus pada tenaga angin. Ini kapal layar,” kata Tunell.

Jakob Kutteneuler, seorang profesor di Swedish KTH Center of Naval Architecture yang menjalankan tes untuk Oceanbird, mengatakan salah satu

teka-teki penelitian adalah seperti apa perubahan angin saat layar mencapai ketinggian baru di atas permukaan laut.

Layar sayap Oceanbird, kemungkinan besar dibuat dari aluminium, baja dan material komposit, akan naik dari dek 35 meter di atas air, mencapai 105 meter (345 kaki) di atas permukaan laut.

Sebagian besar awaknya telah mempelajari cara mengatur angin agar lebih dekat ke garis air, di mana gelombang menyebabkan turbulensi udara. “Tidak terlalu banyak orang yang memanfaatkan bagian atmosfer di lautan terbuka ini. Pesawat terbang lebih tinggi dan kapal lebih rendah,” katanya.

Desainnya menggunakan rig setinggi 260 kaki yang terbuat dari baja dan komposit — lebih mirip sayap pesawat daripada layar kain tradisional — yang dapat naik dan berputar untuk menangkap angin secara optimal. Ukuran kapal yang sangat besar, dengan panjang lebih dari 650 kaki, berarti layarnya juga harus besar agar bisa terus bergerak meski angin hanya bertiup sepoi-sepoi.

Lambung kapal juga berbeda dari



kapal kargo pada umumnya dan dapat menggunakan sirip, seperti perahu layar yang lebih kecil, untuk mengimbangi pergerakan ke samping dari layar. Ketika sampai di pelabuhan, kapal akan kembali menggunakan bahan bakar. Namun desain keseluruhan bisa mengurangi emisi hingga 90 persen.

Secara teknis menantang untuk mendesain, karena pendekatannya baru. "Tidak ada yang pernah benar-benar mempelajari dari sudut pandang aerodinamis bagaimana sebenarnya ini bekerja," kata Ulysse Dhomé, rekan Kuttenteuler di proyek ini.

Menurut dia, Oceanbird akan beroperasi secara berbeda dari perahu layar tradisional mana pun. "Kami tidak dapat memiliki awak kapal yang terus-menerus melihat sayap dan mengutak-atiknya, seperti yang lazim dilakukan di perahu layar biasa," kata Dhomé.

Jadi, kata dia, kita harus menemukan cara untuk memiliki sensor tepat yang memungkinkan algoritma melakukan kontrol. Sekali lagi, itu bukanlah sesuatu yang pernah dilakukan sebelumnya," ujarnya tentang teknologi



kapal ini.

Setelah beberapa tahun pengembangan, tim telah membangun model kapal kecil dan mulai mengujinya di perairan terbuka pada akhir 2020. Nah, tahun ini, Wallenius Marine akan mulai menerima pesanan; pada akhir 2024, diharapkan untuk mulai menjual kapal.

Desain kapal pertama adalah "ro-ro", singkatan dari "roll-on, roll-off," dibuat untuk membawa kargo beroda seperti

mobil. Tetapi pendekatan dasarnya juga dapat disesuaikan dengan jenis kapal lain, kata Dhomé, termasuk kapal kontainer, meskipun itu akan memerlukan beberapa perubahan pada cara penanganan kontainer pengiriman.

"Setelah kami membuktikan bahwa hal itu layak secara komersial, saya pikir kami akan berhasil meyakinkan perusahaan pelayaran lain untuk melakukan perubahan serupa," tandasnya. ●





BELAJAR DULU DARI OLIMPIADE TOKYO

Pemerintah memutuskan akan menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada 2-15 Oktober 2021. Ada kesempatan belajar dari penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 23 Juli-8 Agustus nanti.

Olahraga memang tetap perlu meskipun wabah Covid-19 melanda. Namun, olahraga profesional apalagi melibatkan penonton di arena memang masih tanda tanya.

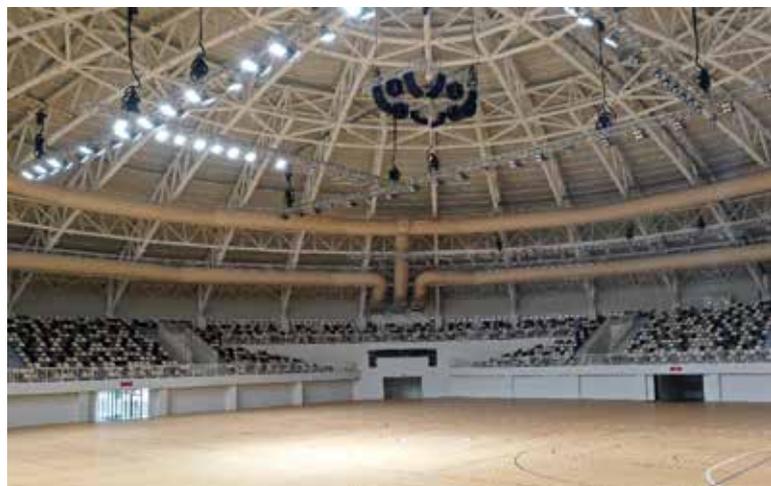
Toh pemerintah memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang semula terjadwal pada akhir 2020 akan berlangsung pada Oktober 2021. Papua tetap akan menjadi tuan rumah, apalagi sarana dan prasarana fisiknya

memang sudah berjalan dan siap 90 persen pada akhir 2020 lalu. Beriringan dengan PON XX 2021, menurut rencana, akan berlangsung Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI, yang melibatkan para atlet penyandang disabilitas pada 17-28 November 2021.

Nah, menjelang tutup tahun 2020 lalu, misalnya, Ketua Harian Panitia Besar PON XX Papua, Yunus Wonda, mengemukakan, persiapan penyelenggaraan event olahraga terbe-

sar nasional lima tahunan itu sudah hampir rampung. "Sudah 90 persen," kata Yunus Wonda yang dikutip laman resmi PON XX, Minggu, 28 Desember 2020.

Hingga akhir 2021 Pemerintah Provinsi Papua telah membelanjakan dana APBD lebih dari Rp3,8 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue yang bakal digunakan untuk PON 2021. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari lima tahun anggaran,



yakni 2016 sebesar Rp228,6 miliar, 2017 sebesar Rp447,2 miliar, Rp879,3 miliar pada 2018, Rp2,2 triliun pada 2019, dan Rp2 triliun dalam APBD 2020.

Selain dari dana APBD, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp2,3 triliun untuk mendukung proses pembangunan venue PON Papua. PB PON, lanjut Yunus, masih terus melakukan pengadaan peralatan yang diprediksikan proses lelangnya tuntas, sehingga peralatan sudah bisa tiba di Jayapura awal 2021.

"Kalau dilihat dari sisi administrasi kita sudah ada pada posisi 75 persen untuk kesiapan penyelenggaraan PON, saya yakin dan optimis tahun 2021 Papua sudah sangat siap, walaupun saat ini masih ada wabah virus corona, Papua pasti siap mensukseskan PON di Bumi Cenderawasih," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan venue sebagai pusat kegiatan pembukaan dan penutupan acara juga sudah hampir rampung. Pada akhir 2021 itu juga

rencana pelaksanaan pesta olahraga nasional berlangsung pada 2-15 Oktober 2021 sudah beredar luas.

Nah, kepastian penyelenggaraan PON XX itu semakin jelas dalam rapat terbatas persiapan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI pada Senin, 15 Maret 2021, di Istana Merdeka, Jakarta. "Pak Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa prinsipnya semua sudah siap, maka pelaksanaan PON XX itu pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021," ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden selepas rapat terbatas.

Penundaan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas di Papua pada 2020 diputuskan dalam Rapat Terbatas Kabinet Presiden Jokowi pada 23 April 2020. Semula pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober sampai 2 November 2020. Namun, apa daya, pandemi global Covid-19 yang menjangkau Indonesia pada

awal Maret 2020 memaksa pemerintah memprioritaskan upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi lebih dulu.

Rapat terbatas pada April 2020 itu juga menjadwalkan ulang PON XX menjadi 2-15 Oktober 2021. Berkaitan dengan itu, pemerintah akan segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk memastikan bahwa PON XX (dan Peparnas XVI) (dapat berjalan dengan lancar dan aman bagi para atlet, penyelenggara, dan masyarakat setempat. Salah satu yang akan dipersiapkan adalah vaksinasi bagi keseluruhan kontingen atlet dan perangkat penyelenggara dari seluruh provinsi.

Di Jayapura, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, sebagai tuan rumah, Pemprov telah melakukan persiapan, baik sarana dan prasarana pertandingan maupun persiapan penyelenggaraan. "Kini telah dibangun dan disiapkan 37 venue untuk 37 cabang olahraga, baik yang dibangun dengan dana APBN, APBD provinsi maupun dengan dana APBD kabupat-

• INFO SPORT

en, seluruh venue yang dibangun dengan dana APBD provinsi telah selesai dan telah kami resmikan pada Oktober 2020,” ungkapnya.

Menurut Lukas, PB PON sebagai penyelenggara juga terus melakukan persiapan dengan mengacu jadwal pelaksanaan pada Oktober 2021, baik persiapan upacara pembukaan maupun penutupan. “PB PON juga menyiapkan kedatangan dan kepulangan kontingen, jadwal pertandingan, akomodasi, konsumsi, keamanan, distribusi atlet, ofisial dan panpel dan seluruh kebutuhan dalam rangka kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan PON XX,” ujarnya.

Untuk Peparnas XVI, Lukas menjelaskan persiapan pelaksanaannya juga terus berlanjut. “Panitia Besar Pekan Paralimpik Nasional XVI telah menjadwalkan

dan keselamatan atlet serta perangkat penyelenggara menjadi perhatian serius bagi pemerintah terlebih dalam kondisi wabah Covid-19 yang masih membayangi semua sektor kehidupan tanpa kecuali olahraga.

Dengan memperhatikan uraian Gubernur Papua dan masukan dari stakeholder olahraga, Presiden Jokowi memutuskan bahwa PON XX dan Peparnas XVI tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pemerintah juga memperhatikan kaitan pesta olahraga ini dengan vaksinasi Covid-19, dan Presiden Jokowi memerintahkan untuk pelaksanaannya bagi seluruh kontingen, ofisial, perangkat pertandingan, panitia pelaksana serta seluruh pendukung terlaksananya PON XX dan Peparnas XVI serta masyarakat sekitar.

ari 2021 lalu, Menpora mengatakan bahwa pihaknya optimistik bahwa program vaksinasi bagi keikutsertaan dalam PON dan Peparnas tersebut akan berlangsung dengan lancar.

Selain itu, Menpora melanjutkan, untuk meningkatkan aspek pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, pemerintah juga akan berkaca pada penyelenggaraan Olimpiade Tokyo yang akan digelar pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021 setelah sebelumnya juga telah mengalami penundaan.

“Kita belajar dari Olimpiade Tokyo yang nanti akan dilakukan beberapa bulan ke depan. Kita akan lihat di situ penerapannya seperti apa. Protokol kesehatan (prokes) tentu menjadi bagian penting karena harus dilakukan dengan disiplin,” tukasnya.



kan Upacara Pembukaan pada 17 November dan Upacara Penutupan pada 28 November 2021 dengan cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 12 cabang,” katanya lagi.

Sedangkan Presiden Joko Widodo meminta para pemangku kepentingan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI merencanakan dengan rinci dua perhelatan olahraga besar di Provinsi Papua itu. Aspek keamanan

“Arahan Bapak Presiden, seluruh kontingen akan divaksin baik atlet, pelatih, ofisial, maupun tenaga pendukung. Bahkan Bapak Presiden mengarahkan masyarakat di sekitar venue itu harus divaksin untuk memastikan bahwa pada saat bulan Oktober nanti mereka sudah tervaksin semua,” tutur Menpora Zainudin.

Melihat perjalanan kegiatan vaksinasi yang telah dimulai sejak 13 Janu-

Harap maklum, PON adalah event sangat penting sebagai tolok-ukur atau parameter kesuksesan pembinaan untuk menciptakan prestasi olahraga dari pelosok daerah hingga ke pentas nasional. Dari pentas nasional itu diharapkan muncul atlet-atlet berprestasi yang sanggup bersaing dan mengukir prestasi di tingkat regional semisal pekan olahraga Asia Tenggara (SEA Games) dan global sekelas Olimpiade. ●



PASCA PANDEMI DAN DBON

Selain membahas penyelenggaraan PON XX dan Pemasaran XVI, Rapat Terbatas di bidang olahraga yang berlangsung di Istana itu juga ternyata mengkaji agenda yang tak kalah penting: Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak beberapa waktu terakhir mempersiapkan DBO itu. Desain tersebut akan menyediakan panduan perencanaan di bidang olahraga mulai dari hulu hingga hilir yang ditujukan untuk peningkatan prestasi olahraga nasional di kancah dunia.

Penyusunan DBO berlatar belakang arahan Presiden Joko Widodo yang pada Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-37 pada September 2020 lalu yang meminta kajian total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. "Usia negeri ini sudah (menjelang) 76 tahun, tapi kita belum mempunyai Desain Besar. Bapak Presiden meminta kepada kami untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional, penggunaan big data, dan menjadikan sport science sebagai unsur utama di dalam pembinaan olahraga nasional," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dalam keterangannya di Kantor Presiden selepas rapat terbatas yang berlangsung pada Senin 15 Maret 2020.

Menpora Zainudin pun berkesempatan mempresentasikan Desain Besar Olahraga Nasional tersebut. Sejumlah pihak berkepentingan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI), perguruan tinggi, akademisi, hingga praktisi olahraga telah dilibatkan dalam penyusunan desain. Bersama mereka, Kemenpora melakukan uji publik desain keolahragaan nasional dan memperoleh masukan-masukan yang digunakan selama proses pengembangan desain.

"Pada intinya Desain Besar ini diterima. Tentu ada tambahan di sana-sini, ada masukan dari beberapa menteri yang hadir. Ini akan kami jadikan bahan untuk melengkapi lagi," ujar

Pak Menteri yang berasal dari Partai Golkar ini.

Desain Besar tersebut berbicara dari sumber potensi talenta, yakni para siswa dari tingkat SMP, hingga pelatihan yang bertujuan untuk membentuk atlet-atlet nasional yang tangguh. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenpora berencana untuk membangun 10 sentra pemusatan latihan di sejumlah daerah. "Sentra-sentra ini akan berisi anak-anak kita yang potensinya sudah terseleksi di usia SMP.

Selanjutnya di usia SMA kita akan dorong ke Cibubur, tempat SKO (Sekolah Khusus Olahraga) kita sekarang," kata Zainudin. "Kami juga sedang mempertimbangkan untuk menjadikan Hambalang sebagai tempat untuk sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bertanding," sambungnya.

Menpora menegaskan, pembinaan tersebut merupakan sebuah rangkaian panjang yang menurut para pakar membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun atau kira-kira 10 ribu jam untuk dapat mencapai prestasi yang membanggakan. Desain Besar ini juga menargetkan agar atlet-atlet Indonesia pada tahun 2032 mendatang mampu bersaing dengan atlet-atlet negara lain dalam penyelenggaraan olimpiade dan paralimpiade di tahun tersebut.

Sekadar info, saat ini Indonesia tengah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade 2032 mendatang. Masyarakat Indonesia tentunya tidak hanya ingin terpilih menjadi tuan rumah, tapi juga mampu menunjukkan prestasi olahraga di ajang tersebut.

"Desain Besar ini akan kita dorong karena ini adalah perencanaan tentang prestasi olahraga nasional kita yang jangka panjang dan terdesain dengan bagus. Tidak ada prestasi yang kita dapatkan by accident, prestasi harus kita dapatkan dengan by design," tandasnya.

Harap diingat DBO dan pandemi Covid-19 saling bertalian. Antisipasi terhadap new normal dalam olahraga pasca wabah sangat mungkin mengalami pergeseran. Jadi, sudah seharusnya soal itu ikut menjadi pertimbangan. ●



KEROYOKAN MEMULIHKAN PARIWISATA

Fokus utama pemulihan pariwisata mancanegara di Indonesia adalah meyakinkan para pelancong bahwa Indonesia sehat dan aman setelah setahun pandemi Covid-19. Insentif bisnis dari sisi permintaan dan penawaran pun melengkapinya.

Kepri di barat dan Bali di timur pertama kali. Dua provinsi itu menjadi target awal pemulihan pariwisata Indonesia setelah setahun pandemi Covid-19 menjangkau negeri ini. Malah Presiden Jokowi sudah mengunjungi Bali untuk menyaksikan program vaksinasi Covid-19 termasuk bagi para pelaku pariwisata di sana.

Sedangkan di Kepri, Kepulauan Riau, khususnya kawasan wisata Lagoi di Pulau Bintan dan Nongsa di Pulau Batam, menyiapkan kawasannya untuk dapat menerima wisatawan mancanegara, terutama dari Singapura yang dapat menjangkau dengan perjalanan speed boat setengah jam

saja. "Kami kerap berkomunikasi dengan pemerintah Singapura. Termasuk mendapat dukungan dari pemerintah pusat, yang juga melakukan perbincangan secara G to G (government to government)," kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Sabtu, 13 Maret 2021.

Lagoi dan Nongsa memang akan menjadi titik awal masuknya wisatawan mancanegara di Kepri. Kedua kawasan itu dianggap sudah siap menyambut turis asing dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Terlebih, kata Ansar, mulai pekan ketiga Maret 2021, para pelaku

pariwisata mulai divaksin bertahap bersama sejumlah masyarakat setempat untuk mendukung kesiapan kawasan itu menerima turis asing. "Ini semua dalam upaya reaktivasi sektor pariwisata," ujarnya.

Pejabat Singapura pun menyambut baik persiapan Lagoi dan Nongsa. "Ini adalah penancangan (rencana) yang baik bagaimana kita boleh memulainya semua perjalanan antara rakyat Singapura ke Kepri khususnya dengan travel bubble," kata Second Minister for Education & Foreign Affairs Singapura Mohammed Maliki Osman dalam konferensi melalui video dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Rabu, 17 Maret 2021.

Maliki mengatakan, akan berkomunikasi dengan Singapore Tourism Board. Dengan kebijakan itu, kata Maliki, warga Singapura bisa berwisata ke Indonesia, tapi khusus di kawasan yang ditentukan dalam bubble (lingkungan tertutup yang terbatas

pengunjungnya untuk mencegah penyebaran Covid-19).

Gubernur Ansar Ahmad juga menegaskan, Lagoi dan Nongsa Point Marina akan memiliki akses terbatas untuk masyarakat umum sehingga memungkinkan untuk penerapan travel bubble. "Rencananya pada 21 April kami akan membuka Bintang Lagoi Resort dan Nongsa Point Marina untuk turis Singapura. Tentu dengan kontrol protokol kesehatan yang ketat," kata dia.

Para pelaku wisata dan pihak terkait di dua kawasan itu pun menjalani vaksinasi Covid-19 untuk memastikan keamanan para turis yang datang lewat travel bubble. Sebaliknya, turis asal Singapura diwajibkan tes PCR sebelum datang ke Lagoi dan Nongsa.

Sementara Kepri menerapkan travel bubble, Bali memilih travel corridor arrangement dengan membuka tiga kawasan Free Covid-19 Corridor (FCC). "Ketiga wilayah tersebut adalah Ubud (Kabupaten Gianyar), ITDC, Nusa Dua (Kabupaten Badung) dan Sanur (Kota Denpasar)," kata Gubernur Bali Wayan Koster, Selasa, 9 Maret 2021.

Program FCC merupakan pola baru dalam penanganan perjalanan wisata aman Covid-19, yaitu dengan membentuk zona sehat yang terbebas dari Covid-19, melalui program vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas pada zona atau kawasan tersebut. "Sehingga program Free Covid Corridor ini merupakan pra-kondisi dari tahapan dibukanya pariwisata untuk wisatawan mancanegara," ujar Koster.

Terkait program vaksinasi, Koster mengatakan pihaknya telah mendaftarkan jumlah penduduk yang akan menjadi sasaran vaksinasi. Misalnya di Ubud, Gianyar, terdapat 50.153 orang yang akan disasar menjalani vaksinasi dengan mengambil empat lokasi desa yang terdiri dari Desa Ubud (11.941 orang), Desa Sayan (8.083 orang), Desa Kedewatan (6.923 orang), dan Desa Petulu (5.206 orang), termasuk pekerja sebanyak 18 ribu.

Untuk sasaran vaksinasi Covid-19 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, akan menyasar tiga desa, yakni Jimbaran sebanyak 30.133 orang, Benoa 26.173 orang dan Desa Tanjung Benoa 4.152

orang, termasuk pekerja sebanyak 9.500 orang. Sementara di wilayah Sanur Bali yang menjadi sasaran vaksinasi ialah dari Desa/Kelurahan Sanur sebanyak 10.970 orang, Sanur Kaja 7.944 orang, dan Desa/Kelurahan Sanur Kauh 7.892 orang.

Nah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan rencana FCC tersebut akan memungkinkan kunjungan kembali wisatawan mancanegara yang diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi, terutama bagi daerah yang

wisatawan mancanegara pada pertengahan Juni atau Juli tahun ini dengan berbagai persyaratan," ujarnya, Rabu, 17 Maret 2021.

Persyaratan tersebut antara lain angka Covid-19 yang terkendali dan terus ditekan, peningkatan kepatuhan protokol kesehatan, peningkatan dan penguatan dari testing, tracing and treatment serta vaksinasi di Bali yang ditargetkan mencapai angka dua juta atau lebih pada Juli. Sebagai perbandingan, total warga lokal Bali menurut Sensus Penduduk 2020 per Septem-



bergantung pada sektor pariwisata. "Ini adalah bentuk komitmen kami dari Kemenparekraf untuk menindaklanjuti guidance yang disampaikan oleh Presiden kemarin, yaitu bagaimana Bali bisa menyiapkan pembukaan bagi

ber 2020 tercatat 4,32 juta. Jadi, sekitar separuh penduduk Bali akan menjadi target vaksinasi demi pemulihan pariwisata.

Penetapan zona tersebut bertujuan membentuk zona berpola hidup

• INFO WISATA

sehat dan menerapkan standard protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari tahapan-tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata apabila situasi pandemi telah terkendali.

Menteri Sandi juga mengungkapkan kementeriaannya sedang dalam tahap finalisasi rencana pembukaan tiga kawasan wisata yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung itu sebagai zona hijau bebas Covid-19 tersebut.



"Ini akan kita monitor dan evaluasi setiap dua minggu dan akan kami lakukan langkah koordinasi untuk dilaporkan kepada Presiden untuk segera dirataskan (rapat terbatas) dan diambil keputusannya," kata dia.

Evaluasi tersebut mulai dari angka vaksinasi yang terus ditingkatkan, monitoring kepatuhan protokol kesehatan serta kesiapan dari kementerian/lembaga dalam mendukung rencana ini. Seperti persiapan e-Visa dari pihak imigrasi, kesiapan bandara yang disiapkan Kementerian BUMN, peningkatan laboratorium PCR dan

lain sebagainya.

"Uji coba kita akan lakukan secepatnya. Tentunya sesuai arahan Presiden di bulan Juni-Juli, kita punya waktu sekitar tiga bulan untuk persiapan, tentu harus ada simulasi dan mungkin ada trial atau pilot project. Mungkin akan ada charter flight dan kita pantau betul," kata Sandiaga.

Menurut dia, setelah ada evaluasi, terbuka kemungkinan untuk memperluas penerapan kebijakan itu.

"Kalau proof of concept-nya itu bisa kita dapatkan, kita bisa perluas nanti baik wilayah originasi (asal) daripada wisatawan maupun destinasi (tujuan) wisatanya juga," kata Sandi.

Terkait dengan itu, Menteri Sandi

juga ingin wisatawan mancanegara menjadikan Bali sebagai rumah kedua mereka. Tentu dengan memperhatikan legalitas izin tinggal, Sandiaga mengatakan tengah merumuskan rencana long term visa bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Jika usulan long term visa disetujui, wisatawan asing dapat tinggal di Indonesia dalam tempo lima tahun dan dapat diperpanjang. "Long term visa menjadi prasyarat utama agar lebih banyak masyarakat dunia digital nomad mempertimbangkan Bali sebagai

rumah kedua," kata Sandi.

Selama pandemi Covid-19, menurut dia, masyarakat lebih banyak bekerja lewat daring. Artinya, mereka bisa bekerja di mana saja asalkan terkoneksi dengan layanan internet yang mumpuni. Dan Bali, menurut Sandiaga, memiliki infrastruktur telekomunikasi yang bagus, fasilitas memadai untuk wisatawan mancanegara, dan popularitasnya mendunia.

Tren bekerja di masa pandemi Covid-19 adalah digital nomad staycation. Sandiaga Uno membayangkan wisatawan asing itu tetap dapat bekerja sambil mendapatkan pemandangan alam yang indah, dan pelayanan terbaik. "Kalau bekerja di Bali dan tidak jauh dari pantai, ini akan menjadi daya tarik buat wisatawan," katanya. "Ditunjang dengan budaya dan masyarakat yang sangat ramah."

Sandiaga Uno menambahkan, usulan long term visa harus sejalan dengan rencana pembukaan kembali Bali lewat konsep travel bubble, dan program staycation (tinggal, berlibur namun bisa bekerja). Dengan begitu, usaha pariwisata di Bali perlahan pulih kembali. "Ini adalah afirmasi bahwa Bali segera bergerak dan bangkit," katanya.

Apabila tiga rencana tadi berjalan mulus, Sandiaga Uno menambahkan, bukan cuma usaha pariwisata yang bakal tumbuh, melainkan juga industri properti di Bali. Lapangan pekerjaan juga terbuka.

Terkait target negara dalam penerapan travel corridor arrangement, bubble, staycation, hingga visa jangka panjang, Sandi mengatakan penentuannya akan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Di antaranya negara yang tingkat vaksinasinya tinggi, penerapan protokol kesehatan ketat dan asas resiprokal dan faktor-faktor lainnya.

"Yang sudah disebut ada beberapa negara seperti Belanda, Tiongkok, Uni Emirat Arab atau negara Timor Tengah lainnya dan Singapura. Tapi finalisasinya tergantung dari travel corridor arrangement dari masing-masing negara," kata Sandiaga.

Australia jangan lupa. Yang selama ini staycation banyak juga dari sana. ●

REKOMENDASI KOMITE KRISIS PARIWISATA GLOBAL

Komite Krisis Pariwisata Global bertemu untuk pertama kalinya pada 2021 sekaligus menyampaikan rekomendasinya. Diorganisir oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), komite yang merupakan badan lintas sektor itu bertemu di Madrid, Spanyol, markas UNWTO, siring sesi Sidang ke-113 Dewan Eksekutif UNWTO pada 18-19 Januari 2021 lalu.

Agenda Komite Krisis ini bertujuan mengajukan rencana solid pendahuluan untuk memulai kembali pariwisata global. Fokusnya, integrasi vaksin sebagai pendekatan harmonis untuk perjalanan yang aman sekaligus meluncurkan upaya terkoordinasi dalam meningkatkan kepercayaan sektor pariwisata secara global. Sekretaris jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili mengatakan, pelaksanaan vaksin merupakan langkah ke arah yang benar. "Tetapi dimulainya kembali pariwisata tidak bisa menunggu. Vaksin harus menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas dan terkoordinasi yang mencakup sertifikat dan tiket masuk untuk perjalanan lintas batas yang aman," kata dia.

Dalam jangka panjang, kita juga perlu mengembalikan kepercayaan pada pariwisata. "Kampanye United for Travel akan membantu kami mencapai hal ini, memberikan pesan yang jelas dan kuat bahwa pariwisata yang aman sudah memungkinkan sekarang ini," sambung Sekjen asal Georgia itu.

Para anggota juga menyoroti pentingnya meningkatkan koordinasi dalam kerangka ketentuan kesehatan internasional (IHR), mengenai sertifikat vaksinasi digital untuk memastikan penerapan prinsip, protokol, dan dokumen perjalanan bersama dan selaras. Ini sejalan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang telah menyarankan penerapan potensi teknologi digital untuk memungkinkan perjalanan internasional yang aman dan memfasilitasi kedatangan maupun keberangkatan.

Selain itu, para anggota Komite menyerukan dukungan bagi standarisasi, digitalisasi, dan interoperabilitas

(pelaksanaan bersama) protokol pengujian dan sistem sertifikasi bebas Covid-19. Para anggota Komite setuju bahwa protokol pengujian dan sertifikat kesehatan dan indikator penilaian risiko untuk negara atau wilayah asal dan tujuan harus berdasarkan bukti yang disepakati bersama.

Pelaksanaan Panduan Lepas Landas Pesawat oleh Satgas Dewan Pemulihan Penerbangan (CART) yang dikembangkan oleh ICAO, diidentifikasi sebagai alat efektif untuk memajukan harmonisasi protokol pengujian. Komite menilai CART juga dapat mempercepat pembentukan Koridor Kesehatan Masyarakat (Public Health Corridor) dalam kerangka pariwisata global.

Turut berbicara dalam pertemuan



Komite Krisis ini antara lain Wakil Presiden Komisi Eropa Margaritis Schinas, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría, dan para menteri pariwisata dari negara anggota UNWTO serta perwakilan terkemuka dari sektor pariwisata penerbangan sipil dan pelayaran. Tentu saja Sekjen International Civil Aviation Organization (ICAO) Fang Liu dan Sekjen International Maritime Organization (IMO) Kitack Lim.

Pada akhir pertemuan, Komite Krisis menyerukan:

1. Peningkatan koordinasi, dalam kerangka Peraturan Kesehatan Internasional, sertifikat vaksinasi untuk memastikan pemantauan,

definisi, dan implementasi yang tepat waktu dari prinsip, protokol, dan dokumen digital terkait perjalanan yang diselenggarakan.

2. Mendukung standarisasi, digitalisasi dan interoperabilitas protokol pengujian dan sistem sertifikasi, berdasarkan bukti yang disepakati bersama dan indikator penilaian risiko untuk negara/wilayah asal dan tujuan.
3. Dukungan inisiatif Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk pengembangan dan koordinasi sistem yang harmonis di semua negara untuk membuka perbatasan secara aman dalam koordinasi dengan Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), Organisasi Penerbangan Sipil Interna-

sional (ICAO), Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

4. Implementasi Panduan Take-off ICAO CART, termasuk pedoman tentang Pengujian dan Tindakan Manajemen Risiko Lintas Batas dan pembentukan Koridor Kesehatan Masyarakat, untuk memajukan harmonisasi persyaratan protokol pengujian.
5. Negara-negara (terkait pariwisata) harus memastikan bahwa tindakan yang mempengaruhi lalu lintas internasional berbasis risiko, berbasis bukti, koheren, proporsional, dan terbatas waktu. ●



JANJI-JANJI AIRLANGGA UNTUK SEKTOR PARIWISATA

Kesan keroyokan memulihkan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional semakin kental dengan rencana yang datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Harap maklum Menteri Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Komite PC PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional).

Nah, Menko Airlangga mengemukakan, pemerintah telah menyiapkan program paket insentif untuk sektor jasa pariwisata wisata. Strateginya, dia bilang, sudah masuk tahap pembahasan akhir alias finalisasi.

"Yang sedang dalam pembahasan yaitu mendukung pembiayaan dari segi supply (penawaran). Jadi penyediaan modal kerja sedang kita bahas," ujar Airlangga dalam pembukaan Rakernas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Kamis, 18 Maret 2021. Namun sisi permintaan (demand) juga agar seimbang.

"Dari demand side kita akan terus mendorong perbaikan dari sisi program vaskinasi. Program vaskinasi diarahkan Bapak Presiden per Juni-Juli sudah 70 juta target yang sudah tervaksinasi," sambungnya.

Hingga kini, Airlangga melihat

program penerapan protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah daerah yang memiliki destinasi wisata andalan seperti di Pulau Bintan telah baik setelah setahun bersama pandemi Covid-19.

"Ini diharapkan bisa terus ditingkatkan. Dan kita berharap sektor pariwisata bisa pulih, karena ini masuk ke kebijakan-kebijakan baik ke pemulihan ekonomi maupun kebijakan strategis APBN dengan anggaran sebesar Rp 14,2 triliun," papar Airlangga.

Malah Mantan Menteri Perindustrian ini menyebutkan beberapa daerah selain Bali dan Kepri yang juga akan mendapat dorongan insentif. Antara lain kawasan Danau Toba, Sumatera Utara; Borobudur, Jawa tengah; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; juga Likupang, Sulawesi Utara. Ini terkait dengan realisasi rencana pengembangan sektor pariwisata yang sudah

masuk ke dalam program strategis nasional yang tetap akan berjalan.

"Dan proyek tersebut sudah masuk Perpres 109/2020 tentang percepatan proyek nasional. Penunjang kawasan ekonomi khusus juga di beberapa tempat, seperti Likupang, Morotai, Mandalika, Singasari, Tanjung Sari, Tanjung Kelayang, dan ini seluruh fasilitasnya diberikan," paparnya.

Karena itu, di dalam kesempatan Rakernas PHRI Airlangga berharap ekosistem bisnis hotel dan restoran serta penunjangnya ini bisa memantapkan solusi praktis yang disiapkan pemerintah, agar sektor pariwisata bisa segera pulih. "Tentu kita minta dari PHRI memberikan masukan-masukan yang konkret dan akuntabel. Oleh karena itu Pak Hariyadi (Ketua PHRI Hariyadi B Sukamdani) bisa segera duduk dengan para anggotanya dan keluar dengan solusi yang tadi sudah

ditawarkan," tuturnya.

"Dan supaya dimatangkan, sehingga ini menjadi keputusan Rakernas. Dan pemerintah bisa menindaklanjuti," demikian Airlangga Hartarto.

Selain insentif berupa modal kerja dan vaksinasi bagi para pelaku pariwisata, Menko Airlangga juga menyebutkan soal stimulus antara lain program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Tahun lalu, kata Airlangga, serapan hibah mencapai 70 persen untuk hotel dan restoran.

Pada 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN 2021 tercatat sebesar Rp 3,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan tahun lalu, misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan KUR Pariwisata.

Sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengemukakan pada 2021 ini hibah pariwisata akan bisa menjangkau lebih banyak penerima. "Tahun lalu 2020 ada sebanyak 6.818 hotel dan 7.625 restoran yang mendapatkan dana hibah pariwisata ini. Pada tahun 2021 akan kita tingkatkan, lanjutkan, dan perluas untuk meningkatkan resiliensi dan ketahanan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19," ungkap Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran menyambut baik janji-janji dari Menko Airlangga maupun Menteri Sandi. "Justru kami (sudah) mengusulkan karena situasi saat ini sudah masuk dalam situasi kritis untuk bisa bertahan di pandemi," kata pengusaha jaringan hotel Hang Tuah ini.

Apalagi menurutnya, pada awal tahun ini justru industri pariwisata memasuki low season, saat masyarakat justru tidak berwisata. Ditambah lagi, pemerintah juga baru saja memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

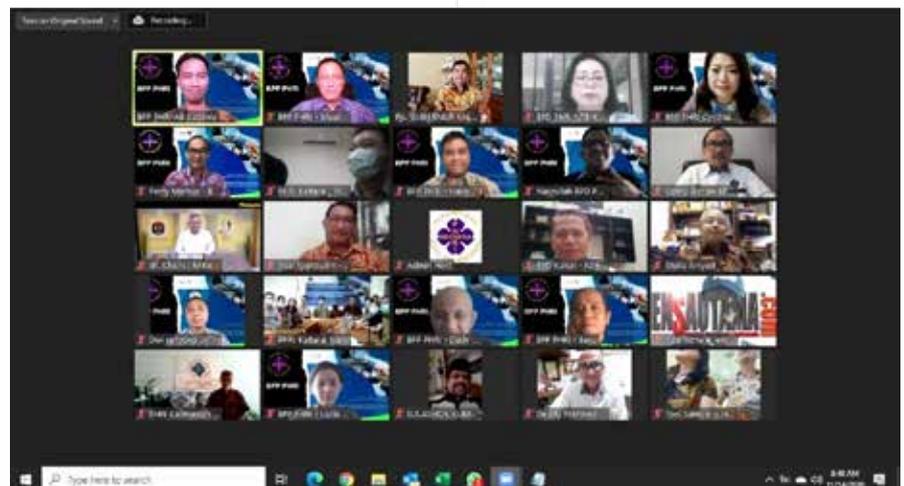
Maulana menambahkan, stimulus-stimulus yang diharapkan dapat

segera direalisasikan selain bantuan dana hibah ke sektor pariwisata, adalah pemberian modal kerja pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), pemberian bantuan langsung tunai terhadap karyawan di sektor pariwisata, bantuan listrik atau subsidi PLN, hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh 25) dan pembebasan tarif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM.

Ia berharap, insentif-insentif pajak yang pernah diberikan pada 2020 diharapkan bisa dilanjutkan lagi di tahun

sulit untuk bertahan di situasi pandemi saat ini. "Kalau bicara sektor pariwisata ini adalah sektor usaha yang membutuhkan pergerakan manusia. Sedangkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini kan perlu pembatasan pergerakan manusia," tandasnya.

Sedangkan Ketua Umum PHRI Hariyadi B Sukamdani yang dikenal dengan jaringan hotel Sahid Group mengakui bahwa anjloknya kedatangan pelancong mancanegara akibat pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap hunian hotel. "PHRI



ini. Sebab, ia memastikan bahwa saat ini sektor pariwisata telah memasuki situasi yang kritis. "Saya kira juga perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan sampai dana hibah diberikan tapi pemda justru menarik pajak-pajak. Sehingga jadinya malah sama saja dana hibah diberikan atau tidak," ungkapnya.

Menurut Maulana, pariwisata adalah salah satu sektor yang paling

memang mencatat perkembangan negatif ini," ungkapnya

Dia bilang, data PHRI menunjukkan penurunan tingkat hunian sepanjang 2020 turun hingga 40-80 persen bervariasi antardaerah destinasi dibandingkan setahun sebelumnya. Menurut dia, destinasi dan hotel di Kepri, Bali, juga Makassar dan Manado di Sulawesi mencatat penurunan tingkat hunian yang tajam itu. ●



DERETAN PESOHOR DENGAN ASET WISATA DI BALI

Bali menjadi destinasi wisata yang menjadi salah satu fokus utama pemulihan pariwisata setelah setahun pandemi Covid-19 menjangkau Indonesia. Antara dengan membuka zona hijau bebas Covid-19 di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. Tujuannya, tentu saja agar bisnis hotel dan villa yang kerap disewa oleh pelancong ramai lagi sehingga ekonomi Bali yang sangat tergantung pada kunjungan wisatawan pulih kembali.

Sejumlah pesohor ternyata memiliki destinasi wisata baik hotel maupun villa yang dapat disewa para pelancong. Mudah-mudahan bisnis mereka juga bertahan dan maju dengan upaya membuka

Bali untuk wisatawan secara bertahap, dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Berikut beberapa



pesohor dan aset pariwisatanya di Pulau Bali.

Thomas Djorghi

Pedangdut Thomas Djorghi me-

miliki hotel di Bali bernama The Grey Boutique. Hotel tersebut berada di Kawasan Seminyak, Bali. Hotel milik Thomas Djorghi ini memiliki desain yang unik dan instagramable sehingga banyak sekali sudut menarik yang bisa dijadikan tempat berfoto. Sesuai dengan namanya, hotel Thomas Djorghi didominasi warna abu-abu dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, tempat fitness, restoran dan fasilitas lain untuk para pelancong.

Tamara Bleszynski

Tamara Bleszynski diketahui memiliki villa mewah di Bali. Vakum dari dunia hiburan, ia memutuskan tinggal di Bali. Villa milik Tamara dike-



tahui berada di kawasan Canggu, Bali. Properti itu terdiri dari bangunan dua lantai yang mengusung konsep ramah lingkungan. Maka tak heran di dalamnya dipenuhi banyak pepohonan dan membuatnya tampak asri. Selain itu ada juga kolam renang. Tamara juga membuka usaha kuliner di villanya.

Christian Sugiono dan Titi Kamal

Christian Sugiono dan Titi Kamal merupakan pasangan pesohor yang merambah bisnis properti hingga ke Bali. Pasangan ini memiliki beberapa villa mewah kelolaannya yang tersebar di sejumlah lokasi. Antara



lain Villa Juna Bali, Villa De Sugi dan Villa Kamalia. Ketiga villa ini terbilang cukup mewah. Selain karena desain



bangunannya, juga fasilitas yang ada di dalamnya, salah satunya kolam renang pribadi.

Anang Hermansyah dan Ashanty

Selain Titi Kamal dan Christian Sugiono, Salah satu pasangan selebriti lain yang memilih untuk berinvestasi pada properti ialah Anang Hermansyah dan Ashanty. Pasangan ini juga memiliki villa di Bali. Villa milik pasangan selebriti ini juga termasuk mewah dengan didominasi warna putih dan abu-abu. Bagian rooftop (puncak atap) villa tersebut menghadap langsung pada patung Garuda Wisnu Kencana (GWK).

Jessica Iskandar

Artis cantik Jessica Iskandar juga

memiliki villa mewah yang diberi nama Villa Jedar, singkatan namanya. Villa Jedar berada di daerah Seminyak, Bali dengan mengusung konsep minimalis namun tetap mengedepankan kemewahan. Villa ini memiliki pemandangan yang indah dan tempat yang instagramable. Villa tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah seperti bathtub

dan kolam renang. Biaya sewa villa tersebut diketahui mulai dari Rp 1,5 juta.

Ada pula celeb lain yang memiliki properti wisata. Namun, bukan di Bali. Sebut saja misalnya Ayu Ting Ting di Puncak, Inul Daratista, di Pasuruan, dan Nadine Chandrawinata di Raja Ampat, Papua Barat. Lain kali kita bahas juga. ●





IHWAL HARTA KARUN YANG TIMBUL TENGGELAM

Secara umum perhatian dan kebijakan tentang harta karun di dalam negeri timbul-tenggelam, terutama yang berada di dasar lautan. Mengapa timbul-tenggelam? Banyak penjelasannya.

Ihwaharta karun di dasar lautan Indonesia menjadi perhatian lagi sejak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadiala mengumumkan pembukaan kembali investasi mencari harta karun bawah laut atau benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. "Dibuka pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam, jadi kalau mau cari harta karun di laut bisalah kau turun. Syarat dan izinnya datang ke kita untuk bisa mendapatkan itu," ungkap Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa, 2 Maret 2021.

Nah, kebijakan itu langsung mendapat tanggapan dari Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Ia menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Joko Widodo ihwal izin pengangkatan harta karun yang istilahnya benda muatan kapal tenggelam (BMKT) ini. Ia

menyarankan agar pemerintah sendiri yang mengangkat harta karun di dasar lautan.

Pemintaan yang sama Susi sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Sakti Wahyu Trenggono. Memang Susi yang saat menjadi menteri memorandum pengangkatan BMKT pada September 2014. Ia juga yang meresmikan galeri BMKT di Kementerian KKP pada 2017 lalu.

"Pak Presiden @jokowi & Pak MenKP @saktitrenggono @kkpgoid, mohon dg segala kerendahan hati utk BMKT dikelola & diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda-benda bersejarah yang seharusnya jadi milik bangsa," kata Susi di akun Twitter-nya @susipudjiastuti, Rabu, 3 Maret 2021.

Semula pengangkatan harta karun dalam bangkai kapal tenggelam di dasar lautan itu berada dalam daftar 20

bidang usaha tertutup bagi investasi sebagaimana Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Namun, daftar negatif investasi pada aturan tersebut menjadi kadaluarsa dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, menjadi hanya enam bidang usaha saja yang tertutup.

Jadi, 14 bidang usaha yang sebelumnya dilarang menjadi terbuka bagi investor. Termasuk di dalamnya bidang usaha pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Minus pencabutan empat bidang usaha terkait investasi minuman beralkohol yang sebelumnya dibuka, total yang dibuka tinggal 11.

Bahlil memastikan pembukaan investasi pada bidang-bidang usaha tersebut tidak akan dilakukan dengan sembarangan. Sebab, ada perizinan dan peraturan ketat yang harus dipenuhi oleh para investor, termasuk urusan investasi harta karun yang istilah resminya adalah barang muatan kapal

tenggelam (BMKT).

"Harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak langsung masuk Online Single Submission (OSS) kemudian izin didapatkan. Tapi harus ada notifikasi dan syarat-syarat itu tidak gampang karena ini bukan barang-barang sembarangan. Semakin bagus barang, semakin syaratnya bagus," kata dia.

Dalam Perpres 10/2020 klasifikasi bidang usaha daftar positif investasi tertuang dalam lampiran I hingga lampiran III. Namun, bidang usaha pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam tidak terdapat dalam ketiga lampiran tersebut.

Toh investor tetap bisa mengajukan izin terkait bidang usaha tersebut. Alasannya, aturan baru memperbolehkan bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi untuk digarap oleh investor asal memenuhi kriterianya. Bunyi Pasal 3 Perpres 10/2021 menyebutkan bidang usaha terbuka bagi penanaman modal meliputi (a) bidang usaha prioritas, (b) bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, dan (c) bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

"Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dapat diusahakan oleh semua penanaman modal," demikian bunyi Pasal 3 ayat 1d dan ayat 2 Perpres 10/2021. Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa penanam modal adalah investor dalam negeri maupun asing yang menaruh dananya untuk melakukan usaha di Indonesia.

Sedangkan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin mengatakan ongkos mahal menjadi alasan utama pemerintah mengeluarkan BMKT dari DNI. Ia menjelaskan, cost atau beban biaya dalam setiap pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) mencapai US\$500 ribu-US\$1 juta. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.271, ongkosnya mencapai Rp7-Rp14 miliar.

Biaya itu hanya untuk satu titik saja, sementara Indonesia, menurut dia, memiliki sekitar 10 ribu titik BMKT. Dari jumlah itu, yang terkonfirmasi baru

464 titik. "Kalau kita pakai uang negara untuk melakukan seperti itu, bisa kita lakukan tapi itu menjadi terlalu mahal," ujarnya, Kamis, 4 Maret 2021.

Safri mengaku belum membaca aturan turunan terkait izin bagi investor asing mencari 'harta karun' di Indonesia. Namun, dari pemahamannya selama membahas draf aturan itu, ia mengatakan pemerintah menyepakati tidak ada benda sejarah yang boleh dilelang atau dijual.

Investor asing hanya diizinkan mencari harta karun di Indonesia. Kemudian, investor diberi hak pakai untuk memamerkan benda temuan untuk periode tertentu sesuai perjanjian sebagai imbal hasil. Setelah masa pakai habis, benda bersejarah harus dikembalikan kepada pemerintah Indonesia.

Dia bilang, sebelum keputusan diam-

Dia mengklaim banyak perusahaan yang berminat mencari BMKT Indonesia bukan bermotivasi ekonomis, namun untuk gengsi semata. "Minat investor banyak yang mendaftar lewat KKP, banyak mau daftar, mau angkat bukan untuk cari duit kok. Cari nama kok, kalau bisa mencari barang unik, rata-rata yang mendaftar perusahaan yang punya duit lebih untuk cari nama," terang dia.

Sedangkan, Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT Indonesia (APPP BMKTI) memperkirakan nilai harta karun RI senilai US\$12,7 miliar. Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara US\$80 ribu hingga US\$18 juta.

Apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata, maka dapat menghasilkan US\$800 hingga US\$126



bil, terjadi diskusi alot untuk mengeluarkan BMKT dari DNI. Keputusan kemudian diambil karena selama 20 tahun terakhir, hasil pengangkatan BMKT oleh pemerintah tidak menggembirakan.

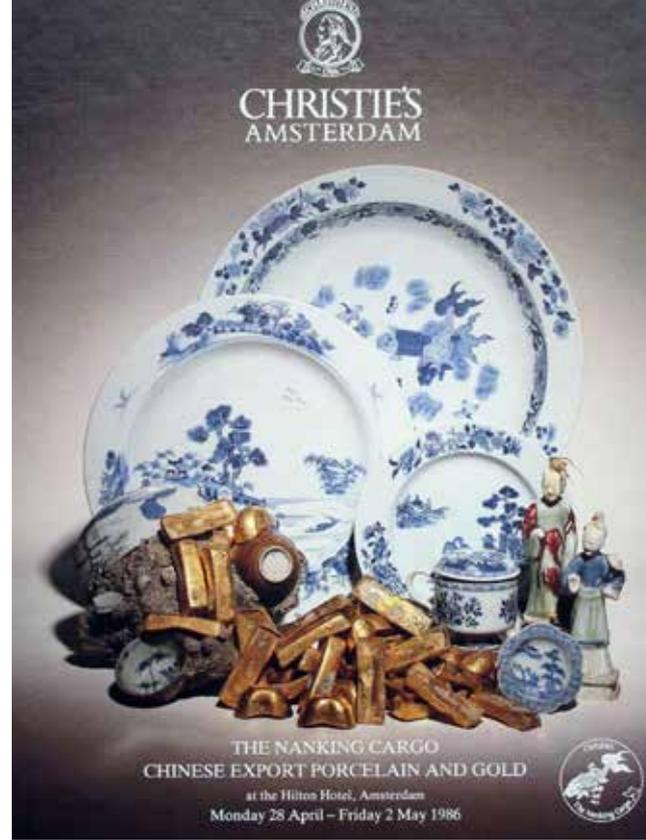
Karena terkendala biaya, pengangkatan BMKT berjalan lambat. Muncul pula kekhawatiran BMKT di bawah laut akan rusak jika tak segera diangkat. Pertimbangan lainnya agar peninggalan sejarah tidak makin banyak yang dicurik oknum.

"Ini bukan masalah teknologi, ini masalah cost. Teknologi kita punya kok, masalahnya untuk mengambil barang seperti itu, survei sampai pengangkatan butuh ongkos besar," ujarnya.

ribu per bulan per lokasi harta karun. "Perkiraan memang besar. Tapi belum banyak termanfaatkan sampai sekarang," ujarnya.

Namun, angka-angka itu sebenarnya hitungan kecil. Sebagai contoh, Singapura pernah membeli harta karun BMKT di perairan Belitung senilai 32 juta dolar AS.

Ringkas cerita, banyak hal masih samar tentang harta karun di dalam laut. Tapi, yang jelas, pembukaan investasi BMKT ini akan menjadi perhatian lebih besar ketika negara menghadapi kesulitan anggaran. Tidak persis, namun mirip keluarga yang sedang mencari peninggalan atau warisan yang dapat dijual. ●



WARISAN USANG PANTANG TERLUPAKAN

Meskipun masih spekulasi, jelas bukan omong kosong. Jumlah bangkai kapal karam yang menjadi harta karun di perairan Indonesia, disebut-sebut termasuk paling banyak di antara negara-negara pesisir lainnya di seluruh dunia.

Di samping wilayah yang 62 persen berupa kawasan maritim, sejarah panjang Nusantara membuatnya menjadi jalur perdagangan maritim yang ramai hingga sekarang. Kajian Djoko Pramono tentang Arkeologi dan Sejarah menunjukkan bukti bahwa bangsa-bangsa di Nusantara sejak zaman prasejarah telah memiliki budaya bahari atau maritim.

Terekam antara lain dalam lukisan perahu layar di gua-gua prasejarah di pulau karang Muna (Sulawesi tenggara), Seram (Maluku), dan Arguni (Fakfak, Papua Barat) yang diperkirakan dibuat pada tahun 10.000 SM. Pada catatan sejarah perkembangan kebudayaan peradaban Nusantara kemudian ditemukan berbagai kerajaan di nusantara yang memiliki nilai dasar budaya bahari, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.

Kerajaan Sriwijaya berkembang

melalui penguasaan jalur politik kerajaan dan jalur perdagangan serta penguasaan wilayah strategis yang dijadikan basis kekuatan maritim. Sedangkan Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya di daerah Tarik, sisi Sungai Brantas, berdekatan dengan pelabuhan laut Canggü (sekarang di timur kota Mojokerto) kemudian berkembang juga sebagai kerajaan maritim.

Saat ini sebagian besar bukti puncak budaya maritim Indonesia masih bertebaran di dasar laut, termasuk kapal karam dan tentu saja kargo barang muatannya. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, setidaknya ada 463 titik lokasi kapal kuno.

Yang teridentifikasi berdasarkan informasi dari sejarawan Cina: Pada abad X-XX sekitar tiga puluh ribu kapal Cina yang berlayar ke wilayah Indonesia tidak pernah kembali ke pelabuhan asalnya; Selanjutnya, arsip di Belanda

menyimpan catatan 245 kapal VOC tenggelam di perairan Indonesia dan sudah tercatat oleh Direktorat Arkeologi Bawah Air. Data tersebut harus dapat diverifikasi dengan melakukan survei dan pemetaan lapangan yang dilakukan oleh staf yang profesional di bidang arkeologi bawah air.

Nah, peninggalan kapal laut selama kurun waktu dua milenium itulah yang membuktikan keramaian lalu-lintas pelayaran intraregional kapal lokal dan asing yang menggunakan jalur laut di perairan Indonesia yang kini memiliki 81 ribu kilometer persegi kawasan pesisir dengan lebih dari 17.500 pulau. Di masa lalu, kapal-kapal itu berlayar antara Cina, India, Afrika, dan Asia Barat.

Armada pelayaran ini membawa rempah-rempah dan hasil hutan dari Asia Tenggara yang dipertukarkan dengan produk seperti emas, keramik mengkilat, dan barang mewah lainnya sepanjang jalur dan pelabuhan-

pelabuhan persinggahan, jauh sebelum bangsa-bangsa dari benua Eropa menjangkaunya.

Orang-orang Eropa baru memasuki perdagangan laut Asia pada Abad XVI, pertengahan milenium kedua. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) asal Belanda, korporasi pertama yang menjual sahamnya kepada publik, menyediakan pasar Eropa dengan porselen, teh dan rempah-rempah, setelah Cina mendominasi pengiriman di Asia Tenggara selama berabad-abad. Jadi, situs sejarah dan arkeologi bangkai kapal-kapal yang tenggelam di perairan nusantara menjadi semacam penanda garis waktu yang akurat mengenai informasi masa lalu.

Pengembangan survei penginderaan jauh laut dan teknologi penyelaman selama setengah abad terakhir secara bertahap membuka penemuan dan kemungkinan investigasi dari bangkai kapal karam yang sebelumnya tidak diketahui. Material budaya, sejarah, atau arkeologi yang signifikan mulai ditemukan, terhimpun bersama di bawah frasa internasional "underwater cultural heritage" atau warisan budaya bawah air sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 (1) (a) Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air 2001. Sedangkan bangkai kapal karam secara umum menjadi perhatian utama dalam wacana warisan budaya dan arkeologi maritim itu.

Lantas kalangan akademisi dan intelektual mulai menyadari pentingnya warisan budaya itu di Indonesia sejak pertengahan dasawarsa 1980-an. Menurut kajian pakar antropologi Jerman Dr Mai Lin Tjoa-Bonatz, setidaknya ada tiga pemangku kepentingan utama yang memiliki perspektif berbeda mengenai harta karun di bangkai-bangkai kapal karam itu. Pertama, para akademisi dan intelektual di bidang arkeologi dan kurator yang prihatin terhadap etika dan praktik pengangkatan harta karun dan kapal-kapal kuno itu serta pameran-pamerannya di museum.

Kedua, kalangan profesional dan pemerintah yang lebih menguasai manajemen isu. Ketiga, kalangan

praktisi hukum yang lebih melihat sisi legal mengenai hak kepemilikan kapal-kapal karam dan muatannya itu. Tjoa-Bonatz juga mencatat kurangnya perhatian kalangan antropologi khususnya perspektif etnografi yang mendalam mengenai peninggalan kapal-kapal kuno dan harta karun di dalamnya.

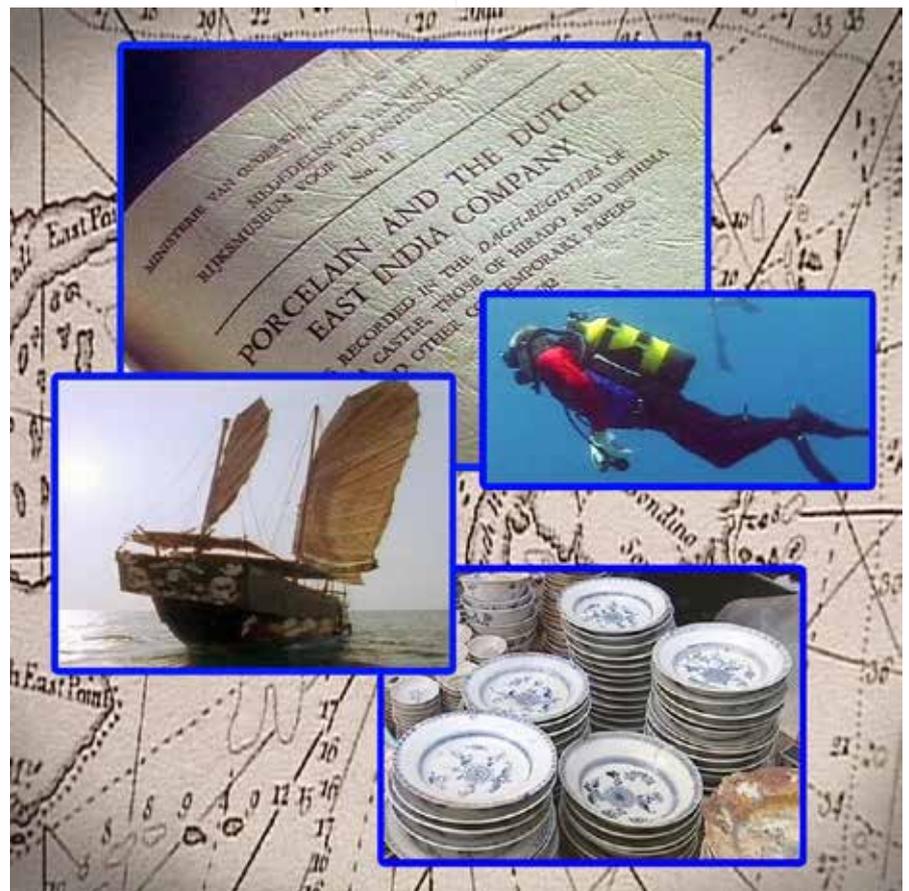
Proses pengangkatan bangkai-bangkai kapal seperti Geldermalsen (1985), Tek Sing (1999), Intan (1997), Belitung (1998-99) dan Nanhuan/Cirebon (2004-05), yang semuanya ditemukan di perairan Indonesia, kata Tjoa-Bonatz, telah menjadi perdebatan internasional tentang warisan budaya bawah air dan peraturannya. Dua kasus pertama merupakan operasi komersial dan menyebabkan penyebaran bahan arkeologi di pasar seni internasional. Perundang-undangan warisan maritim di Cina dan Indonesia dimulai dengan pengalaman bangkai kapal Geldermalsen.

Oleh sebab itu, Indonesia menetapkan bahwa untuk selanjutnya semua peninggalan arkeologi yang tenggelam di wilayahnya adalah milik negara. Kasus kedua, bangkai kapal Tek Sing, yang menjadi studi kasus

utama Tjoa-Bonatz, menjadi negosiasi tentang hak kepemilikan yang mengungkap dengan jelas bahwa prosedurnya bertentangan langsung dengan perlindungan benda budaya bawah air. Tiga kasus lainnya - penyelamatan bangkai kapal Intan, Belitung dan Nanhuan/Cirebon - mewakili model kerja sama komersial yang berbeda dengan pemerintah Indonesia.

Dalam kasus bangkai kapal Intan, Tjoa-Bonatz mencatat, kapal abad kesepuluh ini memiliki nilai intrinsik bagi sejarah Indonesia. Kapal buatan lokal sedang dalam pelayaran dari Sumatera Selatan ke Jawa ketika tenggelam di Laut Jawa dengan muatan yang sangat kaya dari berbagai tempat di Asia Timur dan Tenggara.

Penemuan ini memungkinkan melihat sekilas proses bongkar-muat internasional awal di masa kejayaan kerajaan Sriwijaya yang berkembang dari abad ketujuh hingga keempat belas di Sumatera Selatan. Pada 1997, penyelamatannya menghasilkan 13.463 objek yang diambil oleh perusahaan patungan antara pemegang lisensi Indonesia dan perusahaan Seabed Explorations Jerman, yang kemudian



• INFO KHUSUS

berbasis di Selandia Baru.

Bahan yang diambil pertama kali dibawa ke Jerman pada 2002, kemudian dikembalikan dan ditukar dengan muatan kapal karam Belitung sebagai sebagian pembayaran kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian dijual ke Singaporean Sentosa Leisure Group pada 2005.

Berbeda dengan semua kasus bangkai kapal yang disebutkan tadi, total muatan bangkai kapal Belitung, sebuah dhow arab abad kesembilan, tetap menjadi kumpulan artefak terbesar dari Dinasti Tang (618–907). Sebagian besar dari 60.000 artefak keramik yang ditemukan, selain benda kaca dan logam, didokumentasikan dengan baik dan dipamerkan kepada publik di Museum Peradaban Asia Singapura sejak 2015.

Sedangkan dalam kasus kapal Tek

350.000 keping keramik, dikumpulkan dari berbagai tempat di Cina Selatan dan direncanakan untuk dijual di pasar Asia Tenggara.

Porselen adalah komoditas yang sangat dihargai dan tahan lama berbeda dengan gerabah lokal tanpa glasir yang dibuat di Jawa. Piring bercat biru-putih dalam set yang serasi adalah jenis yang paling dominan untuk didistribusikan di pelabuhan tujuan.

Barang langka dengan nilai satuan tinggi melengkapi rangkaian barang berharga baik barang dagangan, barang pesanan, atau barang pribadi penumpang, seperti benda logam, barang antik keramik, dan teko atau patung pribadi. Beberapa artefak, seperti batu nisan dan patung Buddha, memiliki makna seremonial bagi komunitas Tionghoa perantauan. Stoples tembikar digunakan dalam perdagangan

ditenggelamkan kembali ke laut.

Jumlah artefak yang terabaikan dan tersisa di situs sangat banyak sehingga perusahaan lain mengeksplorasi situs yang sama belasan tahun kemudian. Ternyata, sekitar 350.000 pecahan peninggalan dari Tek Sing menyisakan situs kehancuran di dasar laut. Kurangnya catatan penggalian, baik dalam konteks penemuan arkeologi atau bangkai kapal, tindakan konservasi yang tidak tepat dan pemulihan material bersejarah secara selektif bertentangan dengan standar arkeologi yang layak. Ini termasuk pemetaan dan dokumentasi lengkap situs, catatan penyelaman, konservasi dan tampilan materi yang digali kepada publik. Hatcher didiskreditkan oleh apa yang disebut UNESCO sebagai "perusahaan penjual harta karun".

Untuk menghilangkan keraguan tentang keahlian perusahaan, kesulitan dari penyelamatan yang memakan waktu dan secara teknis dilengkapi dengan baik dijelaskan secara ekstensif dalam publikasi mereka. Hatcher menekankan bahwa sumber arsip ada di bangkai kapal dan timnya mengawetkan materi yang seharusnya tidak dicatat atau dijual di pasar gelap, rusak karena sebab alamiah, atau dijarah. Dia juga menyalahkan pemerintah dan mengatakan bahwa upaya mereka tidak memadai untuk melindungi warisan sejarahnya. Alasan ini sering dikemukakan untuk mendukung perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Kendala ekonomi yang menyebabkan berakhirnya eksplorasi perusahaan di Indonesia dibungkam oleh cerita sensasional tentang kemungkinan ketakutan akan kerusakan politik dan ancaman terus-menerus dari "bajak laut", yang memenuhi persepsi umum tentang pekerjaan petualangan yang dianggap sebagai "arkeolog" maritim.

Perusahaan Hatcher mengklaim bahwa operasi tersebut dilakukan di bawah lisensi resmi bekerja sama dengan perusahaan Indonesia PT Pratama Cakrawala Dirga. Pada September 1999, ternyata yang terakhir hanyalah "shell company" karena seorang pejabat di Kementerian Politik dan Keamanan dan tersangka lainnya dituduh



Sing, Tjoa-Bonatz memiliki banyak catatan. Setelah peraturan nasional pertama diberlakukan pada 1989, kata dia, pemulihan bangkai kapal Tek Sing pada 1999 menunjukkan bagaimana Indonesia berjuang untuk menuntut hak milik, sementara sebuah perusahaan Australia secara bebas menjual, memindahkan lokasi, dan mengalihkan barang-barang arkeologi.

Kapal besar China Tek Sing ("Bintang Sejati") tenggelam di Selat Gaspar yang memisahkan Bangka dan Belitung dalam perjalanannya dari Xiamen, Cina Selatan, ke Jakarta pada 1822. Di kapal itu ada 1.600 orang dan 200 anak buah kapal. Kebanyakan dari mereka, terutama imigran China, tenggelam. Hanya 190 orang yang selamat dan diselamatkan oleh kapal perdagangan opium Inggris. Muatan dagang, sejumlah besar lebih dari

bahan makanan dan opium. Barang-barang perabotan dan seni melukiskan gambaran volume dan keragaman produk yang terlibat dalam perdagangan maritim Tiongkok ke Indonesia.

Nah, pada 1999, perusahaan dengan pemegang saham Australia, Ocean Salvage Corporation, yang dimiliki oleh Michael Hatcher, yang sebelumnya telah terlibat dalam kasus Geldermalsen, mengambil alih penyelamatan Tek Sing. Dimensi kapal penyelamat 50 x 14 meter yang dirancang untuk 42 pekerja menunjukkan ukuran perusahaan yang besar ini. Benda-benda yang diperkirakan bernilai uang, termasuk artefak porselen, logam dan batu, ditemukan selama 2.250 kali penyelaman. Lainnya yang dinilai tidak layak diselamatkan ditinggalkan di dasar laut, sisa-sisa manusia diabaikan dan kapal yang retak

memalsukan tanda tangan untuk keperluan perizinan. Karena kasus penipuan dan penyuaian ini perusahaan Hatcher terlibat, dan penyelamnya yang bermaksud melakukan ekspedisi penyelamatan kedua, ditahan di penjara dan peralatan mereka disita.

Pada periode yang sama, sebuah kapal berbendera Belize yang disewa oleh Hatcher di Singapura mengangkut barang-barang yang sudah diambil dan dibawa ke Adelaide. Jumlah kontainer bervariasi antara 43 dan 47, menurut sumbernya. Australia atas inisiatifnya memberi tahu Indonesia tentang artefak bangkai kapal yang tampaknya diekspor secara ilegal bahkan sebelum Indonesia memintanya.

Namun, ekspor ilegal tidak dapat dibuktikan dan, sebelum perwakilan Indonesia datang, Australia mengizinkan 37 kontainer untuk diekspor ke Jerman. Undang-Undang Australia hanya mengizinkan penyimpanan selama 60 hari. Tujuh kontainer pengiriman kemudian ditemukan oleh Polisi Federal Australia dan karena bukti pelanggaran hukum dari Indonesia belum diterima, tujuh kontainer ini dikirim kembali ke Indonesia satu tahun kemudian. Belum diketahui keberadaan porselen dari Tek Sing ini. Pada November 2000, penjualan di rumah lelang Nagel di Stuttgart, Jerman.

Namun, Tjoa-Bonatz menyoroti fakta bahwa operasi penyelamatan - bahkan yang malah tidak memenuhi standard profesional - sangat mahal dan tidak berfungsi sebagai model bisnis yang berorientasi keuntungan. Mungkin ya untuk kapal Tek Sing (1999). Namun, belum tentu untuk kapal Geldermalsen (1986).

Dua-duanya mainan Michael Hatcher, orang Inggris kelahiran 1940 yang membangun perusahaan pengangkut bangkai kapal karam Ocean Salvage Corporation di Australia. ●

URUSAN HUKUM DAN KEBIJAKAN MASIH PERLU PENDALAMAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai kementerian teknis masih mendalami keputusan pembukaan investasi untuk pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT). Kabarnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono ingin harta karun BMKT itu memprioritaskan investor lokal.

"Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beranggapan sebaiknya negara yang melakukan riset, pengangkatan, dan pengelolaan BMKT tersebut," kata Jubir Bicara Menteri KP Wahyu Muryadi, Sabtu, 13 Maret 2021.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, harta karun bawah laut tidak termasuk daftar usaha prioritas investasi. Untuk itu, mekanisme penggarapan harus sesuai dengan peraturan pengelolaan yang berlaku.

Apalagi ada Undang-Undang yang mengatur bahwa benda cagar budaya dari kapal tenggelam tidak boleh dijual dan dibawa swasta ke luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010.

Sebab itu sebelum membuat rekomendasi, kementerian akan mendalami segala aturan meski Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah mengkonfirmasi draft soal BMKT tengah dibahas. "Rekomendasi dari KKP sebagai kementerian teknis, menyangkut BMKT tetap masih sangat diperlukan," ucap Wahyu.

Sebagai informasi, awalnya bidang usaha BMKT masuk dalam daftar 20 bidang usaha tertutup bagi investasi yang diatur di Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Namun daftar negatif investasi direvisi melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dari yang semula 20 bidang, kini hanya 6 bidang usaha saja yang tertutup. Selain BMKT, ada tiga bidang usaha yang terkait dengan investasi minuman beralkohol. Karena banyak pertimbangan, akhirnya Presiden RI Joko Widodo menutup kembali tiga bidang usaha di segmen minuman beralkohol itu pada Selasa, 2 Maret 2021.

Berdasarkan keterangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, pengangkutan benda berharga muatan kapal tenggelam hanya boleh dipamerkan dan tidak dikomersialisasi. Segala bentuk benda cagar budaya pun tak seluruhnya menjadi milik pengangkut. Pembuat kebijakan menetapkan porsi 50:50 untuk pemerintah dan pengangkut.

Nah, bagaimana balik modal investasi dan keuntungannya jika tidak boleh dikomersialisasi?

Mungkin akan lebih jelas jika sudah ada yang mendapat izin investasi menurut ketentuan baru. ●



ANTARA HARTA KARUN DAN NILAI LUHUR BUDAYA MARITIM

Menyebut bangkai kapal tenggelam dan muatannya yang berharga sebagai harta karun sebenarnya agak menyesatkan. Namun, kenyataannya memang lebih tampak seperti itu.

Salah satu pengertian harta karun adalah sejumlah besar benda atau kekayaan lain yang tersembunyi, maupun yang ditemukan namun tidak diketahui asal-usulnya. Kata karun berasal dari Qarun atau Karun, tokoh pada zaman Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran, kita suci umat Islam.

Qarun adalah seorang yang kaya raya, tetapi tertimbun beserta harta bendanya karena kesombongannya. Bumi menelan Qarun beserta pengikutnya dalam semalam. Tempat Qarun tenggelam bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau

Qarun atau dalam bahasa Arab Bahirah Qarun. Yang tersisa hanya puing-puing istana Qarun yang terletak di daerah Al Fayyum, Mesir.

Jelas bahwa harta karun berasal dari kisah yang terjadi di daratan. Sedangkan bangkai kapal-kapal tenggelam dalam lintasan sejarah Nusantara berada di lautan, serta dapat diidentifikasi asal-usulnya melalui sumber-sumber sejarah yang tertulis atau terbukti secara empirik.

Namun, sebutan harta karun tampaknya lebih memikat perhatian masyarakat awam dan karena itu spektakuler sekaligus menghebohkan. Tambahan pula, harta karun melekat

dengan pengertian benda tak bertuan yang siapa saja penemunya boleh memilikinya.

Dalam perspektif harta karun itulah arkeolog Mundardjito pernah mengemukakan, Indonesia sempat mengalami kehebohan melalui penemuan spektakuler Michael Hatcher pada 1986. Antara lain berupa 126 batang emas lantakan seberat 50 kg dan 160 ribu benda keramik Cina yang diangkat dari dasar perairan Riau --setelah 235 tahun lamanya tersimpan di dasar laut-- dari sebuah kapal kargo VOC Geldermalsen yang karam pada 1751.

"Peristiwa pengangkatan benda-benda cagar budaya itu telah mem-



bangunkan kita dari tidur lama bahwa di dasar laut Indonesia tersimpan benda-benda budaya yang ditinjau dari segi ekonomi amat tinggi nilainya," kata dia dalam tulisan berparadigma arkeologi maritim pada 2003. Itulah sebabnya, sambung Mundardjito, baik pemerintah maupun dunia swasta tersedot perhatiannya karena penjualan di balai lelang internasional Christie's ketika itu menghasilkan uang sejumlah 18 juta dollar Amerika.

Nah, di mata Mundardjito, peninggalan kapal karam di dasar lautan itu lebih sebagai cagar budaya yang perlu mendapat perlindungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Bukan sekadar kepentingan ekonomi, atau penciptaan lapangan kerja.

Temuan Hatcher yang dikenal kemudian sebagai The Nanking Cargo, tidak pernah dipamerkan di museum-museum di Indonesia dengan tujuan menambah pengetahuan dan pendidikan masyarakat kita, padahal benda cagar budaya itu ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Tidak

ada pula arkeolog Indonesia yang ikut serta dalam tim "eksplorasi" Hatcher sehingga proses pengangkatan itu kurang bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pengalaman apapun bagi para arkeolog dalam negeri.

Tertutup kemungkinan pula bagi arkeolog di masa depan untuk melakukan penafsiran atau penafsiran-ulang (reinterpretation) atas temuan di situs dasar laut itu, padahal hal itu biasa dilakukan bilamana di kemudian hari timbul teori dan metodologi baru. Demikian pula kita tidak memperoleh keuntungan ekonomis apapun dari hasil pelelangan tersebut. Ringkasnya, menurut Mundardjito, Indonesia rugi banyak.

The Nanking Cargo temuan Hatcher lantas memicu Indonesia, juga China (seperti dikemukakan oleh antropolog Jerman Mai Lin Tjoa-Bonatz) membenahi regulasi terkait peninggalan kapal-kapal karam itu. Tjoa-Bonatz, peranakan Tionghoa Indonesia yang kini guru besar antropologi di Universitas Gottingen, Jerman, malah meneliti khusus BMKT kapal Tek Sing yang tenggelam di Selat Gaspar, antara Bangka dan Belitung.

Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pertama berupa Kepres 43 Tahun 1989, tanggal 14 Agustus 1989 mengenai pembentukan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam. Kemudian muncul kebijakan turunannya berupa Ketentuan Teknis Pelaksanaan Keppres yang diterbitkan Panitia Nasional (Kep 4/PN/BMKT/12/1989), dan Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Benda Berharga Khususnya yang Berhubungan dengan Benda Cagar Budaya di Wilayah Perairan Indonesia yang diterbitkan sebagai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (No. 0843/O/1989).

Namun, hingga sekarang, semua kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang secara bergiliran membuka-tutup izin pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) tampak belum menjembatani kepentingan perlindungan cagar budaya dengan kepentingan bisnis yang berorientasi keuntungan. Gambaran ini ter-

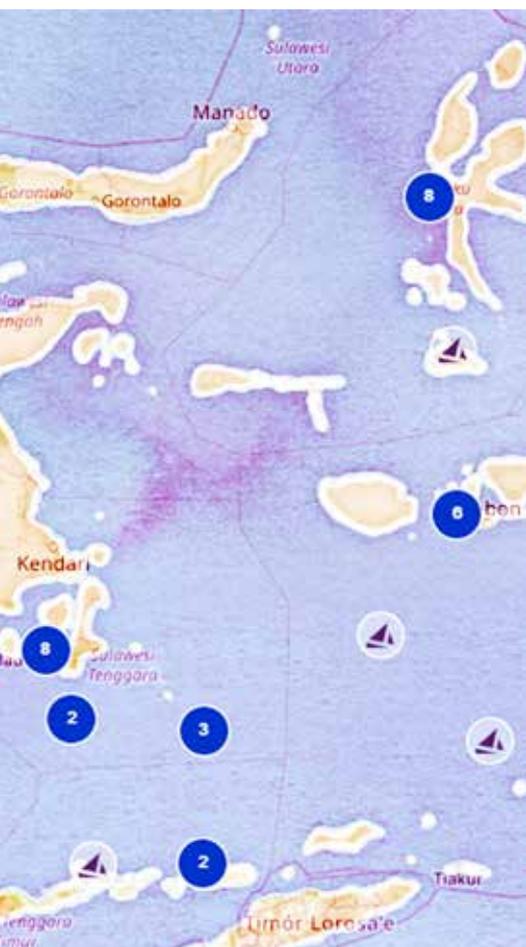
lihat pula dalam kebijakan baru yang membuka izin investasi pengangkatan BMKT melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai turunan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebenarnya sudah ada upaya perlindungan cagar budaya melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 26 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

1. pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya;
2. pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air;
3. pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi;
4. setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan Pasal 27 menyebutkan bahwa 'ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur dalam peraturan pemerintah'. Nah, turunan berupa peraturan pemerintah itulah seharusnya lebih teknis hingga kepentingan bisnis dan cagar budaya berjalan seiringan.

Apabila merujuk pada aturan dalam UU No. 11 Tahun 2010, arah pengelolaan BMKT adalah untuk kepentingan konservasi, mengingat BMKT memiliki nilai sejarah dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Toh, UU No 11 Tahun 2010 pun belum memastikan lokasi tinggalan bawah air mana yang menjadi situs cagar budaya saja, atau





situs cagar budaya sekaligus dapat mengakomodasi kepentingan bisnis. Belum lagi perintah UU yang mengharuskan pemerintah mencari peningkatan calon cagar budaya.

Yang muncul kemudian adalah UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur bahwa kegiatan pengangkatan BMKT merupakan pemanfaatan sumber daya kelautan yang akan dikembangkan sebagai salah satu bentuk jenis industri jasa maritim. Ketidakjelasan terhadap kelembagaan pengelolaan juga berpotensi terjadi jika melihat dalam UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 yang mengatur bahwa izin pengelolaan kegiatan pengangkatan BMKT merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan jika merunut pada UU No. 11 Tahun 2010 yang mengatur BMKT sebagai benda cagar budaya, maka yang berhak mengelolanya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam hal ini, staf Kedepuyan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet pada 2016 lalu menulis kajian yang menyebutkan kurang harmonisnya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang BMKT, serta belum

terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2010 menyulitkan berbagai pihak terutama pelaksana teknis di tingkat Pemerintah Daerah dalam melakukan langkah-langkah baik dalam pengelolaan maupun tindakan terhadap pencurian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait status BMKT. Sebelum terbitnya UU No. 11 Tahun 2010, terdapat 13 kegiatan pengangkatan BMKT oleh swasta yang sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan tidak dapat memproses hasil pengangkatan BMKT tersebut (untuk dijual) karena masih menunggu kepastian hukum.

Apabila arah pengelolaan BMKT murni ditujukan untuk konservasi, maka konsekuensinya adalah Pemerintah harus menyiapkan baik aspek teknis maupun penganggaran, mengingat kegiatan pengangkatan dan pemeliharaan BMKT membutuhkan anggaran yang besar, karena terkait dengan kebutuhan teknologi dan SDM profesional. Untuk proses mulai survei hingga pengangkatan, selama ini masih menggunakan pihak ketiga dengan sistem bagi hasil. Sebagai contoh, anggaran untuk survei hingga pengangkatan satu lokasi di perairan

laut Jawa (Utara Cirebon) menghabiskan dana sekitar USD 10 juta, hasil temuan tersebut sedianya dilelang dan ditaksir senilai USD 80 juta, akan tetapi tidak laku karena tidak ada peminat yang mendaftar, sehingga setelah diambil sebagian sebagai koleksi negara, pemerintah membagi rata dengan pihak ketiga yang mengeksekusi BMKT tersebut. Saat ini BMKT yang menjadi bagian Pemerintah masih tersimpan di Warehouse Cileungsi Jawa Barat. Pemeliharaan untuk BMKT yang sudah diangkat juga memakan biaya mahal karena membutuhkan perlakuan khusus, termasuk apabila diputuskan untuk melakukan konservasi insitu.

Satu hal yang juga perlu diperhatikan ketika konservasi menjadi arah pengelolaan BMKT adalah penetapan lokasi kapal tenggelam (BMKT) sebagai kawasan cagar budaya, maka hal ini terkait dengan penataan ruang (zona kawasan), sehingga menjadi sangat penting untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mengeluarkan penetapan kawasan-kawasan cagar budaya bawah air untuk dapat diakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang saat ini sedang disusun Kementerian Ke-

lautan dan Perikanan. Dengan masuk dalam pengaturan RTRLN, maka peruntukan ruang bagi kawasan cagar budaya bawah air akan diarahkan agar tidak mengganggu fungsi konservasi cagar budaya. Namun, konsekuensinya adalah bahwa titik-titik lokasi dimana BMKT itu berada akan terpublikasi ke publik, sehingga pemerintah harus menyiapkan dengan matang aspek pengawasannya untuk menghindari tindakan pencurian.

Untuk itu, kiranya Pemerintah perlu segera memutuskan dan mengambil langkah-langkah guna memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan BMKT (mutlak dikonservasi atau dapat dikomersialisasikan/diperjualbelikan). Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk kepastian berusaha bagi para investor, mengingat bahwa Pemerintah sedang membangun iklim investasi yang kondusif, jangan sampai permasalahan ketidakpastian hukum ini akan menjadi tendensi negatif juga bagi sektor usaha secara umum.

Nah, ketika belum jelas upaya sisi konservasi, UU Cipta Kerja dan turunannya di bidang izin investasi yang bersifat omnibus law, dapat menafikan UU lainnya, muncul menjadi kebijakan utama terkait BMKT. Kalaupun dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja, bidang pengangkatan BMKT ini bukanlah semacam industri atau jasa yang dapat menampung limpahan penduduk angkatan kerja secara masal.

Tingkat kerumitan BMKT dari sisi legal maupun operasional membuat bidang ini lebih bersifat capital intensive dibandingkan dengan labor atau human intensive. Karena kerumitan itu pula penanganan sumber daya budaya di perairan Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan di negara maju. Malah dengan negara sekawasan di Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina sekalipun Indonesia masih kurang aktif, sementara jumlah peninggalan dalam lalu lintas dan jalur pelayaran bisnis regional dan internasional amat ramai.

Arkeolog Mundardjito menggambarkan, implikasi kerumitan itu dengan sejumlah kelemahan terkait: (1) jumlah

dan mutu arkeolog Indonesia yang berpendidikan arkeologi bawah air jauh dari memadai (2) pengetahuan teoritis dan pengalaman penelitian arkeologi bawah air mereka dapat dikatakan amat kurang; (3) peralatan dan perlengkapan yang memang khas dan mahal belum banyak dimiliki instansi keurbakalaan; (4) belum ada pangkalan data tentang situs bawah air yang lengkap; (5) dana untuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian amat terbatas; (6) belum ada strategi penelitian bawah air yang jelas apalagi dengan skala priori-

ologi bawah air, sudah tentu dibutuhkan setidaknya arkeologi penyelam bersertifikat tingkat lanjut (A2) dan mahir (A3), dengan jam selam yang cukup tinggi (berpengalaman). Keadaan ini dapat dimengerti karena kegiatan penyelaman di dasar laut dengan kedalaman tertentu, dipastikan berisiko tinggi jika tidak dipersiapkan dengan baik. Untuk meningkatkan kemampuan para penyelam tersebut, telah diupayakan mengikutkan mereka dalam pelatihan underwater archaeology di luar negeri, seperti di Thailand yang setiap tahun diselenggarakan secara



Michael Hatcher

tasnya; dan (7) belum ada pengaturan penanganan yang seimbang antara kepentingan pelestarian dan kepentingan pemanfaatan.

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala yang terbentuk pada 2005 di bawah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pernah mencatat, hingga sebelum Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan terpisah lagi, tercatat memiliki 58 personel dengan sertifikat selam, tersebar di tingkat pusat dan di daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 19 orang bersertifikat tingkat dasar (A1), 34 orang bersertifikat tingkat lanjut (A2), dan lima orang bersertifikat tingkat mahir (A3).

Untuk melakukan penelitian arke-

rutin oleh Unesco. Pada saat ini sedang diupayakan pelatihan underwater archaeology yang diampu oleh Unesco, pada masa yang akan datang, akan diselenggarakan di Indonesia, dengan melalui pendirian pusat pengembangan kompetensi peninggalan bawah air di kota Makassar.

Memang jelas, Indonesia belum siap menangani BMKT sekaligus menjembatani kepentingan politik terkait sejarah dan budaya dengan semangat bisnis yang lebih berorientasi komersial. Untuk sementara, memang sepertinya BMKT lebih seperti harta karun tak bertuan. Siapa saja sanggup menemukannya, ia dapat memilikinya meskipun sebagian saja. ●

ALERGI

Gunawan Effendi

Mungkin banyak yang alergi dengan survei tendensius atau menggiring opini ke arah tertentu. Tendensiusnya yang membuat alergi. Jika survei bebas dari kecurigaan tendensi, semoga tiadalah itu alergi.

Nah, survei bebas tendensi ini salah satunya adalah yang hasilnya terbit pada pekan kedua Februari 2021 lalu. Yang menyelenggarakan survei adalah lembaga kajian Singapura ASEAN Study Center di ISEAS-Yusof Ishak Institute (dulu ISEAS saja, Institute of Southeast Asian Studies yang berdiri sejak 1968). Alhasil, dari tiga survei tahunan berturut-turut oleh lembaga itu, dua antaranya memiliki fokus yang sama: Mengukur sikap dan persepsi mengenai situasi dan kondisi regional dan geo-politik Asia Tenggara dari para pengambil kebijakan, pembentuk opini, dan kalangan intelektual di wilayah ini sehingga dapat dianggap sebagai pandangan umum warga yang berada di Asia Tenggara. Judulnya Keadaan Asia Tenggara (The State of Southeast Asia) 2021.

Ringkasan survei yang disusun oleh Sharon Seah dan kawan-kawan, satu antaranya asal Indonesia, Melinda Martinus, mengemukakan beberapa poin antara lain: Pertama, yang paling menjadi perhatian utama masyarakat di Asia Tenggara adalah pandemi Covid-19 dan proses pemulihannya. Ancaman kesehatan akibat COVID-19 (76 persen) saat ini menjadi perhatian paling mendesak di kawasan ini, diikuti oleh pengangguran dan resesi ekonomi (63,0 persen) serta kesenjangan sosial ekonomi dan disparitas pendapatan (40,7 persen). Terorisme menempati urutan terakhir (5,2 persen), setelah kondisi hak asasi manusia yang memburuk (12,6 persen).

Ketika diminta pendapat negara ASEAN mana yang terbaik dalam menangani Covid-19, Singapura dan Vietnam menduduki peringkat pertama dengan masing-masing mendapat dukungan dari 32,7 persen dan 31,1 persen. Sedangkan negara yang dianggap paling banyak membantu, terpilih China di urutan pertama (oleh 44,2 persen responden), kemudian Jepang (18,2 persen) dan Uni Eropa (10,3 persen). Secara keseluruhan, 60,7 persen warga ASEAN setuju dengan cara pemerintahnya menangani pandemi Covid-19, tidak setuju 24,2 persen, dan netral 15,1 persen.

Namun, jika dipaksa memilih dalam persaingan Amerika Serikat dengan China yang sedang berlangsung, mayoritas responden (61,5 persen) memilih AS. Survei ini juga menunjukkan China sebagai pilihan turun dari 46,4 persen pada 2020 menjadi 38,5 persen pada 2021, meskipun diplomasi Covid-19 China intensif di kawasan ini.

Nah, saat mendapat pilihan bagaimana sikap terbaik dalam menanggapi perseteruan Beijing-Washington, 53,8 persen lebih memilih ASEAN meningkatkan ketahanan dan persatuannya sendiri untuk menghadapi dampak persaingan kedua raksasa ekonomi dan politik yang berseberangan itu.

Meskipun China mendapat pengakuan dari 76,3 persen responden survei sangat berpengaruh terhadap perekonomian ASEAN, toh 72,3 persen antaranya justru mengkhawatirkan pengaruh itu. Indikasi lain, 49 persen responden mengakui pengaruh politik China di ASEAN, namun 88,6 persen antaranya cemas dengan perkembangan itu. Untuk soal ini, Amerika Serikat masih menjadi harapan untuk mengimbangi pengaruh ekonomi dan politik China di ASEAN. Malah pilihan terhadap AS untuk mitra strategi naik dari 52,7 tahun lalu menjadi 63,1 persen pada 2021. Begitu pula pilihan AS untuk pengaruh politik dan keamanan naik dari 34,9 persen menjadi 55,4 persen tahun ini.

Sayangnya, menurut survei yang sama, persepsi utama orang di Asia Tenggara tentang organisasi ASEAN adalah lambat dan tidak efektif sehingga tidak dapat menghadapi perkembangan politik dan ekonomi yang berubah-ubah (71,5 persen).

Sejalan dengan itu, 52,4 persen khawatir bahwa ASEAN tidak dapat mengatasi tantangan pandemi saat ini. Geopolitik juga tidak jauh dari pikiran semua orang karena 69,1 persen khawatir bahwa ASEAN akan menjadi arena persaingan antarkekuatan besar, dan anggotanya dapat menjadi wakil atau proxy mereka. Kekhawatiran bahwa ASEAN menjadi tidak relevan dalam tatanan dunia baru memang berada di peringkat terakhir (22,1 persen).

Yang terbiasa dengan survei, mungkin mempertanyakan bias Singapura di sini. Tapi, poin terakhir tentang ASEAN yang lamban tampak sebagai ajakan bagaimana organisasi ini dapat berfungsi seperti Komisi Uni Eropa. Lebih gesit, trengginas, dan dapat menjadi pegangan semua negara anggotanya. Itu berarti kita harus siap-siap dengan identitas baru sebagai orang Asia Tenggara ketika berhadapan dengan bangsa besar seperti AS, India, China, dan juga Uni Eropa. Ada yang alergi? ●





info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

www.infoindonesia.id

Network

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi iNFO kepada masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B
KELURAHAN CILANDAK
BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, JAKARTA
SELATAN (12430)
TELP 021-27812397



INOVASI UNTUK NEGERI
nfo indonesia

EDISI # 06 MARET 2021

<https://infoindonesia.id>



**Sandiaga Uno
Menanti Janji Airlangga
Untuk Parawisata**